

KAJIAN BIDANG EKONOMI: KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT



Totok Mei Untarto
Abdul Havidz Fatamasya
Rully Wurarah
Yeddy Aprian Syakh
Mona P. Mokodompit

Editor
Charlie D. Heatubun
Ezrom Batorinding

KAJIAN BIDANG EKONOMI: KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT

Ir. Totok Mei Untarto, M.Sc.

Ir. Abdul Havidz Fatamasya, M.Si.

Dr. Rully Wurarah, M.Si.

Yeddy Aprian Syakh, S.ST.

Mona Permatasari Mokodompit, SE., M.Ak.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat

Gedung Kantor Gubernur Sayap 1 Lt. 2 dan 3

Jl. Brigjen (Purn) Abraham O. Atururi Arfai Manokwari

Papua Barat 98312

KAJIAN BIDANG EKONOMI: KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT

Editor

Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut., M.Si
Ezrom Batorinding, S.Hut., M.Sc

Desain Cover

Ferdian Mahendra Hamzah

Diterbitkan dan Dicitak oleh

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat

ISBN

978-623-6113-01-1



Dicitak dengan Pembiayaan Anggaran

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA)
Provinsi Papua Barat Tahun 2020

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pasal 1 ayat 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, pasal 24 dan pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- I. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/ atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi actual;
- II. Penggandaan ciptaan dan atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- III. Penggandaan ciptaan dan atau produk hak terkait untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- IV. Penggunaan untuk kepentingan Pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/ atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau Lembaga penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan/ atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan kasih dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini Tim Penulis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat dapat menerbitkan buku berjudul Kajian Bidang Ekonomi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Provinsi Papua Barat.

Buku ini merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Balitbangda Provinsi Papua Barat pada tahun 2018. Buku ini berisi informasi hasil analisis proses perencanaan dan penganggaran di Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Papua Barat di Sorong dan relevansinya dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah, serta kendala-kendala dalam proses penyusunan anggaran dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam pengelolaan APBD.

Penerbitan buku ini bertujuan memberikan gambaran sejauh mana peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah di kawasan yang dipersiapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Hasil kajian evaluasi yang ditampilkan adalah berdasarkan data dan informasi selama lima tahun terakhir, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang jujur, demokratis, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel yang dapat mendorong peningkatan indikator ekonomi maupun pembangunan.

Pada kesempatan ini, kami tim penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat yang telah mengizinkan kami para penulis tergabung dalam tim peneliti Balitbangda melaksanakan penelitian dan sekaligus mendorong dan membantu dalam upaya publikasi buku ini. Ucapan yang sama juga kami sampaikan kepada Kepala Sub Bidang Diseminasi dan Publikasi Kelitbangan beserta staf dan Tim Media Balitbangda Provinsi Papua Barat, para penyunting dan pihak percetakan yang sudah membantu sehingga buku ini boleh terbit.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan masukan dari pembaca sangat dibutuhkan untuk penyempurnaannya.

Manokwari, 10 Oktober 2020

Tim Penulis

SAMBUTAN

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat merupakan Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Papua Barat. Salah satu tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan adalah penyebarluasan informasi kelitbang dan inovasi daerah atau dikenal dengan difusi atau diseminasi dan publikasi. Diharapkan keberadaan Balitbangda Provinsi Papua Barat mampu mendorong peningkatan publikasi hasil-hasil riset ilmiah dan menjembatani penggunaan hasil-hasil publikasi tersebut dalam pembuatan kebijakan pembangunan di internal pemerintah daerah.



Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat saat ini sangat membutuhkan data dan informasi yang akurat dalam membuat berbagai kebijakan pembangunan daerah, sekaligus perlu mendapatkan hasil penilaian terhadap berbagai kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan sehingga akan segera melakukan upaya perbaikan demi tercapainya tujuan pembangunan. Disamping itu, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat juga merasa perlu untuk mempublikasikan kebijakan-kebijakan strategis yang mampu memberikan percepatan pembangunan ekonomi di Papua Barat untuk diketahui oleh berbagai pihak termasuk masyarakat. Salah satu kebijakan strategis pembangunan ekonomi di Papua Barat adalah dengan membangun **Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)** yang berlokasi di Kabupaten Sorong. Diharapkan bahwa KEK Sorong akan bertindak sebagai penghubung (hub) dan pembangkit pertumbuhan ekonomi di Papua Barat.

Penerbitan buku *“Kajian Bidang Ekonomi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Di Papua Barat”* sangat penting dalam rangka menjawab kebutuhan akan data dan informasi sekaligus berisi hasil penilaian terhadap kebijakan yang dibuat terkait pembangunan KEK Sorong, karena merupakan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh



Balitbangda Provinsi Papua Barat pada tahun 2019. Secara ringkas bisa disampaikan disini bahwa buku ini memuat informasi hasil analisis proses perencanaan dan penganggaran di KEK Provinsi Papua Barat di Sorong dan relevansinya dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah, serta kendala-kendala dalam proses penyusunan anggaran dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam pengelolaan APBD terkait pembangunan dan pengembangan KEK Sorong.

Saya menyampaikan ucapan selamat kepada para penulis dan semua pihak yang telah terlibat dan berhasil dalam publikasi buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan merupakan sumbangsih kecil dari Balitbangda dalam menunjang pembangunan daerah di Provinsi Berkelanjutan Papua Barat. Terima kasih dan Tuhan Memberkati!

Manokwari, 10 Oktober 2020

Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

Latar belakang	8
----------------------	---

KERANGKA TEORITIS

Sektor unggulan	12
Konsep keuangan daerah	20

ANALISIS EKONOMI REGIONAL

Harmonisasi RPJM daerah terhadap RPJM nasional	27
Pertumbuhan ekonomi	28
Distribusi PDRB lapangan usaha	32
Tingkat pengangguran terbuka	37
Kemiskinan	40
Ketimpangan	43
Pembangunan manusia	46
Pembangunan wilayah	49
Sinergitas RPJMD wilayah KEK terhadap RPJMD Papua Barat dan RPJMN	58

ANALISIS APBN

APBN pada Kawasan Ekonomi Khusus	94
Analisis cash flow pemerintah pusat	100

ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Analisis pendapatan Kabupaten Raja Ampat	103
Analisis belanja Kabupaten Raja Ampat	110
Analisis pendapatan Kabupaten Sorong	114
Analisis belanja Kabupaten Sorong	121
Analisis pendapatan Kota Sorong	125
Analisis belanja Kota Sorong	132
Perbandingan analisis pendapatan pada Kawasan Ekonomi Khusus	135
Perbandingan analisis belanja pada Kawasan Ekonomi Khusus	142

ANALISIS SEKTOR

Sektor pendidikan	147
Sektor kesehatan	157

ANALISIS KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI REGIONAL

Tipologi kabupaten/kota tahun 2014	168
Tipologi kabupaten/kota tahun 2014	174
Tipologi kabupaten/kota berbasis IPM tahun 2018	176
Analisis basis sektor perekonomian	177
Analisis basis sektor perekonomian Kabupaten Sorong	178

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Tentang kemiskinan	199
Perubahan garis kemiskinan	200
Perkembangan tingkat kemiskinan	202
Kedalaman kemiskinan dan keparahan	203
Bantuan siswa miskin	206

PENUTUP

Daftar Pustaka	211
----------------------	-----



01

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi adalah menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Di samping itu juga dapat mendorong peningkatan kemandirian daerah, perbaikan transparansi dan akuntabilitas publik serta peningkatan demokrasi di daerah. Kesemuanya ini didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan, potensi dan aspirasi masyarakat. Kemajuan suatu pemerintahan, salah satunya ditentukan oleh kesungguhan dan kemampuan dalam mengelola tata pemerintahan yang baik serta didukung oleh sumberdaya manusia yang memadai.

Pencapaian pembangunan di berbagai tingkatan pemerintahan bergantung pada sinergitas peran pemerintah dan masyarakatnya, menyangkut pembagian peran dan kerja dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembangunan. Perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diikuti dengan pencapaian indikator ekonomi daerah pada akhirnya dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Provinsi Papua Barat memiliki potensi yang sangat melimpah baik perikanan, pertanian, pertambangan, hasil hutan dan pariwisata, semua sektor ini bisa menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi disamping itu Provinsi Papua Barat telah menyatakan sebagai Provinsi Pembangunan Berkelanjutan yang lebih terfokus pada pelestarian lingkungan. Pada satu sisi pencapaian indikator pembangunan masih belum optimal yang ditunjukkan dengan tingginya angka kemiskinan yang berada di atas rata-rata nasional diikuti juga dengan tingkat IPM yang berada di bawah rata-rata nasional serta gini rasio yang pincang.

Melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat 2017-2022 telah didefinisikan arah pembangunan ekonomi yang ingin dicapai daerah. Urgensi mendefinisikan arah pembangunan daerah disebabkan adanya kecenderungan perubahan dinamis kondisi lingkungan perekonomian global, nasional maupun regional yang sangat cepat dan sulit diprediksi. Perubahan dinamis kondisi perekonomian, pada satu sisi menuntut adanya respon/tanggapan yang cepat seluruh stakeholder perekonomian terhadap perubahan kondisi yang terjadi. Di sisi lain, tantangan kompleks pembangunan lokal yang menuntut percepatan penuntasan masalah yang dihadapi daerah. Kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat perlu dikedepankan karena tuntutan reformasi khususnya di bidang anggaran melalui tahapan proses penyusunan anggaran yang dilaksanakan sebagai cerminan bagi terlaksananya reformasi bidang anggaran yang efisien dan efektif, guna mendukung pencapaian indikator ekonomi dan pembangunan sesuai dengan program yang sudah direncanakan.

Hasil rekomendasi berdasarkan analisis kebijakan bidang ekonomi Provinsi Papua Barat tahun 2017 seperti:

1. Selama 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan disebabkan ketergantungan perekonomian Papua Barat lebih didominasi oleh sektor migas dan pertambangan, yang mengalami penurunan output.
2. Indikator pembangunan tingkat pengangguran cenderung menurun dan berfluktuasi disebabkan oleh menurunnya jumlah ekspor pada sektor migas dan pertambangan sehingga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada semua

sektor, dan terjadi peningkatan output pada sektor pertanian, konstruksi dan administrasi pemerintah serta jasa lainnya.

3. Tingkat ketimpangan pendapatan yang semakin melebar hingga tahun 2015 disebabkan alokasi pendapatan lebih banyak didominasi oleh kelompok menengah keatas.
4. Persentase penduduk miskin di Papua Barat mengalami penurunan, disebabkan oleh tingkat pendapatan yang meningkat dan persoalan ketimpangan pendapatan serta disparitas antar wilayah kabupaten/kota maupun antar kota dan desa.
5. Sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor jasa, sektor bangunan dan konstruksi serta sektor perdagangan, hotel dan restoran meskipun memberikan kontribusi terbesar dan mendominasi perkembangan perekonomian di Papua Barat selama periode 2012-2016 namun kontribusinya mengalami depresiasi selama periode tersebut.
6. Jasa pendidikan, transportasi, perdagangan, administrasi pemerintah dan konstruksi merupakan sektor ekonomi yang mengalami peningkatan kontribusi.
7. Peningkatan alokasi belanja modal selama 5 tahun terakhir tidak konsisten dan lebih banyak dialokasikan untuk pengadaan mesin, bangunan dan tanah sehingga kurang memberikan dorongan terhadap penciptaan output pada sektor-sektor yang produktif.
8. Alokasi belanja administrasi pemerintahan secara nominal mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun secara proporsional menurun, hal ini telah memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sehingga ketergantungan ekonomi terhadap sektor tersebut cukup tinggi terlebih pada daerah otonomi baru.
9. Alokasi belanja terhadap sektor strategis pertanian hanya 3,0 s.d 4,6 persen dari alokasi belanja selama 5 tahun yang mengakibatkan pendapatan golongan menengah kebawah mengalami stagnan. Sedangkan sektor konstruksi dan jasa lainnya mengalami peningkatan sehingga pendapatan golongan menengah keatas mengalami peningkatan yang menyebabkan distribusi pendapatan menjadi lebih lebar.
10. Alokasi belanja untuk jasa pendidikan dan kesehatan yang masing-masing sekitar 3 persen tidak konsisiten selama 5 tahun dan tidak terfokus pada kabupaten yang memiliki IPM yang rendah.

11. Alokasi belanja untuk mengurangi disparitas antar wilayah tidak nampak dalam alokasi belanja pada setiap program kegiatan.
12. Alokasi belanja terhadap sektor ekonomi yang memiliki tingkat kepekaan untuk mendorong sektor ekonomi lainnya dan yang memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja namun golongan menengah kebawah kurang mendapatkan perhatian dukungan alokasi belanja yang konsisten.
13. Alokasi belanja terhadap sektor strategis sesuai dengan RPJMD Papua Barat tahun 2017 – 2022 kurang mendapat dukungan belanja yang konsisten.
14. Alokasi belanja berdasarkan indikator makro maupun indikator pembangunan kurang efisien karena alokasi belanja kurang menggerakkan indikator tersebut.
15. Efektifitas alokasi belanja kurang sinkron dengan tujuan yang dicapai karena alokasi belanja lebih didominasi oleh belanja administrasi pemerintah.

Berdasarkan rekomendasi di atas maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat melakukan kajian kebijakan ekonomi yang lebih mendalam terutama menyangkut perencanaan dan penganggaran pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Papua Barat. Kajian ini menganalisa sejauh mana peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah di kawasan yang dipersiapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Kajian evaluasi dilakukan selama lima tahun terakhir, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang jujur, demokratis, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel yang dapat mendorong peningkatan indikator ekonomi maupun pembangunan.



02

KERANGKA TEORITIS

2.1. SEKTOR UNGGULAN

Sektor unggulan adalah sektor yang memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantages*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dengan produk sektor sejenis dari daerah lain dan mampu memberikan nilai manfaat yang lebih besar. Jadi sektor unggulan merupakan sektor kegiatan usaha yang dapat diunggulkan dalam rangka pengembangan dan pembangunan perekonomian sehingga dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pada setiap wilayah memiliki sektor unggulan yang berbeda-beda, tergantung pada potensi yang secara alamiah dimiliki oleh wilayah bersangkutan.

Sektor ekonomi unggulan sebagai suatu sektor ekonomi yang memiliki daya saing dalam beberapa periode tahun terakhir dan memiliki prospek ekonomi di masa yang akan datang. Sektor ekonomi yang dianggap unggul tersebut respons terhadap persoalan sosial maupun lingkungan. Jadi, sektor ekonomi unggulan dapat didefinisikan sebagai sektor ekonomi yang mampu menunjang dan mempercepat pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah yang mempunyai daya saing

serta pengembangannya tidak mengakibatkan sektor lain menjadi terhambat dan menimbulkan dampak lingkungan yang parah. Sebagai contoh, pengembangan sektor perdagangan melalui pembangunan *mall* yang lokasinya relatif dekat dengan pasar tradisional diperkirakan akan mematikan potensi pasar tradisional tersebut, begitu juga peningkatan aktivitas eksplorasi penambangan memungkinkan terjadinya kerusakan lingkungan terutama di sekitar lokasi penambangan. Faktor keterbatasan dana dan sumber daya menjadikan pemerintah daerah tidak dapat mengembangkan seluruh sektor yang dimiliki secara bersamaan. Langkah yang dapat dijadikan pilihan adalah dengan melakukan investasi pada satu atau beberapa sektor usaha, paling tidak sektor yang dipilih merupakan sektor ekonomi unggulan.

Melalui perencanaan pembangunan daerah berbasis sektor ekonomi unggulan, sebagai suatu konsep yang menekankan penggerak pembangunan suatu daerah pada sektor unggulan, maka terdapat beberapa kriteria mengenai sektor ekonomi unggulan, (Adisasmita, 2006) diantaranya:

1. Sektor unggulan mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang (*Forward dan Backward Linkages*) yang kuat, baik sesama sektor unggulan maupun sektor-sektor lain
2. Sektor unggulan mampu bersaing (*competitiveness*) dengan sektor sejenis dari wilayah lain baik regional ataupun internasional.
3. Sektor unggulan mampu menjadi penggerak utama (*Prime Mover*) pembangunan perekonomian. Artinya, sektor unggulan tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi sektor-sektor lain dan pendapatan masyarakat.
4. Pengembangan sektor unggulan berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup.

Pada saat sektor unggulan telah memasuki fase penurunan, maka pengembangan selanjutnya dapat diteruskan dengan cara: memperkuat strategi pemasaran pada sektor unggulan, seperti mempengaruhi konsumen untuk terus mengkonsumsi komoditas tersebut, melakukan promosi, meningkatkan kualitas sektor agar tetap memiliki daya saing, sehingga permintaan terhadap sektor tersebut tidak menurun secara drastis, menciptakan permintaan oleh industri antara (*intermediary industry*) yang berarti sekaligus menciptakan nilai tambah baru bagi perekonomian daerah yang bersangkutan. Suatu *leading industry* (sektor unggulan) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Relatif baru, dinamis dan mempunyai tingkat teknologi maju yang menginjeksikan iklim “cenderung pertumbuhan” ke dalam suatu daerah.
- b. Permintaan terhadap produknya mempunyai elastisitas pendapatan yang tinggi, produk dimana biasanya dijual ke pasar-pasar nasional.
- c. Mempunyai kaitan-kaitan antar industri yang kuat dengan sektor-sektor lainnya. Kaitan-kaitan ini dapat berbentuk kaitan kedepan (*forward linkages*), dalam hal ini industri tersebut mempunyai rasio penjualan hasil industri antara yang tinggi terhadap penjualan total, atau berbentuk kaitan kebelakang (*backward linkages*). Dalam hal ini industri tersebut mempunyai rasio input antara (dari industri-industri lainnya) yang tinggi terhadap input total.

Sektor unggulan menurut Mawardi (1997) adalah: sektor yang mempunyai nilai tambah dan produksi yang besar sehingga dapat mendorong peningkatan perekonomian lokal dan regional (wilayah yang lebih luas); sektor yang mempunyai *multiplier effect* yang besar terhadap kegiatan perekonomian lain dan pengembangan kawasan sekitarnya; sektor yang mempunyai permintaan yang tinggi, baik pasar lokal maupun pasar ekspor. Selanjutnya Sjafrizal (2008) mengemukakan bahwa suatu sektor memiliki unggulan, dalam arti memiliki potensi besar bagi perekonomian sehingga sektor yang dipilih harus memiliki indikator, yaitu: a) pengelompokan sektor ekonomi disuatu daerah kabupaten dan kota dalam provinsi menurut struktur pertumbuhannya dan kontribusinya yang tinggi. Pengelompokan akan dapat berubah sesuai dengan perkembangan laju pertumbuhan dan tingkat pendapatan perkapita daerah yang bersangkutan. Perubahan tersebut akan terjadi pada daerah-daerah yang kondisinya telah berada dekat dengan batas rata-rata dari tingkat pertumbuhan dan kontribusinya, b) merupakan kegiatan ekonomi daerah yang mempunyai keuntungan kompetitif untuk dikembangkan dalam rangka mendorong proses pembangunan di daerah, c) meningkatkan pertumbuhan PDRB, di suatu daerah (dapat dilihat dari laju pertumbuhan dan kontribusi sektor) d) sektor-sektor ekonomi memberikan keuntungan kompetitif tersendiri pada perekonomian daerah yang selanjutnya akan dapat pula mendorong pengembangan ekspor barang maupun jasa e) keterkaitan ekonomi antar sektor dalam proses pembangunan ekonomi daerah yang kuat karena dengan adanya keterkaitan tersebut akan dapat diwujudkan pembangunan ekonomi yang saling menunjang dan bersinergi satu sama lainnya. Keterkaitan dapat bersifat kedepan (*forward linkage*) ke jalur output, maupun keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) ke jalur input. Keterkaitan mewujudkan proses pembangunan yang efisien dan saling mendukung sehingga perekonomian daerah akan bertumbuh lebih cepat). Kegiatan usaha yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan agar dapat memperoleh hasil

optimal dengan memperhatikan kendala (*constrains*) tertentu. Dalam pengalokasian faktor-faktor produksi yang terbatas jumlahnya terhadap berbagai kemungkinan produksi didapatkan manfaat yang optimal.

Azis (1985) menetapkan suatu sektor ekonomi dianggap yang memiliki prioritas sebagai unggulan baik regional maupun internasional, yaitu:

- a. Sektor ekonomi daerah memiliki rata-rata kontribusi, laju pertumbuhan PDRB dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah terhadap suatu referensi (wilayah yang cakupannya lebih luas).
- b. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai nilai *Location Quotient* (LQ) dari 1 (satu). suatu indikator sederhana yang menunjukkan kekuatan atau besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain.
- c. LQ diatas 1 merupakan sektor kuat sehingga daerah yang bersangkutan secara potensial merupakan pengespor produk dari sektor tersebut ke daerah lain.
- d. Sektor-sektor ekonomi memiliki perkembangan pesat dan memiliki kemampuan kompetitif yang besar terhadap lingkup yang luas dan sektor-sektor yang memiliki keunggulan lokasional di suatu daerah.
- e. Memiliki struktur yang saling kait mengkait antar sektor ekonomi atau kegiatan ekonomi yang kuat terhadap sektor-sektor lain. Dilihat dari (*forward linkages* dan *backward linkages*) dan sektor ekonomi mempunyai multiplier atau dampak yang besar terhadap kegiatan perekonomian lain.
- f. Memiliki skala ekonomi yang besar dalam perekonomiannya, sehingga produktif untuk dikembangkan di suatu wilayah.
- g. Mempunyai kontribusi sektor yang besar terhadap kegiatan ekonomi pada kawasan tersebut.
- h. Menyerap tenaga kerja dalam jumlah relatif besar dalam meningkatkan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- i. Memiliki potensi pasar yang prospektif, baik itu pasar lokal, regional, maupun pasar internasional.

Suatu sektor ekonomi dianggap unggul di suatu wilayah menurut Widodo (2006) dapat didefinisikan seperti:

1. Memiliki kontribusi rata-rata dalam PDRB atau penyerapan tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi rata-rata sektor yang sama pada wilayah referensi (cakupan wilayah yang lebih luas) dan memiliki laju pertumbuhan PDRB atau penyerapan tenaga kerja rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama dari wilayah referensi.
2. Merupakan sektor yang tumbuh lebih pesat di dalam lingkup wilayah referensi dan memiliki tingkat pertumbuhan PDRB atau penyerapan tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama dalam lingkup wilayah referensi, dimana tingkat pertumbuhan sektor dalam lingkup wilayah referensi dilihat dari nilai *Proportional Shift* (PS), sedangkan keunggulan lokasional dilihat dari nilai *Differential Shift* (DS), dengan menggunakan variabel PDRB atau tenaga kerja.
3. Mempunyai tingkat keterkaitan ke depan (*Forward Linkage*) dan ke belakang yang tinggi (*Backward Linkage*), yang dinilai melalui Indeks Daya Menarik (IDM) dan Indeks Derajat Kepekaan (IDK). Sektor yang dikategorikan sebagai sektor ekonomi unggulan adalah sektor yang memiliki indeks derajat kepekaan dan indeks daya menarik lebih dari satu. Sektor ini mampu mendorong pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lain, baik sektor yang menyuplai *Input* maupun sektor yang memanfaatkan *Output* sektor ekonomi unggulan tersebut sebagai *input* dalam proses produksinya.
4. Sektor memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantages*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta mampu memberikan nilai manfaat yang besar.
5. Mempunyai daya saing dalam beberapa periode tahun terakhir dan kemungkinan prospek sektor ekonomi di masa yang akan datang dengan kriteria yang sama.
6. Memiliki kemampuan untuk meng ekspor hasil produksi ke wilayah lain atau memiliki kemampuan sebagai sektor basis (spesialisasi wilayah) dan merupakan sektor basis yang memiliki tingkat pertumbuhan PDRB atau penyerapan tenaga kerja sebanding atau lebih tinggi daripada laju pertumbuhan sektor yang sama di kabupaten/kota lain di wilayah referensi.
7. Memiliki keunggulan pangsa lebih besar dibandingkan wilayah yang lebih luas.
8. Memiliki prospek pemasaran relatif besar dan menunjukkan tingkat penyerapan tenaga kerja relatif besar.

Sektor yang mempunyai derajat kepekaan tinggi memberi indikasi bahwa sektor

tersebut mempunyai keterkaitan kedepan atau mempunyai daya dorong yang cukup kuat dibandingkan dengan sektor lain. Sebaliknya sektor yang mempunyai daya penyebaran tinggi berarti bahwa sektor tersebut mempunyai ketergantungan terhadap sektor lain. Adapun indeks daya penyebaran memberikan indikasi bahwa sektor-sektor yang mempunyai daya penyebaran lebih besar dari satu berarti daya penyebaran sektor tersebut berada di atas rata-rata daya penyebaran secara keseluruhan. Pengertian yang sama juga berlaku untuk indeks derajat kepekaan, dimana sektor yang mempunyai indeks derajat kepekaan lebih dari satu berarti derajat kepekaan sektor tersebut di atas derajat kepekaan rata-rata seluruh sektor.

Keterkaitan kedepan (*forward linkage*) dari sektor-sektor ekonomi Provinsi Papua Barat, diperoleh 10 sektor yang mempunyai indeks derajat kepekaan (IDK) tertinggi seperti pada diagram 2 yaitu sektor ikan, industri barang kayu dan hasil hutan, perdagangan besar dan eceran, listrik, gas dan air bersih, pertambangan dan penggalian perkebunan, konstruksi, infokom, keuangan dan padi.

Dengan indeks derajat kepekaan lebih besar dari satu maka sektor-sektor tersebut mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk mendorong peningkatan output sektor-sektor lainnya yang berada di hilir sektor itu. Apabila terjadi peningkatan *final demand* pada sektor tersebut maka *output* sektor secara keseluruhan di Provinsi Papua Barat melalui proses kait-mengait akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Besaran daya penyebaran (DP) diperoleh 10 sektor yang mempunyai Indeks Daya Penyebaran (IDP) tertinggi seperti pada diagram 2 yakni pergudangan, jasa penunjang angkutan, pos dan kurir, industri barang kayu dan hasil hutan, penyediaan akomodasi, industri hasil pengolahan ikan produk perikanan lain, penyedia makan minum, industri pengolahan migas, industri lainnya, industri makanan lain, minuman dan tembakau, konstruksi dan industri semen dan barang galian bukan logam. sektor pergudangan, jasa penunjang angkutan, pos dan kurir dengan DP 1,923 satuan artinya setiap kenaikan satu unit *output* sektor tersebut sebagai akibat dari meningkatnya permintaan akhir terhadap sektor itu, maka akan menaikkan output secara keseluruhan sebesar 1,923 satuan. Demikian seterusnya penjelasan untuk sektor-sektor lain.

Berdasarkan penjelasan mengenai kriteria unggulan maka dapat dirumuskan beberapa kriteria yang dapat digunakan yakni :

1. Sektor unggulan harus mampu menjadi penggerak utama (*prime mover*) pembangunan perekonomian. Artinya, sektor unggulan memiliki kontribusi rata-rata dalam PDRB atau penyerapan tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan dengan

kontribusi rata-rata sektor yang sama pada wilayah referensi (cakupan wilayah yang lebih luas) dan memiliki laju pertumbuhan PDRB atau penyerapan tenaga kerja rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama wilayah referensi. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah terhadap suatu referensi.

2. Sektor ekonomi sebagai sektor basis dan merupakan kegiatan ekonomi daerah yang mempunyai keuntungan kompetitif untuk dikembangkan dalam rangka mendorong proses pembangunan di daerah, serta memiliki potensi untuk mengeksport hasil produksi ke wilayah lain atau merupakan sektor basis yang memiliki tingkat pertumbuhan PDRB atau penyerapan tenaga kerja sebanding atau lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan sektor yang sama di kabupaten/kota lain di wilayah referensi. Bahwa sektor tersebut mempunyai permintaan yang tinggi, baik pasar lokal ataupun pasar ekspor.
3. Sektor unggulan mampu bersaing (*competitiveness*) dengan sektor sejenis dari wilayah lain baik regional ataupun internasional serta merupakan sektor yang tumbuh lebih pesat di dalam lingkup wilayah referensi dan memiliki tingkat pertumbuhan PDRB atau penyerapan tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama dalam lingkup wilayah referensi, dimana tingkat pertumbuhan sektor dalam lingkup wilayah referensi dilihat dari nilai *Proportional Shift* (PS), sedangkan keunggulan lokasional dilihat dari nilai *Differential Shift* (DS), dengan menggunakan variabel PDRB atau tenaga kerja. Sehingga akan dapat pula mendorong pengembangan ekspor barang maupun jasa.
4. Mempunyai tingkat keterkaitan ke depan (*Forward Linkage*) dan ke belakang yang tinggi (*Backward Linkage*), yang dinilai melalui indeks daya menarik (IDM) dan indeks derajat kepekaan (IDK), Sektor yang dikategorikan sebagai sektor ekonomi unggulan adalah sektor yang memiliki indeks derajat kepekaan dan indeks daya menarik lebih dari satu, Sektor ini mampu mendorong pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya. Serta sektor ekonomi mempunyai *multiplier effect* yang besar terhadap kegiatan perekonomian lain dan pengembangan kawasan sekitarnya. Keterkaitan mewujudkan proses pembangunannya yang efisien dan saling mendukung sehingga perekonomian daerah akan bertumbuh lebih cepat.
5. Kegiatan usaha dapat menyelesaikan suatu permasalahan agar dapat hasil optimal dengan memperhatikan kendala (*constrains*) tertentu. Dalam pengalokasian faktor-faktor produksi yang terbatas jumlahnya terhadap berbagai kemungkinan produksi sehingga didapatkan manfaat yang optimal.

Istilah *comparative advantage* (keunggulan komparatif) mula-mula dikemukakan oleh David Ricardo (1917) sewaktu membahas perdagangan antara dua negara. Dalam teori tersebut, Ricardo membuktikan bahwa apabila ada dua negara yang saling berdagang dan masing-masing negara mengkonsentrasikan diri untuk mengeksport barang yang bagi negara tersebut memiliki keunggulan komparatif maka kedua negara tersebut akan beruntung. Ternyata ide tersebut bukan saja bermanfaat dalam perdagangan internasional tetapi juga sangat penting diperhatikan dalam ekonomi regional (Robinson, 2005).

Keunggulan komparatif suatu komoditi bagi suatu negara atau daerah adalah bahwa komoditi itu lebih unggul secara relatif dengan komoditi lain di daerahnya. Pengertian unggul dalam hal ini adalah dalam bentuk perbandingan dan bukan dalam bentuk nilai tambah riil. Apabila keunggulan itu adalah dalam bentuk nilai tambah riil maka dinamakan keunggulan absolut. Komoditi yang memiliki keunggulan walaupun hanya dalam bentuk perbandingan, lebih menguntungkan untuk dikembangkan dibanding dengan komoditi lain yang sama-sama diproduksi oleh kedua negara atau daerah (Robinson, 2005:80).

Pada saat ini istilah lebih sering dipakai adalah *competitive advantage* (keunggulan kompetitif). Keunggulan kompetitif menganalisis kemampuan suatu daerah untuk memasarkan produknya di luar daerah/luar negeri/pasar global. Istilah keunggulan kompetitif lebih mudah dimengerti, yaitu cukup melihat apakah produk yang kita hasilkan dapat dijual di pasar global secara menguntungkan. Jadi, kita tidak membandingkan potensi komoditi yang sama di suatu negara dengan negara lain, melainkan membandingkan potensi komoditi suatu negara terhadap komoditi semua negara pesaing di pasar global. Manfaat analisis keunggulan kompetitif bagi suatu wilayah adalah terbatas karena tidak banyak komoditi yang memenuhi persyaratan tersebut. kemampuan memasarkan barang di pasar global sangat terkait dengan tingkat harga yang sedang berlaku, dan di sisi lain harga di pasar global selalu berfluktuasi. Dengan demikian, analisis keunggulan kompetitif menjadi tidak langgeng tetapi berdasarkan tingkat harga yang sedang berlaku.

Analisis keunggulan komparatif tidak terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi harga karena menggunakan metode perbandingan. Karena semua pihak terkena fluktuasi harga yang sama maka angka perbandingan tidak berbeda jauh dalam berbagai tingkat harga. Banyak komoditi yang hanya diproduksi untuk kebutuhan lokal atau ada yang dipasarkan ke wilayah tetangga tetapi pada saat ini belum mampu untuk masuk ke pasar global. Sebaliknya, analisis keunggulan komparatif tetap dapat digunakan untuk melihat apakah komoditi itu memiliki prospek untuk dikembangkan walaupun

saat ini belum mampu memasuki pasar global. Setidaknya kita mengetahui bahwa dalam rangka perbandingan dengan rata-rata nasional, wilayah kita berada di atas atau di bawah rata-rata nasional. Keunggulan komparatif dapat dijadikan pertanda awal bahwa komoditi itu punya prospek untuk memiliki keunggulan kompetitif atau setidaknya komoditas itu layak untuk dikembangkan baik untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun untuk pasar tetangga (Robinson, 2005).

Dari sisi konsep dasar Tipologi Klassen, pemerintah daerah perlu membuat prioritas kebijakan agar pembangunan daerah dapat berjalan sesuai rencana. Terkait dengan kebijakan anggaran, penentuan prioritas kebijakan tentang pengeluaran daerah merupakan hal yang penting. Penentuan prioritas kebijakan tersebut dapat diwujudkan salah satunya dengan menentukan sektor-sektor prioritas atau unggulan. Lebih jauh, penentuan prioritas tidak hanya dilakukan pada tingkat sektoral saja, tetapi juga pada tingkat subsektor, usaha, bahkan tingkat komoditi yang layak untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada. Untuk menentukan sektor, subsektor, usaha, atau komoditi prioritas tersebut dapat digunakan beberapa alat analisis.

2.2. KONSEP KEUANGAN DAERAH

Pengertian keuangan daerah, sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah.

Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya kedalam APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dalam konteks ini lebih difokuskan kepada pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD.

Pengawasan merupakan suatu rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Pengawasan dilakukan untuk menjamin semua kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan keuangan daerah dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah/APBD. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lain, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Berdasarkan dari Undang-Undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD wujudnya adalah dengan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis.

Pengawasan anggaran meliputi seluruh siklus anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. Secara sederhana pengawasan anggaran merupakan proses pengawasan terhadap kesesuaian perencanaan anggaran dan pelaksanaannya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan perlu dilakukan, hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada prioritas publik. Namun sebelum sampai pada tahap pelaksanaan, anggota dewan harus mempunyai bekal pengetahuan mengenai anggaran sehingga nanti ketika melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, anggota dewan telah dapat mendeteksi apakah ada terjadi kebocoran atau penyimpangan alokasi anggaran.

Manajemen keuangan daerah merupakan bagian dari manajemen pemerintah daerah, selain manajemen kepegawaian dan manajemen teknis dari tiap-tiap instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik, atau kita sebut dengan manajemen pelayanan publik dan manajemen pembangunan daerah. Pengertian Manajemen keuangan daerah menurut Akbar (2002) adalah mencari sumber-sumber pembiayaan dana daerah melalui potensi dan kapabilitas yang terstruktur melalui tahapan perencanaan yang sistematis, penggunaan dana yang efisien dan efektif serta pelaporan tepat waktu.

Manajemen pelayanan publik yang dimaksud adalah pencerminan pemberian kewenangan wajib atas otonomi daerah dari pemerintah pusat yang terdiri dari antara lain: pemerintahan umum, pertanian; perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi; kehutanan dan perkebunan; perindustrian dan perdagangan; perkoperasian; penanaman modal; ketenagakerjaan; kesehatan; pendidikan dan kebudayaan; sosial; penataruan; pemukiman; pekerjaan umum; perhubungan; lingkungan hidup; kependudukan; olahraga; keparawisataan; dan pertanahan. Hal ini, biasanya tercermin dengan adanya dinas-dinas daerah dan struktur organisasi Pemda yang berkaitan dengan luas dan ruang lingkup tugas tersebut. Pengertian keuangan daerah menurut Bahrullah Akbar (2002) adalah "Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD)".

Pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD yaitu; suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dari definisi keuangan daerah tersebut melekat 4 (empat) dimensi: (1) ada dimensi hak dan kewajiban; (2) ada dimensi tujuan dan perencanaan; (3) ada dimensi penyelenggaraan dan pelayanan publik; dan (4) ada dimensi nilai uang dan barang (investasi dan inventarisasi).

Keterkaitan keuangan daerah yang melekat dengan APBD merupakan pernyataan bahwa adanya hubungan antara dana daerah dan dana pusat atau dikenal dengan istilah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana tersebut terdiri dari dana dekonsentrasi (PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan) dan dana desentralisasi. Dana dekonsentrasi berbentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sedangkan yang dimaksud dana desentralisasi adalah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD).

Tujuan keuangan daerah:

1. Akuntabilitas (*Accountability*), Pemda harus mempertanggungjawabkan tugas keuangan kepada lembaga atau orang yang berkepentingan dan sah. Lembaga atau orang yang dimaksud antara lain, adalah pemerintah pusat, DPRD, kepala daerah, masyarakat dan kelompok kepentingan lainnya;

2. Memenuhi kewajiban keuangan, dimana keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
3. Kejujuran, urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai profesional dan jujur, sehingga mengurangi kesempatan untuk berbuat curang.
4. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*) kegiatan daerah, menyangkut tata cara pengurusan keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan setiap program direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan biaya serendah-rendahnya dengan hasil yang maksimal.
5. Pengendalian, manajer keuangan daerah, DPRD dan aparat fungsional pemeriksaan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan dapat tercapai. Harus selalu memantau melalui akses informasi mengenai pertanggungjawaban keuangan.

Fungsi manajemen terbagi atas tiga tahapan utama, yaitu: ada proses perencanaan, ada tahapan pelaksanaan, dan ada tahapan pengendalian/pengawasan. Oleh karena itu fungsi manajemen keuangan daerah terdiri dari unsur-unsur pelaksanaan tugas yang dapat terdiri dari tugas: 1) Pengalokasian potensi sumber-sumber ekonomi daerah; 2) Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 3) Tolak ukur kinerja dan standarisasi; 4) Pelaksanaan Anggaran yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi; 5) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah; dan 6) Pengendalian dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Angka 1 dan 2 merupakan bagian dari fungsi perencanaan dimana melekat pengertian ada partisipasi publik; Angka 3 dan 4 merupakan fungsi pelaksanaan dan Angka 5 dan 6 merupakan fungsi pengendalian dan pengawasan. Keseluruhannya akan bermuara pada terciptanya sistem informasi keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Dalam arti sempit manajemen keuangan daerah merupakan tugas kebendaharawan, dari peran kas daerah atau bendahara umum daerah sampai dengan peran bendaharawan proyek, bendaharawan penerima, bendaharawan barang. Secara garis besar, ada dua hal tugas pokok atau bidang yang harus disadari bagi seorang manajer keuangan daerah, yaitu: pekerjaan penganggaran dan pekerjaan akuntansi, dimana dalam pelaksanaan dua tugas tersebut berinteraksi dan saling melengkapi terutama dalam rangka pengendalian dan pengawasan manajemen (Bidang Auditing).

Secara garis besar, manajemen (manajemen) keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan *budgeting reform* atau reformasi anggaran.

Aspek utama *budgeting reform* adalah perubahan dari *traditional budget ke performance budget*. *Traditional budget* merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu: (a) cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan *incrementalism* dan (b) struktur dan susunan anggaran yang bersifat *line-item*. Ciri lain yang melekat pada pendekatan anggaran tradisional tersebut adalah: (c) cenderung sentralistik; (d) bersifat spesifikasi; (e) tahunan; dan (f) menggunakan prinsip anggaran bruto. Struktur anggaran tradisional dengan ciri-ciri tersebut tidak mampu mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan, dan bahkan anggaran tradisional tersebut gagal dalam memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan. Oleh karena tidak tersedianya berbagai informasi tersebut, maka satu-satunya tolak ukur yang dapat digunakan untuk tujuan pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan penggunaan anggaran.

Masalah utama anggaran tradisional adalah terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep *value for money*. Konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas seringkali tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep *value for money* ini, seringkali pada akhir tahun anggaran terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan.

Era reformasi memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Dikeluarkannya kedua UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan implikasi yang sangat mendasar yang mengarah pada perlu dilakukannya reformasi sektor publik dan dipakainya paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga cita-cita reformasi yaitu menciptakan *good governance* benar-benar tercapai.

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang selama ini tergantung pada pemberian dana dari pemerintah pusat harus bersiap-siap melakukan strategi pada keuangan daerah dan anggaran daerah. Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah, sedangkan anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun).

Hubungan antara keuangan dan anggaran daerah sangat erat, karena sama-sama merupakan hal terpenting dalam pemutusan suatu instrumen kebijakan. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal ini ditinjau bukan hanya dilihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga dapat terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah.

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitan dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Peningkatan PAD tidak hanya menjadi perhatian pihak eksekutif, namun legislatif pun berkepentingan sebab besar kecilnya PAD akan mempengaruhi struktur gaji anggota dewan.

Meskipun pelaksanaan otonomi daerah sudah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001, namun hingga tahun 2009 baru sedikit pemerintah daerah yang mengalami peningkatan kemandirian keuangan daerah secara signifikan. Memang berdasarkan data yang dikeluarkan Departemen Keuangan, secara umum penerimaan PAD pada era otonomi daerah mengalami peningkatan yang cukup berarti dibandingkan dengan era sebelumnya.

Dalam rangka mengoptimalkan PAD, sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber keuangan yang paling diandalkan. Sektor pajak daerah tersebut meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan

jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. Retribusi Daerah terdiri : retribusi jasa umum antara lain pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan, jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya.

Salah satu problema yang dihadapi oleh sebagian daerah kabupaten/kota di Indonesia dewasa ini adalah pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Problema ini muncul karena adanya kecenderungan berpikir dari sebagian kalangan birokrat di daerah yang menganggap bahwa parameter utama yang menentukan kemandirian suatu daerah di era otonomi adalah terletak pada besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realitas mengenai rendahnya PAD di sejumlah daerah pada masa lalu, akhirnya mengkondisikan daerah untuk tidak berdaya dan selalu bergantung pada bantuan pembiayaan atau subsidi dana dari pemerintah pusat.

Menurut Mardiasmo (2009) Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan. Selanjutnya efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

03

ANALISIS EKONOMI REGIONAL

3.1. HARMONISASI RPJM DAERAH TERHADAP RPJM NASIONAL

Harmonisasi antara RPJM Nasional, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditujukan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah (pasal 2 UU No. 25 Tahun 2004).

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 juga disebutkan bahwa RPJM Nasional berfungsi sebagai bahan penyusunan dan perbaikan RPJM Daerah (pasal 17 PP No. 40 Tahun 2006). Meskipun sudah banyak peraturan yang menjelaskan perihal keharusan adanya keterpaduan dan sinkronisasi antara RPJM Nasional dan RPJM Daerah, masih banyak ditemukan ketidak-sinkronan dan ketidak-sinergian antara tujuan dan sasaran RPJM Daerah terhadap Sasaran Pokok Pembangunan Nasional.

Ekonomi Papua Barat berkembang sesuai dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi antara lain kandungan mineral, tanah yang subur, serta tenaga kerja yang ada yang mampu menghasilkan berbagai macam produk. Sumberdaya ekonomi lain adalah modal (*capital*). Ketiga sumberdaya ekonomi tersebut dikenal juga sebagai faktor produksi. Faktor produksi tenaga kerja mampu merubah bahan baku menjadi bahan lain yang bernilai lebih tinggi atau mampu memberi nilai tambah (*value added*).

Total seluruh nilai tambah yang terbentuk disebut produk domestik bruto yang di tingkat daerah dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dinilai berdasarkan dua harga, harga berlaku saat ini dan harga pada tahun dasar (konstan).

PDRB atas dasar harga konstan sesungguhnya adalah PDRB atas dasar harga berlaku yang dihilangkan pengaruh dari perubahan harga sehingga perubahan PDRB yang terbentuk antara dua waktu menunjukkan pertambahan nilai volume barang dan jasa bukan karena perubahan nilai yang disebabkan perubahan harga.

3.1.1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi Papua Barat mencapai 6.24% hingga akhir Tahun 2018, dan telah memenuhi target RKP Kewilayahan periode yang sama yaitu 6 persen. Namun nilai ini belum dapat memenuhi target RKPD Papua Barat Tahun 2018 (Tabel 3.1). Pada periode 2015 – 2018, pertumbuhan ekonomi Papua Barat mengalami pertumbuhan positif seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun sempat mengalami perlambatan pertumbuhan pada Tahun 2017 (4.10%), yang disebabkan penurunan kontribusi lapangan usaha Sektor Industri Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (LNG Tangguh).

Tabel 3.1.

Target dan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi di Papua Barat Tahun 2015 – 2018

Indikator	Target 2018		Pencapaian				Notifikasi
	RKP Wilayah	RKPD	2015	2016	2017	2018	
Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat (%)	6	7.3	4.15	4.52	4.01	6.24	Tidak memenuhi target Daerah

Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%)	4.88	5.03	5.07	5.17
--	------	------	------	------

Sumber: BPS dalam Database PEPPD Bappenas, 2019; RKPD Papua Barat 2018

Pertumbuhan ekonomi Papua Barat empat tahun terakhir (Tahun 2015 – 2018) menunjukkan trend positif dan meningkat, dikarenakan peran LNG Tangguh melalui kontribusi lapangan usaha Sektor Industri Pengolahan (Tabel 3.2). Oleh karenanya, saat LNG Tangguh mengalami kontraksi seperti yang terjadi pada Tahun 2017, maka dipastikan pertumbuhan ekonomi Papua Barat ikut terkoreksi. Selanjutnya, jika diikuti pencapaian pertumbuhan ekonomi Papua Barat hingga akhir Tahun 2018, belum dapat memenuhi target pertumbuhan ekonomi dalam RKPD Papua Barat Tahun 2018.

Satu-satunya lapangan usaha yang teridentifikasi mengalami pertumbuhan negatif periode berjalan yaitu lapangan usaha sektor industri pengolahan pada Tahun 2016 (-2.60%). Selanjutnya, kelompok lapangan usaha di Papua Barat yang menunjukkan pencapaian pertumbuhan tertinggi yaitu pengadaan listrik dan gas serta penyediaan akomodasi dan makan minum, dengan rerata pertumbuhan yang sama yaitu sebesar 17.86 persen per tahun.

Tabel 3.2.

Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015
s.d 2018 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun				Rerata
	2015	2016	2017	2018	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.95	6.71	7.64	6.09	7.35
Pertambangan dan Penggalian	1.42	4.02	1.19	11.00	4.41
Industri Pengolahan	2.92	-2.60	5.81	14.57	5.18
Pengadaan Listrik dan Gas	30.03	10.44	18.16	12.82	17.86

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.11	6.41	7.90	6.90	8.08
Konstruksi	17.54	12.96	13.32	9.17	13.25
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.76	13.46	12.85	12.94	13.50
Transportasi dan Pergudangan	17.28	11.65	10.50	12.63	13.02
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	30.03	10.44	18.16	12.82	17.86
Informasi dan Komunikasi	9.36	12.87	11.85	10.41	11.12
Jasa Keuangan dan Asuransi	13.76	5.11	7.58	6.79	8.31
Real Estate	12.98	12.06	11.89	11.55	12.12
Jasa Perusahaan	11.66	10.73	10.61	9.84	10.71
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	16.82	14.71	10.12	9.99	12.91
Jasa Pendidikan	8.34	6.44	9.51	5.69	7.50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.54	12.54	9.97	9.23	10.82
Jasa lainnya	13.66	11.28	10.38	10.57	11.47

Sumber: BPS dalam Database PEPPD Bappenas, 2019

Dari sisi pengeluaran perubahan inventori memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi yang mencapai 62,97 persen, sedangkan *net eksport* memiliki pertumbuhan yang negatif (Tabel3.3).

Tabel 3.3.

Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat dari Sisi Pengeluaran Tahun 2015 s.d 2018 (Persen)

Komponen Penggunaan/ Pengeluaran	Tahun				Rerata
	2015	2016	2017	2018	
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)	5.65	6.70	6.65	5.17	6.04
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-1.51	4.95	7.26	7.73	4.60
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	4.36	3.93	0.31	0.84	2.36
Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	10.95	4.63	2.68	3.54	5.45
Perubahan Inventori	170.20	100.73	59.41	-78.48	62.97
Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	16.34	-15.27	-6.81	37.20	7.87
Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	-15.37	123.95	-46.62	50.16	28.03
Net Ekspor Antar Daerah	-78.69	33.91	11.83	-57.36	-22.58
PDRB	4.15	4.52	4.01	6.24	4.73

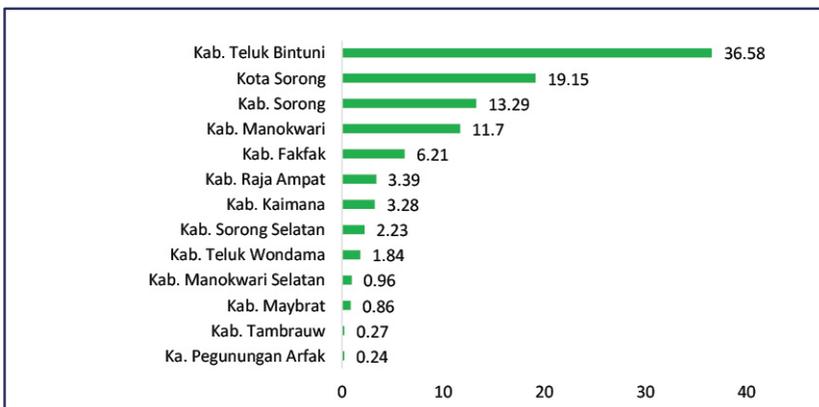
Sumber: BPS dalam Database PEPPD Bappenas, 2019; BI Perwakilan Papua Barat, 2019

Berdasarkan aspek kewilayahan, hingga Tahun 2018 terdapat 2 (dua) kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Papua Barat, yaitu Kabupaten Teluk Bintuni (36.58%) dan Kota Sorong (19.15%) (Gambar 3.1). Besaran kontribusi dari kedua kabupaten diperoleh dari Sektor Industri Pengolahan melalui aktivitas komoditas minyak dan gas dan sektor jasa. Kabupaten Teluk Bintuni terdapat Perusahaan Tangguh LNG (Liquefied Natural Gas), sebagai perusahaan pertambangan yang memproduksi minyak dan gas, dan merupakan suatu pengembangan unitisasi

dari enam lapangan gas terutinisasi yang terletak di wilayah Kontrak Kerja Sama (SKK) Wiriagar, Berau, dan Muturi di Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat. Kabupaten Sorong, industri pertambangan minyak dikelola oleh Pertamina melalui pembangunan “Kilang BBM Kasim” yang dibangun diatas areal seluas kurang lebih 80 Ha, yang terletak di Kampung Malabam Distrik Seget Kabupaten Sorong Papua Barat. Kilang ini mampu mengelola crude lokal di daerah Kepala Burung (Kabupaten Sorong) dengan kapasitas produksi 10.000 barel per hari.

Gambar 3.1.

Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB Papua Barat Tahun 2018 (Persen)



Sumber: diolah dari BPS Perwakilan Papua Barat Tahun 2018

3.1.2. DISTRIBUSI PDRB LAPANGAN USAHA

Distribusi persentase sektoral berdasarkan lapangan usaha digunakan sebagai indikator untuk memberikan gambaran struktur ekonomi Papua Barat. Distribusi persentase PDRB sektoral dapat menunjukkan peranan sektor dalam memberikan sumbangan terhadap PDRB secara keseluruhan. Oleh karenanya, semakin besar persentase suatu sektor maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah.

Periode 2015 – 2018, terdapat lima kelompok lapangan usaha yang mendominasi dan memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian di Papua Barat. Kelima sektor dimaksud yaitu Industri Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (26.96% per tahun), Pertambangan dan Penggalian (18.64% per tahun), Konstruksi (14.96% per

tahun), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (10.80% per tahun), dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10.40% (Tabel 3.4).

Selama kurun waktu empat tahun terakhir, jelas terlihat bahwa terjadi dinamika pada perekonomian Papua Barat dikarenakan kontribusi dari Industri Pengolahan Minyak dan Gas Bumi yang sempat menunjukkan distribusi yang semakin menurun (28.72% menjadi 25.93%) terhadap PDRB Papua Barat terhitung Tahun 2015 – 2017. Pasca Tahun 2017, peran Industri Pengolahan semakin membaik dan memberikan tambahan kontribusi sehingga pertumbuhan ekonomi Papua Barat meningkat dari 4.01 persen (Tahun 2017) menjadi 6.24 persen di Tahun 2018.

Tabel 3.4.

Distribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Papua Barat Tahun 2015 s.d 2018 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun				Rerata
	2015	2016	2017	2018	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.87	10.95	10.94	10.46	10.80
Pertambangan dan Penggalian	19.49	19.13	17.97	17.98	18.64
Industri Pengolahan	28.72	26.40	25.93	26.78	26.96
Pengadaan Listrik dan Gas	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10
Konstruksi	13.94	14.87	15.64	15.39	14.96
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.14	6.58	6.89	7.01	6.65
Transportasi dan Pergudangan	2.65	2.83	2.96	2.98	2.85
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.59	0.62	0.64	0.64	0.62
Informasi dan Komunikasi	1.48	1.58	1.64	1.63	1.58
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.59	1.57	1.57	1.51	1.56

Real Estate	1.16	1.23	1.28	1.29	1.24
Jasa Perusahaan	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.71	10.51	10.74	10.65	10.40
Jasa Pendidikan	2.39	2.40	2.44	2.33	2.39
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.74	0.79	0.80	0.79	0.78
Jasa lainnya	0.27	0.29	0.29	0.29	0.29

Sumber: BPS dalam Database PEPPD Bappenas, 2019

Dari sisi penggunaan (*expenditure*), tercatat komponen Ekspor Luar Negeri Papua Barat hingga Tahun 2018 memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Papua Barat dengan rerata sumbangan sebesar 44.79 persen per tahun. Komoditi bahan bakar mineral menjadi penyumbang terbesar nilai ekspor Papua Barat dengan negara tujuan China, Jepang, dan Korea. Selain Ekspor Luar Negeri, komponen Konsumsi Rumah Tangga menempati urutan kedua yang memberikan sumbangan terbesar terhadap perekonomian Papua Barat dengan besaran sumbangan rerata 27.75 persen per tahun. Selanjutnya, komponen pengeluaran untuk aktivitas Net Ekspor Antar Daerah, tercatat empat tahun belakangan ini menunjukkan nilai minus, yang berarti bahwa nilai impor barang dan jasa dari luar Papua Barat jauh lebih tinggi. Melambatnya kinerja ekspor di Papua Barat utamanya kinerja ekspor luar negeri diperkirakan seiring masih berlangsungnya *maintanance* train pada Tangguh LNG, yang kemudian berdampak terhadap lambatnya produksi dan mempengaruhi penjualan ekspor. Selain itu, neraca impor di Papua Barat diperkirakan masih tetap kuat seiring kebutuhan impor barang modal untuk kebutuhan pembangunan di Papua Barat.

Empat komponen pengeluaran dalam perekonomian Papua Barat yang memiliki pertumbuhan positif terhitung Tahun 2015 – 2018 (Tabel 3.5).

Tabel 3.5.

Distribusi Pengeluaran Terhadap PDRB Papua Barat Tahun 2015 - 2018 (Persen)

Komponen Penggunaan/ Pengeluaran	Tahun				Rerata
	2015	2016	2017	2018	
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)	26.35	27.84	28.53	28.27	27.75
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0.93	0.98	0.99	0.98	0.97
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	20.64	21.59	20.75	20.01	20.75
Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	20.86	21.00	20.89	20.39	20.78
Perubahan Inventori	2.10	4.27	5.48	1.06	3.23
Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	57.93	35.05	36.62	49.55	44.79
Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	1.17	2.32	1.20	1.68	1.59
Net Ekspor Antar Daerah	-27.64	-8.41	-12.07	-18.57	-16.67
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS dalam Database PEPPD Bappenas, 2019; BI Perwakilan Papua Barat, 2019

Keempat komponen pengeluaran yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, dan PDRB. Pada periode yang sama, pengeluaran untuk komponen perubahan inventori tercatat memiliki rerata pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 62.97 persen, dan terendah yaitu pada komponen pengeluaran Net Ekspor Antar Daerah (-22.58%). Dari sisi pengeluaran, meningkatnya konsumsi rumah tangga dikarenakan seiring dengan kenaikan konsumsi akibat tingginya daya beli, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), serta gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Pola yang sama juga terjadi pada konsumsi LNPRT seiring proses berlangsungnya pemilu eksekutif untuk beberapa wilayah secara serempak sejak Tahun 2017 s.d Tahun 2019.

TARGET pemerintah daerah Papua Barat menjaga dan memastikan aktivitas perekonomian di daerah tetap berjalan, dan memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat di Papua Barat terlaksana sesuai target pemerintah daerah. Keadaan ini tercermin melalui pertumbuhan ekonomi daerah selama empat tahun terakhir yang tumbuh positif dengan tren meningkat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Papua Barat hingga akhir Tahun 2018 belum dapat mencapai target RKPD 2018. Keadaan ini dikarenakan:

1. Perekonomian di Papua Barat didominasi oleh beberapa lapangan usaha strategis seperti Industri Pengolahan melalui aktivitas Minyak dan Gas Bumi (26.96%), Pertambangan dan Penggalian (18.64%), dan Konstruksi (14.96%), dimana kontribusi dari ketiga lapangan usaha tersebut sudah mencapai 60.56 persen. Sisahnya 39.44 persen bersumber dari sektor pertanian dan lain-lain. Ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor industri pengolahan minyak dan gas bumi serta sektor pertambangan dan penggalian, sangat dipengaruhi *demand* dan *supply* di pasar minyak dunia. Ketergantungan ekonomi daerah terhadap kedua sektor ini menjadi ancaman keterbatasan sumberdaya tersebut di masa yang datang.
2. Belum ada upaya maksimal yang dilakukan oleh daerah untuk mendorong sektor industri pengolahan yang berbasis pertanian sesuai dengan konteks lokal.
3. Secara spasial, masih terjadi ketimpangan dari aspek ekonomi utamanya distribusi PDRB Kabupaten/Kota di Papua Barat terhadap PDRB Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan evaluasi sub bahasan ekonomi, maka upaya yang dapat dilakukan oleh daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah agar dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam RKPD Papua Barat yaitu,

1. Pemerintah daerah perlu menyusun rencana strategis untuk mengembangkan sektor industri berbasis pertanian, mengingat sebagian besar masyarakat di Papua Barat memiliki mata pencaharian pada sektor pertanian.
2. Pemerintah daerah harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif agar perekonomian rakyat dapat tumbuh dan berkembang, untuk meminimalisir risiko keterbatasan sumber daya dimasa yang datang, sehingga dapat mendukung perekonomian secara makro di Papua Barat. Mekanismenya dapat dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat, dan dapat diamati melalui tiga aspek yaitu (a) penciptaan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi ekonomi rakyat

berkembang; (b) memperkuat potensi ekonomi rakyat atau daya yang dimiliki masyarakat; dan (c) mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang.

3. Peran Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk menggerakkan sektor potensial sebagai penggerak ekonomi daerah. Sektor potensial dimaksud disini yaitu sektor non migas seperti halnya subsektor pertanian yaitu perkebunan pala yang telah dibudidayakan dan dikembangkan di Kabupaten Fakfak, dan sektor tanaman pangan dan hortikultura yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Pegunungan Arfak, serta pengembangan perkebunan sagu dan pisang di wilayah Sorong Raya (Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Maybrat).
4. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Papua Barat, terdapat 3 (tiga) Wilayah Pembangunan (WP). WP I terdiri dari Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. WP II meliputi Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Raja Ampat, dan Kota Sorong. Sedangkan WP III, yaitu Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna mengurangi ketimpangan distribusi PDRB antar WP yaitu dengan meningkatkan kerjasama intra maupun antar Wilayah Pembangunan, sehingga terjadi peningkatan ekonomi yang berimbang antar WP dengan memperhatikan spesialisasi wilayah. Sebagai contoh, sektor pertanian dan industri pengolahan di Papua Barat memiliki keterkaitan kedepan yang cukup besar, dan ini mengindikasikan terjadi potensi pengembangan industri pengolahan hasil pertanian di masing-masing WP. Oleh karenanya, peluang kerjasama antar WP dapat dilakukan melalui mekanisme pembangunan kerja sama antar WP di Papua Barat.

3.1.3. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Papua Barat Tahun 2015 – 2018 mengalami penurunan dari 8.08 persen (33.409 orang) menjadi 6.3 persen (28.100 orang), meskipun persentase menurunnya terbilang lambat dan belum memenuhi target dalam RKPD Papua Barat tahun 2018, namun pencapaian tersebut telah melampaui target dalam RKP 2018.

Walaupun upaya pemerintah daerah menciptakan lapangan kerja melalui sektor informal memenuhi target karena dapat menurunkan jumlah pengangguran di Papua

Barat, namun tercatat bahwa upaya tersebut belum efektif memberikan pencapaian target penurunan TPT Papua Barat sesuai dengan target dalam RKPd Papua Barat.

Tabel 3.6.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Papua Barat Tahun 2015 s.d 2018

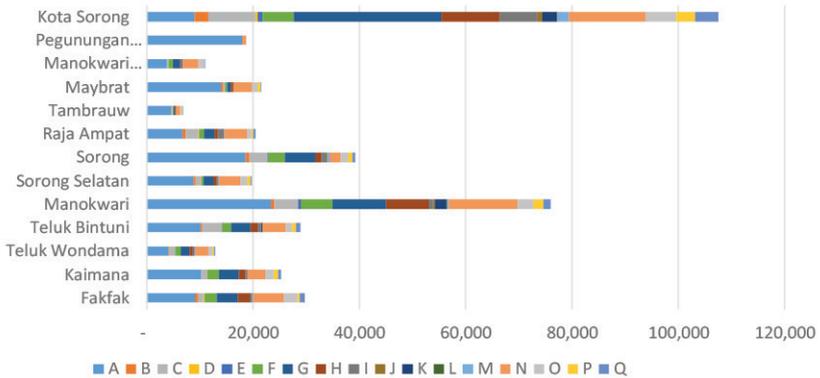
Indikator	Target 2018		Pencapaian				Notifikasi
	RKP Wilayah	RKPD	2015	2016	2017	2018	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8	5.81	8.08	7.46	6.49	6.3	Memenuhi target Nasional
Jumlah Pengangguran (ribu orang)		28.100	33.409	32.457	27.952	28.100	Memenuhi target Daerah

Sumber: BPS dalam Database PEPPD Bappenas, 2019.

Hingga akhir Tahun 2018, sektor informal khususnya Real Estate dan Konstruksi merupakan dua lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja di Papua Barat. Data yang tersaji pada Tabel 3.6 menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah menurunkan TPT di Papua Barat, memiliki hubungan yang linear dengan perkembangan jumlah pengangguran di Papua Barat. Upaya pemerintah daerah menurunkan TPT di Papua Barat yaitu dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penciptaan dan perluasan lapangan kerja khususnya pada sektor pertanian dan subsektor pertanian seperti perkebunan, kelautan dan perikanan. Tercatat bahwa, TPT Papua Barat Tahun 2019 yaitu sebesar 6.42 persen didominasi oleh laki-laki sebanyak 69.75 persen dan sisanya perempuan sebanyak 30.25 dan termasuk dalam kategori pengangguran terdidik dan pengangguran usia muda (BPS Papua Barat, 2019). Kemudian, berdasarkan aspek kewilayaan, hingga Tahun 2018 terdapat dua wilayah di Papua Barat yang tercatat memiliki TPT tertinggi bahkan diatas rata-rata TPT Papua Barat yaitu, Kota Sorong dan Kabupaten Fakfak dengan rerata masing-masing TPT empat tahun terakhir yaitu 14 persen dan 9.70 persen per tahun. Tingginya TPT pada kedua wilayah tersebut dikarenakan jumlah angkatan kerja yang terus mengalami peningkatan, namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Gambar 3.2.

Distribusi Tenaga Kerja 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Pada Masing-Masing Sektor



Keterangan : A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; B. Pertambangan dan Penggalian; C. Industri Pengolahan; D. Pengadaan Listrik dan Gas; E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; F. Konstruksi; G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; H. Transportasi dan Pergudangan; I. Penyediaan Akomodasi dan makan Minum; J. Informasi dan Komunikasi; K. Jasa Keuangan dan Asuransi; L. real Estat; M, N. Jasa Perusahaan; O. Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; P. Jasa Pendidikan; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; R,S,T,U. Jasa lainnya.

Distribusi tenaga kerja masing-masing sektor ekonomi bervariasi pada setiap kabupaten dan kota dengan jumlah tenaga kerja terbesar berada di Kota Sorong yang didominasi oleh sektor perdagangan (G), kemudian Kabupaten Manokwari yang didominasi oleh sektor pertanian (A).

Target pemerintah daerah menurunkan jumlah pengangguran di Papua Barat dengan menciptakan dan memberikan kesempatan yang luas kepada sektor informal untuk berkembang di Papua Barat cukup efektif, namun upaya tersebut belum dapat mencapai target penurunan TPT Papua Barat sesuai dengan RKPDP Papua Barat Tahun 2018. Belum efektifnya upaya daerah mencapai target TPT di Papua Barat hingga Tahun 2018, dikarenakan:

1. Terjadi pergeseran struktur lapangan pekerjaan di Papua Barat. Perkembangan angkatan kerja pada sektor pertanian semakin menurun, karena ditinggalkan oleh angkatan kerja yang lebih memilih Sektor Industri (*manufacture*) dan

Jasa (*services*). Di lain kesempatan, aktivitas di sektor industri dan jasa yang mencirikan masyarakat kota, tentunya membutuhkan pekerja dengan ketrampilan tertentu. Ketrampilan-ketrampilan tersebut tidak dipersiapkan dengan baik oleh para pencari kerja untuk bersaing di wilayah perkotaan.

2. Bertambahnya jumlah penduduk di Papua Barat yang kemudian tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada.
3. Berdasarkan tingkat pendidikan, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Papua Barat hingga Tahun 2018 memiliki TPT tertinggi yaitu 27.26 persen dan 29.63 persen. Artinya, masih ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap utamanya tingkat pendidikan SMA dan SMK sebanyak 56.89 persen.

Berdasarkan analisis evaluasi tersebut diatas, maka diperlukan upaya konkrit yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan *Stakeholders* untuk mengurangi TPT di Papua Barat, yaitu melalui:

1. Upaya yang terstruktur untuk mendorong pencari kerja agar meningkatkan kapasitas dan peluang usaha. Peningkatan kapasitas dan peluang usaha dapat dilakukan dengan mendorong/merancang regulasi dan kebijakan dan fokus pada penganggur dan setengah penganggur, hingga pemberian bantuan kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan, pembuatan sarana penunjang maupun pemberian bantuan finansial.
2. Pemerintah Daerah harus mengambil peran untuk memediasi dan melakukan koordinasi dengan *stakeholders* di daerah untuk mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK) dan mendesain kurikulum BLK untuk mempersiapkan tenaga kerja berbasis kompetensi dan siap pakai yang lebih efektif dan efisien.
3. Mengembangkan kurikulum SMA dan SMK agar terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja dan ketrampilan untuk memenuhi standar kompetensi pasar kerja.

3.1.4. KEMISKINAN

Sampai dengan akhir Tahun 2018, tingkat kemiskinan di Papua Barat telah berhasil diturunkan dari 25.82 persen (225 ribu orang) pada Tahun 2015 menjadi 23.29 persen (214 ribu orang) pada Tahun 2018, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan baik itu terget dalam RKP Kewilayahan maupun RKPDP Provinsi Papua Barat. Bahkan pencapaian penurunan tingkat kemiskinan di Papua Barat hingga

Tahun 2018, masih relatif jauh tertinggal jika disandingkan dengan capaian tingkat nasional yaitu 9.66 persen. Capaian pembangunan penanggulangan kemiskinan di Papua Barat Tahun 2015 s.d 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Penurunan tingkat kemiskinan di Papua Barat dicapai melalui beberapa upaya diantaranya program pemberdayaan masyarakat kampung yang dilakukan oleh Pemerintah dan mitra pembangunan di daerah. Pemberdayaan masyarakat kampung dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan pembangunan kampung, melalui program serta kegiatan secara berkelanjutan dengan mendayagunakan Sumberdaya Manusia (SDM) dan Sumberdaya Alam (SDA) yang ada. Bentuk pemberdayaan yaitu melalui penguatan kapasitas aparatur dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pembangunan di kampung. Tentunya proses ini dimulai dengan konsep bahwa, porsi terbanyak kantong kemiskinan berada di daerah perkampungan dan yang lebih mengetahui persoalan kemiskinan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, pendekatan penguatan kapasitas yang dilakukan sejauh ini lebih pada aspek kebutuhan pembangunan di kampung.

Tabel 3.7. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Papua Barat Tahun 2015 - 2019

Indikator	Target 2018		Pencapaian				Notifikasi
	RKP Wilayah	RKPD	2015	2016	2017	2018	
Persentase Penduduk Miskin (%)	23.00	20.44	25.82	25.43	23.10	23.01	Belum memenuhi target Nasional dan Daerah
Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)		210	225.36	225.81	228.38	214.47	Belum memenuhi target Nasional dan Daerah

Sumber: BPS dalam Database PEPPD Bappenas, 2019.

Program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat kampung telah berjalan sesuai target yang ditetapkan, namun capaian keberhasilan tersebut belum dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan pada Tahun 2018. Walaupun tingkat kemiskinan mengalami penurunan, namun capaiannya cenderung melambat.

Penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat kampung telah mencapai target yang ditetapkan, namun belum dapat mencapai target penurunan tingkat kemiskinan di Papua Barat. Keadaan ini dikarenakan:

1. Program pemberdayaan masyarakat belum mampu memberdayakan kelompok miskin, karena kurangnya pemahaman dari para pelaku program di berbagai tingkatan, khususnya di tingkat kampung dan distrik terhadap program. Hal itu diperburuk oleh sosialisasi program, dimana sosialisasi difahami oleh para pelaku program hanya sebatas penyebaran informasi proyek, bukannya sebagai bagian proses penyadaran terhadap masyarakat (kelompok miskin) tujuan program dalam upaya peningkatan kemandirian masyarakat dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, serta hanya sekedar memenuhi target formal.
2. Tidak terjadinya proses pemberdayaan secara maksimal yang nampak dari hasil capaian, dimana tidak terjadi transfer daya kepada kelompok miskin, karena program lebih dimanfaatkan oleh kalangan tertentu saja (elit birokrasi: kabupaten/kota, distrik, kampung).
3. Proses pemberdayaan masyarakat (kelompok miskin) yang dilakukan selama ini kurang memperhatikan penguatan peran masyarakat, dan memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mencari solusi dan mengatasi persoalan-persoalan masyarakat dengan caranya mereka.

Merujuk pada hasil evaluasi, maka diperlukan upaya perbaikan untuk penanggulangan kemiskinan di Papua Barat melalui:

1. Para pelaku (pemerintahan tingkat kampung, tingkat distrik, dan stakeholders) perlu mempunyai pemahaman terhadap program pemberdayaan (target keluarga miskin) secara lebih baik. Untuk itu, diperlukan fasilitator lokal (kampung, distrik) secara lebih baik, dan perlunya pembekalan kepada mereka secara memadai. Selain itu, perlunya pelaksanaan sosialisasi program kepada masyarakat secara benar, dimana sosialisasi bukan semata penyebaran informasi, tetapi lebih dari itu, sebagai bagian penyadaran tentang permasalahan yang dihadapi dan tumbuhnya semangat untuk memecahkannya secara mandiri, karena itu diperlukan petugas yang berkualitas.

2. Perlunya pendampingan oleh fasilitator lokal secara berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan fasilitator lokal yang mempunyai pemahaman baik terhadap program, ulet, sabar, tekun, dan mempunyai semangat yang tinggi.
3. Memperkuat peran masyarakat dan memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mencari solusi dalam mengatasi persoalan kemiskinan mereka.

3.1.5. KETIMPANGAN

Indeks Gini yang mencerminkan ukuran ketimpangan dari sisi pendapatan di Papua Barat hingga Tahun 2018 tercatat sebesar 0.39. Jika mengikuti perkembangan Indeks Gini Papua Barat dari Tahun 2015 s.d Tahun 2018 sempat mengalami penurunan hingga mencapai 0.37 pada Tahun 2016. Artinya bahwa pada Tahun 2016, distribusi pendapatan dari sisi konsumsi masyarakat di Papua Barat semakin membaik, yang ditandai dengan nilai indeks yang semakin menurun, meskipun meningkat lagi pada periode berikutnya (Tahun 2017) dan bertahan hingga Tahun 2018. Menurunnya Indeks Gini di Papua Barat Tahun 2016 disebabkan oleh karena terjadi perbaikan (peningkatan) pendapatan masyarakat melalui berbagai program pemerintah, dan satu diantaranya yaitu program pemerintah melalui dana desa. Sejauh ini, porsi terbesar implementasi dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur (sarana dan fasilitas) yang dimiliki oleh kampung guna memudahkan aksesibilitas mobilisasi barang/jasa hasil produksi masyarakat pasca panen. Mekanisme dan teknisnya dirancang dalam bentuk program padat karya sehingga dapat memberdayakan masyarakat kampung, dan pada akhirnya masyarakat dapat memperoleh tambahan manfaat finansial.

Pasca Tahun 2016, Indeks Gini Papua Barat kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 0.39 di Tahun 2018, dan justru berada diatas nilai Indeks Gini Nasional (0.38). Capaian nilai Indeks Gini Papua Barat Tahun 2018, bahkan belum mampu untuk memenuhi target capaian dalam RKPD Papua Barat Tahun 2018. Tingginya Indeks Gini di Papua Barat dikarenakan perbedaan pengeluaran (gap) antar kelompok dalam masyarakat yang relatif masih sangat lebar kesenjangannya (Kepala BPS Papua Barat, 2019). Kelompok dalam masyarakat dimaksud yaitu kelompok masyarakat yang bekerja di sektor Pemerintahan, kelompok masyarakat yang bekerja di sektor swasta, dan kelompok masyarakat awam.

Jika ketimpangan dilihat dari perspektif wilayah kabupaten/kota di Papua Barat, BPS Papua Barat Tahun 2019 mencatat bahwa kabupaten/kota di wilayah Papua Barat yang memiliki Indeks Gini tertinggi dan masih diatas rata-rata Provinsi Papua Barat

yaitu kabupaten/kota dengan struktur wilayah geografis yang sulit dijangkau, seperti Kabupaten Kaimana (0.44), Kabupaten Teluk Wondama (0.41), Kabupaten Sorong Selatan (0.42), dan Kabupaten Maybrat (0.41). Tingkat kesulitan keterjangkauan pada beberapa kabupaten yang disebutkan diatas, mempersulit kelompok masyarakat awam untuk memobilisasi hasil produksi pertanian keluar dari kampung menuju pasar. Keadaan ini kemudian menjadi salah satu penyebab tidak meratanya distribusi pengeluaran antar kelompok masyarakat yang bekerja di pemerintahan dengan masyarakat awam.

Tabel 3.8. Capaian Indeks Gini Papua Barat dan Nasional Tahun 2015 -2018

Indikator	Target 2018		Pencapaian				Notifikasi
	RKP Nas	RKPD	2015	2016	2017	2018	
Indeks Gini Papua Barat (Indeks)	0.38	0.38	0.44	0.37	0.39	0.39	Belum memenuhi target Nasional dan Daerah
Indeks Gini Nasional (Indeks)			0.40	0.39	0.39	0.38	

Sumber: BPS dalam Database PEPPD Bappenas, 2019.

Upaya pemerintah (pusat dan daerah) mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat di Papua Barat melalui program pemerintah pusat (Dana Desa), pembangunan infrastruktur untuk menjangkau daerah-daerah yang terisolasi agar memperoleh manfaat layanan cukup efektif, namun upaya tersebut belum dapat memberikan banyak dampak kuantitatif (mengacu pada target RKPD 2018) bagi daerah untuk mengurangi disparitas ekonomi dan wilayah di Papua Barat. Belum efektifnya upaya mengurangi disparitas ekonomi dan disparitas antar wilayah dikarenakan:

1. Masih terjadi penggerusan sumberdaya (manusia dan alam) antar kabupaten/kota di Papua Barat. Dampaknya, ketidakmampuan suatu daerah untuk berkembang lebih baik karena ditinggalkan oleh SDM yang berkualitas serta pengelolaan SDA yang miskin nilai tambah. Keadaan ini, jika tidak diperhatikan dengan baik maka distribusi kualitas sumberdaya manusia menjadi tidak merata, dimana ketidakmerataan kualitas SDM menyebabkan daerah dengan kualitas SDM baik akan menunjang pembangunan di daerahnya, dan sebaliknya.
2. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja lokal, yang kemudian secara langsung mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar masyarakat di Papua Barat.
3. Bagian terbesar kelompok masyarakat awam di Papua Barat bertempat tinggal di daerah perdesaan, dan umumnya memiliki tingkat pengeluaran yang relatif rendah. Sejauh ini, kelompok masyarakat tersebut mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama keluarga. Permasalahan utama yang dihadapi berkaitan dengan masih rendah tingkat pengeluaran rumah tangga sektor pertanian yaitu masih rendah investasi pembangunan, lemahnya kapabilitas dan ketersediaan SDM, terbatasnya infrastruktur untuk transportasi, pergudangan, dan jaringan irigasi.

Guna mengurangi disparitas ekonomi dan wilayah antar kabupaten/kota di Papua Barat, maka beberapa rekomendasi strategis yang dilakukan diantaranya:

1. Pemanfaatan sumberdaya lokal, khususnya SDM kabupaten/kota untuk menghindari kebocoran sumberdaya ke wilayah lain (*brain drain*) ke kabupaten/kota lain dalam wilayah Papua Barat yang mempengaruhi disparitas pembangunan antar wilayah. Pemanfaatan SDM lokal dapat dimotivasi oleh daerah melalui penyediaan insentif daerah kepada tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang dapat memuaskan berbagai kebutuhan SDM melalui kesempatan pengembangan karir, sistem kompensasi atau balas jasa yang adil, serta hubungan antara individu dalam organisasi yang serasi.
2. Pemerintah daerah perlu mendorong suatu kebijakan terkait dengan “Pelatihan Tenaga Kerja”. Kebijakan pelatihan tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas. Peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja, dan pengembangan di tempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM yang komprehensif dan terpadu. Pelatihan kerja akan semakin penting peranannya dalam peningkatan kualitas tenaga kerja

dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja. Sesuai dengan kondisi dan peluang kerja di daerah Papua Barat, maka fokus pelatihan dapat diarahkan pada dua aspek, yaitu Pelatihan Kewirausahaan dan Pelatihan Karyawan. Pelatihan kewirausahaan fokus pada pelaku dengan aktivitas usaha yang sudah berjalan dan pelaku usaha yang baru memulai aktivitas usaha. Sedangkan Pelatihan karyawan fokus pada penduduk usia kerja yang hendak memasuki lapangan kerja.

3. Upaya pembangunan pertanian yang dapat dilakukan oleh pemerintah (daerah dan pusat) serta stakeholder, yaitu bahwa untuk meningkatkan investasi pemerintah daerah dan masyarakat, maka harus bisa menjamin keamanan berusaha bagi pengusaha ataupun investor, harus ada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta adanya jaminan kepastian hukum dalam penggunaan lahan yang berkaitan dengan hak ulayat. Kemudian, pemberdayaan SDM bisa tercapai yaitu melalui penyediaan tenaga terampil untuk pertanian (jika sudah ada, dioptimalkan fungsinya), etos kerja masyarakat asli Papua ditingkatkan, dan budaya pertanian tradisional dirubah ke arah pertanian yang produktif dan ramah lingkungan. Selanjutnya, infrastruktur penunjang pertanian bisa terpenuhi apabila anggaran Pemerintah Daerah untuk itu ditingkatkan. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah harus mempunyai program prioritas agar infrastruktur (infrastruktur pertanian) tidak menjadi hambatan program pembangunan.

3.1.6. PEMBANGUNAN MANUSIA

Sampai dengan Tahun 2018, tercatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat adalah sebesar 63.74. Capaian nilai IPM Papua Barat pada Tahun 2018 sudah memenuhi target daerah dalam RKPD Papua Barat Tahun 2018 (63,21) dan target Nasional dalam RKP Kewilayahan (63.40). Tercatat juga bahwa, pada Tahun 2015 s.d Tahun 2018 Pembangunan sumberdaya manusia di Papua Barat, meskipun bergerak dengan pertumbuhan yang melambat namun terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan IPM Nasional. Pembangunan sumberdaya manusia di Papua Barat terus mengalami peningkatan dikarenakan strategi pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Sebagai misal, program tuntas wajib belajar pendidikan dasar di wilayah pinggiran dan terpencil melalui Pengembangan SD Kecil atau Guru Kunjung, SD Terintegrasi, Sekolah Kampung dengan penggunaan bahasa Ibu sebagai pengantar. Sedangkan dibidang kesehatan, telah dilakukan program pelayanan yang menjangkau kampung terisolir, yaitu program 1000 hari kehidupan

dan program kaki telanjang. Untuk komponen daya beli, belum banyak memberikan kontribusi terhadap pembentukan IPM Papua Barat, dikarenakan adanya *gap* untuk distribusi pengeluaran antar kelompok dalam masyarakat yang masih cukup tinggi melalui pencapaian gini rasio (0.39) Papua Barat Tahun 2018.

Pola yang berbeda justru tampak pada saat melihat tingkat capaian (IPM Provinsi Papua Barat dan IPM Nasional) per tahun, dimana dalam kurung waktu empat tahun terakhir (Tahun 2015 – 2018) capaian IPM Papua Barat masih berada di bawah IPM Nasional. Meskipun IPM Papua Barat terus meningkat, namun belum dapat mendekati rata-rata IPM Nasional karena disparitas untuk mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, pendidikan, dan kesehatan yang layak masih harus dibenahi dan diperhatikan. Perkembangan IPM Papua Barat dan Nasional Tahun 2015-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Papua Barat dan Nasional Tahun 2015 – 2018

Indikator	Target 2018		Pencapaian				Notifikasi
	RKP Wil.	RKPD	2015	2016	2017	2018	
IPM Papua Barat (Indeks)	63.4	63.21	61.73	62.21	62.99	63.74	Memenuhi target Nasional & Daerah
IPM Nasional (Indeks)			69.55	70.18	70.81	71.39	

Sumber: BPS dalam Database PEPPD Bappenas, 2019.

Strategi pembangunan sumberdaya manusia di Papua Barat meskipun meningkat dengan pertumbuhan yang melambat jika dibandingkan dengan wilayah lain di luar Tanah Papua (Papua dan Papua Barat), namun cukup efektif karena mampu menempatkan Papua Barat pada urutan ke-9 dari 34 provinsi, dan bahkan capaian IPM Papua Barat melebihi target daerah dan target Nasional Tahun 2018. Namun keberhasilan pencapaian tersebut hingga Tahun 2018 masih jauh di bawah rata-

rata capaian IPM Nasional. Masih rendahnya capaian IPM Papua Barat dibandingkan dengan capaian rata-rata IPM Nasional dikarenakan:

1. Keberhasilan program yang diinisiasi oleh daerah belum sepenuhnya didukung oleh Pemerintah Pusat melalui kementerian/lembaga. Kementerian/Lembaga cenderung membuat program baru dengan menggunakan perspektif Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat menjawab persoalan mendasar di Papua Barat. Sebagai contoh, terkait penetapan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga medis yang dinilai memberatkan. Di samping itu, program Nusantara Sehat yang saat ini sedang digaungkan dinilai belum mampu menjangkau wilayah terisolir, dan hanya dilakukan di lokus-lokus yang mudah terjangkau.
2. Meskipun IPM Papua Barat tumbuh tiap tahun dengan pertumbuhan positif, namun akses masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan utamanya bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan daya beli masyarakat masih belum merata. Sebagai contoh, pada bidang pendidikan masih dijumpai angka partisipasi sekolah (tingkat SMA) yang masih rendah (Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak). Pada bidang kesehatan, Angka Harapan Hidup yang mencerminkan kualitas kesehatan individu relatif masih rendah utamanya di Kabupaten Teluk Wondama (59.53 tahun), Kabupaten Tambrau (59.56 tahun), Kabupaten Teluk Bintuni (60.15 tahun), Kabupaten Kaimana (64.25 tahun), dan Kabupaten Maybrat (64.93 tahun). Kemudian, untuk komponen pengeluaran per kapita yang menggambarkan daya beli masyarakat yang masih relatif rendah terutama di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Pegunungan Arfak (Rp 4.979 juta per tahun), Kabupaten Tambrau (Rp 4.859 juta per tahun), Kabupaten Maybrat (Rp 5.168 juta per tahun), dan Kabupaten Manokwari Selatan (Rp 5.225 juta per tahun).

Berdasarkan evaluasi terkait pembangunan sumberdaya manusia di Papua Barat, maka beberapa rekomendasi yang dapat diberikan yaitu:

1. Perlu perbaikan terhadap tata kelola berkaitan dengan sinkronisasi dan harmonisasi metode dan mekanisme pelayanan bidang pendidikan dan bidang kesehatan, antara pemerintah daerah melalui OPD teknis terkait dengan pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga terkait.
2. Pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan menjadi faktor penting untuk

menyiapkan SDM yang mampu mengelola sumber daya alam wilayah Papua Barat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Oleh karenanya, penyiapan SDM menjadi investasi jangka panjang yang harus dilakukan melalui program-program afirmatif dengan sinkronisasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Beberapa program telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, namun masih berjalan secara parsial, sehingga perlu dicermati kembali atau bahkan menghapus program-program yang dinilai kurang relevan. Sedangkan untuk mengurangi disparitas pengeluaran antar kelompok dalam masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat (kelompok awam). Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah yaitu dengan mendorong pengembangan ekonomi daerah, dan fokus utamanya pada daerah/kabupaten dengan tingkat pengeluaran per kapita yang rendah. Pengembangan ekonomi daerah diharapkan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan dan produktivitas masyarakat.

3.1.7. PEMBANGUNAN WILAYAH

Indikator nilai Rasio Gini dalam konteks pengembangan wilayah, digunakan untuk memberikan gambaran tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk dalam suatu wilayah. Nilai Rasio Gini antara 0 s.d 1. Apabila nilai Rasio Gini mendekati 0, maka kesenjangan distribusi pendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, apabila rasio Gini mendekati angka 1, maka kesenjangan distribusi makin tinggi. Rasio Gini dibagi dalam tiga kategori: (a) Gini Ratio > 0.5 yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan tinggi, (b) Gini Ratio 0.3 s.d 0.5 yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidak merataan sedang, dan (c) Gini Ratio < 0.3 yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidak merataan rendah.

Dalam kurun waktu Tahun 2015 s.d Tahun 2018, Gini Rasio kabupaten/kota di Papua Barat menunjukkan tren yang fluktuatif dengan rerata perkembangan per tahun yaitu 0.38 dan tergolong kategori tingkat kesenjangan “sedang”. Tahun 2018, terdapat tujuh kabupaten di wilayah Papua Barat yang memiliki Gini Rasio diatas Gini Rasio Provinsi Papua Barat. Ketujuh kabupaten/kota dengan Gini Rasio tertinggi yaitu Kabupaten Fakfak (0.39), Kabupaten Kaimana (0.44), Kabupaten Teluk Wondama (0.41), Kabupaten Manokwari (0.39), Kabupaten Sorong Selatan (0.42), Kabupaten Raja Ampat (0.39), dan Kabupaten Maybrat (0.40). Meskipun rerata perkembangan Gini Rasio kabupaten/kota di Papua Barat tergolong “sedang”, namun BPS mencatat

bahwa Gini Rasio Papua Barat hingga Tahun 2018 (0.39) dan masih diatas rerata Gini Rasio Nasional Tahun 2018 (0.38), dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10.

Perkembangan Gini Rasio Kabupaten/Kota di Papua Barat Tahun 2015 s.d 2018

Wilayah	Tahun (Rasio)				Rerata
	2015	2016	2017	2018	
Provinsi Papua Barat	0.44	0.373	0.390	0.394	0.40
Kab. Fakfak	0.370	0.408	0.327	0.397	0.38
Kab. Kaimana	0.434	0.373	0.345	0.440	0.40
Kab. Teluk Wondama	0.438	0.366	0.437	0.410	0.41
Kab. Teluk Bintuni	0.341	0.334	0.430	0.387	0.37
Kab. Manokwari	0.373	0.317	0.480	0.398	0.39
Kab. Sorong Selatan	0.352	0.425	0.379	0.422	0.39
Kab. Sorong	0.405	0.355	0.402	0.367	0.38
Kab. Raja Ampat	0.403	0.368	0.433	0.394	0.40
Kab. Tambrau	0.283	0.265	0.279	0.344	0.29
Kab. Maybrat	0.373	0.304	0.323	0.408	0.35
Kab. Manokwari Selatan	0.406	0.385	0.353	0.389	0.38
Kab. Pegunungan Arfak	0.274	0.260	0.754	0.391	0.42
Kota Sorong	0.335	0.333	0.340	0.330	0.33

Sumber: BPS dalam Database PEPPD Bappenas, 2019.

Selain Gini Rasio, indikator lainnya yang digunakan untuk melihat gambaran kesenjangan pembangunan antar wilayah (kabupaten/kota) yaitu Indeks Williamson. Sampai dengan Tahun 2018 Indeks Williamson Papua Barat menunjukkan angka 1.33 dan belum dapat memenuhi target daerah dalam RKPD Papua Barat Tahun 2018 (0.43). Besaran angka Indeks Williamson Papua Barat Tahun 2018 yang diperoleh lebih dari angka satu dan tergolong dalam kategori kesenjangan tinggi, dan menyiratkan bahwa kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota di Papua Barat sangat tinggi. Tingginya kesenjangan pendapatan regional antar kabupaten/kota di Papua Barat, diikuti dengan jumlah Desa Tertinggal yang terus mengalami peningkatan sebanyak 111 desa (kampung) dari Tahun 2014 (1.441 kampung) menjadi 1.552 kampung di Tahun 2018. Selanjutnya, jumlah kampung berkembang

dan kampung mandiri juga mengalami peningkatan dari 186 kampung (Tahun 2014) menjadi 337 desa/kampung di Tahun 2018, dan untuk kampung mandiri meningkat dari 1 desa/kampung menjadi 3 desa/kampung mandiri di Tahun 2018.

Tabel 3.11.

Perkembangan Indikator Pembangunan Wilayah di Papua Barat Tahun 2015 - 2018

Indikator	Target 2018		Pencapaian					Notifikasi
	RKP Nas	RKPD	2014	2015	2016	2017	2018	
Indeks Williamson Provinsi Papua Barat	-	0.43	-	1.39	1.35	1.31	1.33	Belum memenuhi target Daerah
Jumlah Desa Tertinggal	-	-	1.441	-	-	-	1.552	
Jumlah Desa Berkembang	-	-	186	-	-	-	337	
Jumlah Desa Mandiri	-	-	1	-	-	-	3	

Sumber: Data diolah dari BPS Papua Barat 2019; Diolah dari BPS Papua Barat, 2019

Hingga akhir Tahun 2018, perekonomian kabupaten/kota di Papua Barat mengalami pertumbuhan yang positif dengan pola yang bervariasi, dan bahkan masih pada periode yang sama terdapat empat kabupaten/kota yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi diatas Provinsi Papua Barat (6.24%). Keempat kabupaten/kota dimaksud yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak (9.71%), Kabupaten Manokwari (6.38%), Kabupaten Fakfak (6.57%), dan Kota Sorong (6.81%). Sektor Pertanian dan sub sektornya merupakan penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Fakfak. Sedangkan untuk Kota Sorong, aktivitas ekonominya banyak dikendalikan oleh Sektor Jasa dan Industri Pengolahan. Perkembangan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Papua Barat dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12.

Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Papua Barat Tahun 2015 s.d 2018

Wilayah	Tahun (Persen)				Rerata (Persen)
	2015	2016	2017	2018	
Kab. Raja Ampat	1.97	2.38	-0.01	4.35	2.17
Kab. Teluk Bintuni	2.85	2.71	1.23	5.15	2.99
Kab. Sorong	2.35	0.89	3.35	5.68	3.07
Kab. Teluk Wondama	3.89	5.42	5.21	4.01	4.63
Papua Barat	4.15	4.52	4.01	6.24	4.73
Kab. Manokwari Selatan	4.59	4.87	4.34	4.53	4.58
Kab. Kaimana	4.97	3.17	5.73	5.86	4.93
Kab. Maybrat	5.51	6.4	6.56	6.12	6.15
Kab. Pegunungan Arfak	6.67	3.16	5.06	9.71	6.15
Kab. Tambrauw	5.83	4.95	6.33	5.46	5.64
Kab. Fakfak	7.29	5.24	7.13	6.57	6.56
Kab. Sorong Selatan	6.4	6.04	7.47	6.20	6.53
Kab. Manokwari	7.36	7.24	7.62	6.38	7.15
Kota Sorong	10.27	9.05	8.35	6.81	8.62

Sumber: BPS dalam Database PEPPD Bappenas, 2019; Diolah dari BPS Perwakilan Papua Barat, 2019

Selama kurun waktu Tahun 2015 s.d 2018, nampak bahwa PDRB Per Kapita kabupaten/kota di Papua Barat terus mengalami peningkatan. Tercatat hingga Tahun 2018, terdapat dua kabupaten yang memiliki PDRB Per Kapita tertinggi di Papua Barat. Kedua kabupaten dimaksud yaitu Kabupaten Teluk Bintuni dengan rerata PDRB Per Kapita per tahun yaitu sebesar Rp422.15 juta per tahun, dan Kabupaten Sorong (Rp113.04 juta per tahun). Tingginya PDRB Per Kapita kedua kabupaten tersebut didukung oleh sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian. Selanjutnya, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Pegunungan Arfak adalah kabupaten dengan rerata PDRB Per Kapita terendah dengan masing-masing Rp13.50 juta per tahun, Rp14.90 juta per tahun, dan Rp19.68 juta per tahun. Rendahnya PDRB Per Kapita di tiga kabupaten (Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Tambrauw) disebabkan perkembangan dan/atau

peningkatan jumlah penduduk yang tidak disertai dengan peningkatan PDRB yang dihasilkan.

Kualitas sumberdaya manusia di Papua Barat dapat digambarkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karenanya, semakin tinggi IPM, mengindikasikan kualitas sumberdaya manusia di wilayah tersebut semakin produktif angkatan kerja, serta semakin tinggi sumberdaya manusia di wilayah tersebut menghasilkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan berkelanjutan. Sampai dengan Tahun 2018, IPM kabupaten/kota di Papua Barat terus mengalami peningkatan dengan rerata pertumbuhan 1.12 persen per tahun.

Tabel 3.13.

PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Papua Barat Tahun 2015 - 2018

Wilayah	Tahun (Juta Rupiah)				Rerata (Juta Rupiah)
	2015	2016	2017	2018	
Provinsi Papua Barat	72.160	74.585	78.426	84.958	77.532
Kab. Fakfak	50.519	54.551	59.115	63.369	56.888
Kab. Kaimana	36.643	38.792	41.592	44.290	40.329
Kab. Teluk Wondama	36.862	39.733	43.095	45.668	41.339
Kab. Teluk Bintuni	405.168	408.027	417.848	457.551	422.148
Kab. Manokwari	43.977	46.857	50.490	54.043	48.841
Kab. Sorong Selatan	31.078	33.741	36.196	38.303	34.829
Kab. Sorong	112.453	108.013	111.106	120.577	113.037
Kab. Raja Ampat	50.877	51.835	52.198	55.887	52.699
Kab. Tambrauw	11.819	12.774	14.050	15.384	13.506
Kab. Maybrat	13.006	14.185	15.535	16.882	14.902
Kab. Manokwari Selatan	27.761	28.793	30.567	32.135	29.814
Kab. Pegunungan Arfak	5.274	5.428	5.736	62.279	19.679
Kota Sorong	48.223	53.100	57.666	61.169	55.039

Sumber: BPS dalam Database PEPPD Bappenas, 2019; Diolah dari BPS Perwakilan Papua Barat, 2019

Data BPS Perwakilan Papua Barat menunjukkan bahwa terhitung Tahun 2015 s.d Tahun 2018, terdapat empat kabupaten/kota di wilayah Papua Barat yang memiliki rerata IPM tertinggi dan diatas IPM Provinsi Papua Barat (rerata IPM sebesar 62.67). Keempat daerah dimaksud yaitu Kabupaten Fakfak (rerata perkembangan IPM per tahun yaitu sebesar 65.89), Kabupaten Manokwari (rerata IPM per tahun 70.52), Kabupaten Sorong (rerata IPM sebesar 63.01), dan Kota Sorong (rerata perkembangan IPM per tahun sebesar 76.50). Tingginya IPM di keempat wilayah ini dikarenakan keempat wilayah tersebut merupakan sentral pusat pendidikan, dan pintu masuk mobilisasi barang dan jasa di Papua Barat. Perkembangan IPM kabupaten/kota di Papua Barat dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14.

Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Papua Barat Tahun 2015 - 2018

Wilayah	Tahun (Indeks)				Rerata (Indeks)
	2015	2016	2017	2018	
Provinsi Papua Barat	61.73	62.21	62.99	63.74	62.67
Kab. Fakfak	64.92	65.55	66.09	66.99	65.89
Kab. Kaimana	61.33	62.15	62.74	63.67	62.47
Kab. Teluk Wondama	56.64	57.16	58.1	58.86	57.69
Kab. Teluk Bintuni	61.09	61.81	62.39	63.13	62.11
Kab. Manokwari	69.91	70.34	70.67	71.17	70.52
Kab. Sorong Selatan	58.6	59.2	60.19	61.06	59.76
Kab. Sorong	61.86	62.42	63.42	64.32	63.01
Kab. Raja Ampat	61.23	61.95	62.35	62.84	62.09
Kab. Tambrauw	49.77	50.35	51.01	51.95	50.77
Kab. Maybrat	55.78	56.35	57.23	58.16	56.88
Kab. Manokwari Selatan	56.59	57.12	58.08	58.84	57.66
Kab. Pegunungan Arfak	53.73	53.89	54.39	55.31	54.33
Kota Sorong	75.91	76.33	76.73	77.35	76.58

Sumber: BPS Papua Barat, 2019

Sedangkan untuk kabupaten/kota dengan rerata IPM terendah sebagian besar dijumpai pada kabupaten-kabupaten pemekaran, seperti Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Rendahnya IPM utamanya di beberapa kabupaten pemekaran dikarenakan persentase penduduk miskin di wilayah-wilayah tersebut cukup tinggi di Papua Barat. Kemiskinan merupakan masalah serius bagi pembangunan manusia, karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks, bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok, sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan pun terabaikan. Hal tersebut menjadikan *gap* antara kemiskinan dan pembangunan manusia pun menjadi besar dan pada akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah menjadi tidak terealisasi dengan baik.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kabupaten/kota di Papua Barat selama periode 2015 s.d 2018 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Beberapa kabupaten/kota yang mengalami peningkatan TPT seperti Kabupaten Fakfak dari 9.013 orang (Tahun 2015) menjadi 10.120 orang pencari kerja di Tahun 2018, atau naik sebesar 1.107 pencari kerja. Keadaan yang sama dialami juga oleh Kabupaten Teluk Wondama (dari 2.834 orang pencari kerja menjadi 3.210 orang), Kabupaten Sorong Selatan dari 2.868 orang pencari kerja menjadi 4.780 orang, Kabupaten Tambrauw (0 menjadi 2.960 orang), Kabupaten Manokwari Selatan (dari 4.179 orang menjadi 5.210 orang di Tahun 2018, dan di Kabupaten Pegunungan Arfak (1.051 orang menjadi 1.280 orang di Tahun 2018).

Tabel 3.15.

Perkembangan TPT Kab/Kota di Papua Barat tahun 2015 - 2018

Wilayah	Tahun (Jumlah Orang)			
	2015	2016	2017	2018
Provinsi Papua Barat	8.080	7.460	6.490	6.300
Kab. Fakfak	9.013	-	9.960	10.120
Kab. Kaimana	3.342	-	5.540	2.870
Kab. Teluk Wondama	2.834	-	1.468	3.210
Kab. Teluk Bintuni	6.866	-	7.616	5.930
Kab. Manokwari	6.579	-	2.681	4.880
Kab. Sorong Selatan	2.868	-	4.838	4.780
Kab. Sorong	5.662	-	4.556	2.980

Kab. Raja Ampat	5.588	-	3.099	3.220
Kab. Tambrauw	0.000	-	0.437	2.960
Kab. Maybrat	4.015	-	1.546	1.620
Kab. Manokwari Selatan	4.179	-	1.612	5.210
Kab. Pegunungan Arfak	1.051	-	0.990	1.280
Kota Sorong	17.260	-	13.540	11.20

Sumber: BPS dalam Database PEPPD Bappenas, 2019; Diolah dari BPS Perwakilan Papua Barat, 2019 (Keterangan BPS bahwa untuk Tahun 2016 sampel tidak mencukupi untuk diestimasi).

Berdasarkan analisis terhadap indikator-indikator terpilih untuk aspek pembangunan wilayah di Papua Barat, diperoleh isu strategis sebagai berikut:

1. Tingkat kesenjangan ekonomi dalam wilayah dan antarkota/antarkabupaten di Provinsi Papua Barat yang ditunjukkan dengan nilai Gini Rasio dan Indeks Wiliamson dari tahun 2015 - 2018 cukup tinggi dan berada di atas rata-rata Nasional. Penyebab kesenjangan ekonomi dan sosial di Provinsi Papua Barat antara lain jarak kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta pemberdayaan ekonomi yang terbatas. Kesenjangan dalam perekonomian menimbulkan disparitas terutama melonjaknya harga barang kebutuhan pokok.
2. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat cukup tinggi walaupun distribusi pendapatannya kurang merata di seluruh kabupaten/kota, terlihat dari besarnya *gap* antara kabupaten/kota dengan PDRB per Kapita tertinggi dan PDRB per kapita terendah. Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Sorong menghasilkan PDRB per Kapita tertinggi di Papua Barat karena pengaruh keberadaan produksi minyak dan gas alam yang menghasilkan ekspor dengan nilai yang tinggi dan berpengaruh terhadap perekonomian di Papua Barat (mendominasi perekonomian di Papua Barat), namun belum tentu mencerminkan tingkat kemakmuran yang tinggi di wilayah tersebut.
3. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di Papua Barat yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat Tahun 2018

(63.74) dibandingkan Tahun 2015 (61.73), namun masih jauh di bawah IPM Nasional sebesar 71.39. Nilai IPM ini sudah menerapkan metode baru yang lebih merepresentasikan kondisi saat ini. Rendahnya nilai IPM di Papua Barat sejalan dengan masih tingginya persentase penduduk miskin di Papua Barat. Kondisi ini tentunya bertolak belakang dengan tingginya nilai Pendapatan Per Kapita (PDRB Per Kapita) Provinsi Papua Barat, yang menunjukkan bahwa pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat masih berjalan eksklusif dan tidak merata.

Berdasarkan evaluasi berkaitan dengan isu pengembangan wilayah, maka diperlukan upaya perbaikan untuk pembangunan wilayah di Papua Barat melalui:

1. Pembangunan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan antargolongan pendapatan. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan prioritas pembangunan fokus mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Untuk maksud tersebut maka kebijakan operasional dapat berupa peningkatan pengembangan ekonomi lokal berbasis masyarakat, pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna, pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses input produksi termasuk peningkatan jaringan irigasi, dan peningkatan pelayanan sosial, khususnya pendidikan dan kesehatan.
2. Perlu ada kebijakan untuk mendorong sektor industri pengolahan non migas untuk dikembangkan, mengingat sumberdaya alam pertambangan tersebut merupakan sumberdaya alam tidak terbaharukan. Ada dua alasan yang mendukung hal tersebut. *Pertama*, sektor pertanian primer memiliki elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis, namun ketika situasi ekonomi membaik dan pendapatan masyarakat meningkat permintaan terhadap komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama. Berbeda halnya dengan permintaan terhadap produk manufaktur, yang sangat elastis terhadap peningkatan pendapatan. *Kedua*, sektor industri pengolahan non migas sangat potensial dalam menciptakan nilai tambah, mendorong perkembangan sektor-sektor lain (*multiplier effect*), dan menciptakan lapangan kerja.
3. Mengefektifkan kebijakan yang inklusif yang lebih berpihak pada masyarakat kelas menengah ke bawah di wilayah Papua Barat. Sebagai contoh, program JKN-KIS dan KIP yang memberikan jaminan kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan kepada masyarakat perlu dikawal dengan baik. Sehingga meskipun pendapatan masyarakat tidak meningkat, tetapi masih tetap melakukan aktivitas produktif, karena masih terlindungi dengan program perlindungan sosial.

3.2. SINERGITAS RPJMD WILAYAH KEK TERHADAP RPJMD PAPUA BARAT DAN RPJMN

Sinergitas RPJMD wilayah KEK terhadap RPJMD Provinsi Papua Barat dimaksudkan untuk menganalisis capaian indikator ekonomi maupun pembangunan pada tiga kabupaten penelitian (Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong) untuk di sinergikan dengan sasaran RPJM Nasional. Berdasarkan indikator tersebut menunjukkan bahwa pencapaian target pada tiga wilayah tersebut belum tampak kecuali Kabupaten Raja Ampat dan indikator tingkat kemiskinan untuk kabupaten Sorong. Wilayah yang tidak memiliki target indikator menunjukkan bahwa perencanaan yang dibuat tidak memiliki arah, oleh karena itu perlu melengkapi dokumen perencanaan tersebut sebagai dasar sehingga capaian masing-masing indikator terukur.

Tabel 3.16.

Penilaian Sinergi Tujuan dan Sasaran RPJMD terhadap Sasaran Pokok Pembangunan Nasional yg telah memiliki target provinsi per tahun

Indikator	Target RPJMD Kab Sorong	Target RPJMD Raja Ampat	Target RPJMD Kota Sorong	Target RPJMD Papua Barat 2018	Target RPJMN 2019
Pertumbuhan Ekonomi	tidak ada	6.0%	tidak ada	7.0%	8.0%
Tingkat Pengangguran	tidak ada	3.0%	tidak ada	6.45%	4.0-5.0%
Tingkat Kemiskinan	tidak ada	20.32%	17.65%	24.27%	7.0-8.0%
Gini Rasio	tidak ada	tidak ada	tidak ada	0,39	0,38
IPM				63,21	

Target RPJMD Kabupaten Raja Ampat belum mampu mencapai target provinsi kecuali indikator tingkat kemiskinan yang telah melewati target provinsi. Selanjutnya penilaian terhadap tujuan dan sasaran RPJMD masing-masing wilayah pada Kawasan Ekonomi Terpadu seperti pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17.

Penilaian Sinergi Tujuan dan Sasaran RPJMD terhadap Sasaran Pokok Pembangunan Nasional

Apakah di dalam Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah telah termuat sasaran-sasaran berikut:	Target RPJMD Kab Sorong 2018	Target RPJMD Raja Ampat 2018	Target RPJMD Kota Sorong 2018	Target RPJMD Papua Barat 2018	Target RPJMN 2019
Sasaran Makro:					
Pembangunan Manusia Dan Masyarakat					
1) Indeks Pembangunan Manusia	tidak ada	62.07	tidak ada	63.21	76.3
3) Indeks Rasio Gini	tidak ada	0.35	tidak ada	0.38	0.36
4) Persentase penduduk yg menjadi peserta jaminan kesehatan nasional	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	95%
Ekonomi Makro					
1) Pertumbuhan Ekonomi	tidak ada	6.0%	tidak ada	7.0%	8.0%
2) PDRB Perkapita tahun dasar 2010 (Ribu Rupiah)	tidak ada	56,977.76	tidak ada	75.000	72,217
3) Inflasi	tidak ada	6.0%	tidak ada	4.08%	3.5%
4) Rasio Pajak terhadap PDRB tahun dasar 2010	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	16.0%
5) Tingkat Kemiskinan	tidak ada	20.32%	17.65%	24.27%	7.0-8.0%

Apakah di dalam Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah telah termuat sasaran-sasaran berikut:	Target RPJMD Kab Sorong 2018	Target RPJMD Raja Ampat 2018	Target RPJMD Kota Sorong 2018	Target RPJMD Papua Barat 2018	Target RPJMN 2019
6) Tingkat Pengangguran Terbuka	tidak ada	3.0%	tidak ada	6.45%	4.0-5.0%
Sasaran Pembangunan Manusia Dan Masyarakat					
Kependudukan dan Keluarga Berencana					
1) Laju Pertumbuhan Penduduk	tidak ada	3.0%	tidak ada	2.5%	1.19%
2) Angka Kelahiran Total / TFR	tidak ada	tidak ada	tidak ada	2.0	2.3
3) Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi semua cara	tidak ada	60% (2021)	tidak ada	45%	66%
Pendidikan					
1) Rata-Rata Lama Sekolah	tidak ada	7.47 tahun	10.93 tahun	7.7 tahun	8.8 tahun
2) Angka Melek Huruf	tidak ada	97.4%	98.6%	95.5%	96.1%
3) Angka Partisipasi Murni SD	tidak ada	97.0%	tidak ada	93.82%	94.8%
4) Angka Partisipasi Kasar SD	tidak ada	115.0%	tidak ada	109.2%	114.1%

Apakah di dalam Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah telah termuat sasaran-sasaran berikut:	Target RPJMD Kab Sorong 2018	Target RPJMD Raja Ampat 2018	Target RPJMD Kota Sorong 2018	Target RPJMD Papua Barat 2018	Target RPJMN 2019
5) Angka Partisipasi Murni SMP	tidak ada	57.0%	tidak ada	72.45%	82.0%
6) Angka Partisipasi Kasar SMP	tidak ada	74.0%	tidak ada	93.88%	106.9%
7) Angka Partisipasi Murni SMA	tidak ada	53.3%	tidak ada	66.1%	67.5%
8) Angka Partisipasi Kasar SMA	tidak ada	72.1%	tidak ada	93.88%	91.6%
Kesehatan					
1. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat					
1) Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran	tidak ada	tidak ada	tidak ada	180	306
2) Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	tidak ada	tidak ada	5	43	24
3) Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	tidak ada	tidak ada	tidak ada	8%	17%
4) Prevalensi stunting anak baduta	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	28%

Apakah di dalam Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah telah termuat sasaran-sasaran berikut:	Target RPJMD Kab Sorong 2018	Target RPJMD Raja Ampat 2018	Target RPJMD Kota Sorong 2018	Target RPJMD Papua Barat 2018	Target RPJMN 2019
---	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------

2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

1) Prevalensi TBC per 100.000 penduduk	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	245
2) Prevalensi HIV	tidak ada	tidak ada	tidak ada	1.9%	< 0.5%
5) Persentase merokok penduduk usia <18 tahun	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	5.4%

Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1) Indeks Pembangunan Gender	tidak ada	tidak ada	tidak ada	92.35	Meningkat
2) Indeks Pemberdayaan Gender	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Meningkat

Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan

Kedaulatan Pangan

1. Produksi Dalam Negeri

1) Produksi Padi (ton)	tidak ada	1.87 ribu	tidak ada	31.65 ribu	82 juta
2) Produksi Jagung (ton)	tidak ada	445	tidak ada	2.8 ribu	24.1 juta

Apakah di dalam Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah telah termuat sasaran-sasaran berikut:	Target RPJMD Kab Sorong 2018	Target RPJMD Raja Ampat 2018	Target RPJMD Kota Sorong 2018	Target RPJMD Papua Barat 2018	Target RPJMN 2019
3) Produksi Kedelai (ton)	tidak ada	50	tidak ada	1.7 ribu	2.6 juta
5) Produksi Daging Sapi (ton)	tidak ada	tidak ada	tidak ada	4,199	755.1 ribu
6) Produksi Ikan – diluar rumput laut (ton)	tidak ada	tidak ada	tidak ada	89.72 ribu	18.8 juta

2. Konsumsi

1) Konsumsi kalori (kkal)	tidak ada	1,867	tidak ada	2,010.93	2,150
2) Konsumsi ikan (kg/kapita/orang)	tidak ada	tidak ada	tidak ada	55.21	54.5

Maritim dan Kelautan

4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

1) Produksi hasil perikanan (ton)	tidak ada	tidak ada	tidak ada	186.49 ribu	40-50 juta
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------------	------------

Pariwisata dan Industri Manufaktur

1. Pariwisata

1) Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	tidak ada	0.75% (2021)	tidak ada	1.4%	8%
---	-----------	--------------	-----------	------	----

Apakah di dalam Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah telah termuat sasaran-sasaran berikut:	Target RPJMD Kab Sorong 2018	Target RPJMD Raja Ampat 2018	Target RPJMD Kota Sorong 2018	Target RPJMD Papua Barat 2018	Target RPJMN 2019
---	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------

2) Jumlah wisatawan mancanegara (orang)	tidak ada	12.5 ribu	tidak ada	25 ribu	20 juta
---	-----------	-----------	-----------	---------	---------

3) Jumlah wisatawan nusantara	tidak ada	tidak ada	tidak ada	104,923 orang	275 juta kunjungan
-------------------------------	-----------	-----------	-----------	---------------	--------------------

2. Industri Manufaktur

1) Pertumbuhan Sektor industri	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	8.6%
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

2) Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	tidak ada	tidak ada	tidak ada	29.5%	21.6%
---	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

2. Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

1) Rasio elektrifikasi	tidak ada	45.0%	tidak ada	79.76%	96.6%
------------------------	-----------	-------	-----------	--------	-------

6) Akses Air Minum Layak	tidak ada	70% (2021)	tidak ada	70%	100%
--------------------------	-----------	------------	-----------	-----	------

7) Akses Sanitasi Layak	tidak ada	30.0%	tidak ada	70%	100%
-------------------------	-----------	-------	-----------	-----	------

3. Lingkungan

2) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	tidak ada	tidak ada	tidak ada	84.51	66.5-68.5
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-----------

Apakah di dalam Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah telah termuat sasaran-sasaran berikut:	Target RPJMD Kab Sorong 2018	Target RPJMD Raja Ampat 2018	Target RPJMD Kota Sorong 2018	Target RPJMD Papua Barat 2018	Target RPJMN 2019
---	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sasaran Pembangunan Dimensi Pemerataan

Menurunkan Kesenjangan Antar Kelompok Ekonomi

1) Tingkat Kemiskinan	tidak ada	20.32%	17.65%	24.27%	7.0-8.0%
2) Tingkat Pengangguran Terbuka	tidak ada	3.0%	tidak ada	5.81%	4.0-5.0%

Meningkatnya Cakupan Pelayanan Dasar dan Akses terhadap Ekonomi Produktif Masyarakat Kurang Mampu

3. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

2) Persentase Tenaga Kerja Formal	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	51.0%
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

Sasaran Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah

1. Kinerja Keuangan Daerah

1) Persentase belanja pegawai	tidak ada	tidak ada	tidak ada	30.0% (2022)	35.0%
2) Persentase pajak retribusi terhadap total pendapatan	tidak ada	tidak ada	tidak ada	1.0% (2022)	11.0%

Apakah di dalam Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah telah termuat sasaran-sasaran berikut:	Target RPJMD Kab Sorong 2018	Target RPJMD Raja Ampat 2018	Target RPJMD Kota Sorong 2018	Target RPJMD Papua Barat 2018	Target RPJMN 2019
4) Persentase belanja modal	tidak ada	tidak ada	tidak ada	20.0% (2022)	30.0%

CAPAIAN INDIKATOR MAKRO DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN KABUPATEN SORONG TERHADAP TARGET RPJM

Tabel 3.18.

Gambaran Umum Status Pencapaian Indikator Makro dan Indikator Pembangunan Kabupaten Sorong Terhadap Target RPJM

Indikator	Capaian 2017	Capaian 2018	Target RPJMD Kab Sorong 2018	Target RPJMD Papua Barat 2018	Target RPJMN 2019	Status Capaian
Sasaran Makro:						
Pembangunan Manusia Dan Masyarakat						
1) Indeks Pembangunan Manusia	63.42	64.32	tidak ada	63.21	76.3	Target RPJMD Provinsi sudah tercapai pada tahun 2017, perlu ditingkatkan untuk mencapai target RPJMN 2019

3) Indeks Rasio Gini	0.40	0.37	tidak ada	0.38	0.36	Target RPJMD Provinsi sudah tercapai pada tahun 2018, perlu ditingkatkan untuk mencapai target RPJMN 2019
4) Persentase penduduk yg menjadi peserta jaminan kesehatan nasional	49.34	53.22	tidak ada	tidak ada	95%	On The Track menuju Target RPJMN 2019
Ekonomi Makro						
1) Pertumbuhan Ekonomi	3.35%	5.68%	tidak ada	7.0%	8.0%	On The Track menuju Target RPJMD Provinsi
2) PDRB Perkapita tahun dasar 2010 (Juta Rupiah)	93.92	96.87	tidak ada	75	72.2	Target RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019 sudah tercapai pada tahun 2017
3) Inflasi	bukan kota inflasi	bukan kota inflasi	tidak ada	4.08%	3.5%	-
4) Rasio Pajak terhadap PDRB tahun dasar 2010			tidak ada	tidak ada	16.0%	On The Track menuju Target RPJMN 2019

5) Tingkat Kemiskinan	32.86%	30.19%	tidak ada	24.27%	7.0-8.0%	On The Track menuju Target RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019
-----------------------	--------	--------	-----------	--------	----------	--

6) Tingkat Pengangguran Terbuka	4.56%	2.98%	tidak ada	6.45%	4.0-5.0%	Target RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019 sudah tercapai pada tahun 2017
---------------------------------	-------	-------	-----------	-------	----------	---

Indikator	Capaian 2017	Capaian 2018	Target RPJMD Kab Sorong 2018	Target RPJMD Papua Barat 2018	Target RPJMN 2019	Status Capaian
-----------	--------------	--------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------	----------------

Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Kependudukan dan Keluarga Berencana

1) Laju Pertumbuhan Penduduk	2.56%	2.46%	tidak ada	2.5%	1.19%	Target RPJMD Provinsi sudah tercapai pada tahun 2018, perlu ditingkatkan untuk mencapai target RPJMN 2019
------------------------------	-------	-------	-----------	------	-------	---

2) Angka Kelahiran Total / TFR	-	-	tidak ada	2.0	2.3	-
--------------------------------	---	---	-----------	-----	-----	---

3) Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi semua cara	12.17%	46.81%	tidak ada	45%	66%	Target RPJMD Provinsi sudah tercapai pada tahun 2018, perlu ditingkatkan untuk mencapai target RPJMN 2019
Pendidikan						
1) Rata-Rata Lama Sekolah	7.61 tahun	7.83 tahun	tidak ada	7.7 tahun	8.8 tahun	Target RPJMD Provinsi sudah tercapai pada tahun 2018, perlu ditingkatkan untuk mencapai target RPJMN 2019
2) Angka Melek Huruf	97.14%	96.89%	tidak ada	95.5%	96.1%	Target RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019 sudah tercapai pada tahun 2018
3) Angka Partisipasi Murni SD	94.20%	96.98%	tidak ada	93.82%	94.8%	Target RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019 sudah tercapai pada tahun 2018

4) Angka Partisipasi Kasar SD	109.13%	111.76%	tidak ada	109.2%	114.1%	Target RPJMD Provinsi sudah tercapai pada tahun 2018, perlu ditingkatkan untuk mencapai target RPJMN 2019
5) Angka Partisipasi Murni SMP	71.84%	73.40%	tidak ada	72.45%	82.0%	Target RPJMD Provinsi sudah tercapai pada tahun 2018, perlu ditingkatkan untuk mencapai target RPJMN 2019
6) Angka Partisipasi Kasar SMP	87.89%	94.15%	tidak ada	93.88%	106.9%	Target RPJMD Provinsi sudah tercapai pada tahun 2018, perlu ditingkatkan untuk mencapai target RPJMN 2019
7) Angka Partisipasi Murni SMA	67.56%	65.58%	tidak ada	66.1%	67.5%	On The Track menuju Target RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019

Indikator	Capaian 2017	Capaian 2018	Target RPJMD Kab Sorong 2018	Target RPJMD Papua Barat 2018	Target RPJMN 2019	Status Capaian
8) Angka Partisipasi Kasar SMA	93.18%	90.51%	tidak ada	93.88%	91.6%	On The Track menuju Target RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019
Kesehatan						
1) Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat						
1) Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran	102	-	tidak ada	180	306	Target RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019 sudah tercapai pada tahun 2017
2) Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	22	-	tidak ada	43	24	Target RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019 sudah tercapai pada tahun 2017
3) Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	-	-	tidak ada	8%	17%	
4) Prevalensi stunting anak baduta	-	-	tidak ada	tidak ada	28%	
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular						

1) Prevalensi TBC per 100.000 penduduk	181	-	tidak ada	tidak ada	245	Target RPJMN 2019 sudah tercapai pada tahun 2017
2) Prevalensi HIV	-	-	tidak ada	1.9%	< 0.5%	
5) Persentase merokok penduduk usia <18 tahun	-	-	tidak ada	tidak ada	5.4%	

Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1) Indeks Pembangunan Gender	85.33	85.58	tidak ada	92.35	Meningkat	On The Track menuju Target RPJMD Provinsi
2) Indeks Pemberdayaan Gender	50.06	54.38	tidak ada	tidak ada	Meningkat	Target RPJMN 2019 sudah tercapai

Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan

Kedaulatan Pangan

1. Produksi Dalam Negeri

1) Produksi Padi (ton)	7,439	687	tidak ada	31.65 ribu	82 juta	Perlu usaha lebih besar dan perhatian khusus
2) Produksi Jagung (ton)	891	3,254	tidak ada	2.8 ribu	24.1 juta	Perlu usaha lebih besar dan perhatian khusus
3) Produksi Kedelai (ton)	14	1	tidak ada	1.7 ribu	2.6 juta	Perlu usaha lebih besar dan perhatian khusus

Indikator	Capaian 2017	Capaian 2018	Target RPJMD Kab Sorong 2018	Target RPJMD Papua Barat 2018	Target RPJMN 2019	Status Capaian
5) Produksi Daging Sapi (ton)	831.2	446.6	tidak ada	4,199	755.1 ribu	Perlu usaha lebih besar dan perhatian khusus
6) Produksi Ikan – diluar rumput laut (ton)	28.04 ribu	1.03 ribu	tidak ada	89.72 ribu	18.8 juta	Perlu usaha lebih besar dan perhatian khusus

2. Konsumsi

1) Konsumsi kalori (kcal)	-	-	tidak ada	2,010.93	2,150	
2) Konsumsi ikan (kg/kapita/orang)	-	-	tidak ada	55.21	54.5	

Maritim dan Kelautan

4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

1) Produksi hasil perikanan (ton)	5.39 ribu	-	tidak ada	186.49 ribu	40-50 juta	Perlu usaha lebih besar dan perhatian khusus
-----------------------------------	-----------	---	-----------	-------------	------------	--

Pariwisata dan Industri Manufaktur

1. Pariwisata

1) Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	0.25%	0.25%	tidak ada	1.4%	8%	On The Track menuju Target RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019
---	-------	-------	-----------	------	----	--

2) Jumlah wisatawan mancanegara (orang)	-	-	tidak ada	25 ribu	20 juta
---	---	---	-----------	---------	---------

3) Jumlah wisatawan nusantara	-	-	tidak ada	104,923 orang	275 juta kunjungan
-------------------------------	---	---	-----------	---------------	--------------------

2. Industri Manufaktur

1) Pertumbuhan Sektor industri	4.77%	5.45%	tidak ada	tidak ada	8.6%	On The Track menuju Target RPJMN 2019
--------------------------------	-------	-------	-----------	-----------	------	---------------------------------------

2) Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	43.82%	44.52%	tidak ada	29.5%	21.6%	Target RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019 sudah tercapai pada tahun 2017
---	--------	--------	-----------	-------	-------	---

Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

2. Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

1) Rasio elektrifikasi	-	-	tidak ada	79.76%	96.6%
------------------------	---	---	-----------	--------	-------

6) Akses Air Minum Layak	50.62%	55.39%	tidak ada	70%	100%	On The Track menuju Target RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019
--------------------------	--------	--------	-----------	-----	------	--

7) Akses Sanitasi Layak	-	-	tidak ada	70%	100%
-------------------------	---	---	-----------	-----	------

3. Lingkungan

Indikator	Capaian 2017	Capaian 2018	Target RPJMD Kab Sorong 2018	Target RPJMD Papua Barat 2018	Target RPJMN 2019	Status Capaian
2) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	tidak ada	84.51	66.5-68.5	

Sasaran Pembangunan Dimensi Pemerataan

Menurunkan Kesenjangan Antar Kelompok Ekonomi

1) Tingkat Kemiskinan	32.86%	30.19%	tidak ada	24.27%	7.0-8.0%	On The Track menuju Target RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019
2) Tingkat Pengangguran Terbuka	4.56%	2.98%	tidak ada	6.45%	4.0-5.0%	Target RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019 sudah tercapai pada tahun 2017

Meningkatnya Cakupan Pelayanan Dasar dan Akses terhadap Ekonomi Produktif Masyarakat Kurang Mampu

3. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

2) Persentase Tenaga Kerja Formal	76.73	77.38	tidak ada	tidak ada	51.0%	Target RPJMN 2019 sudah tercapai pada tahun 2017
-----------------------------------	-------	-------	-----------	-----------	-------	--

Sasaran Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah

1. Kinerja Keuangan Daerah

1) Persentase belanja pegawai	27.41%	54.73%	tidak ada	30.0% (2022)	35.0%	Perlu usaha lebih besar dan perhatian khusus
2) Persentase pajak retribusi terhadap total pendapatan	0.25%	0.22%	tidak ada	1.0% (2022)	11.0%	On The Track menuju Target RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019
4) Persentase belanja modal	24.71	29.25	tidak ada	20.0% (2022)	30.0%	Target RPJMD Provinsi sudah tercapai pada tahun 2017, perlu ditingkatkan untuk mencapai target RPJMN 2019

CAPAIAN INDIKATOR MAKRO DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN KABUPATEN RAJA AMPAT TERHADAP TARGET RPJM

Tabel 3.19.

Gambaran Umum Status Pencapaian Indikator Makro dan Indikator Pembangunan Kabupaten Raja Ampat Terhadap Target RPJM

Indikator	Capaian 2017	Capaian 2018	Target RPJMD Raja Ampat 2018	Target RPJMD Papua Barat 2018	Target RPJMN 2019	Status Capaian
Sasaran Makro:						
Pembangunan Manusia Dan Masyarakat						
1) Indeks Pembangunan Manusia	62.35	62.84	62.07	63.21	76.3	Target RPJMD Raja Ampat sudah tercapai pada tahun 2017, perlu ditingkatkan untuk mencapai target RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019
3) Indeks Rasio Gini	0.4	0.39	0.35	0.38	0.36	On The Track menuju Target RPJMD Raja Ampat, RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019
4) Persentase penduduk yg menjadi peserta jaminan kesehatan nasional	-	-	tidak ada	tidak ada	95%	

Ekonomi Makro						
1) Pertumbuhan Ekonomi	-0.01	4.35	6.0%	7.0%	8.0%	On The Track menuju Target RPJMD Raja Ampat, RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019
2) PDRB Perkapita tahun dasar 2010 (Juta Rupiah)	45.11	46.50	56.98	75	72.22	On The Track menuju Target RPJMD Raja Ampat, RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019
3) Inflasi	bukan kota inflasi	bukan kota inflasi	6.0%	4.08%	3.5%	-
4) Rasio Pajak terhadap PDRB tahun dasar 2010	0.26%	0.16%	tidak ada	tidak ada	16.0%	Perlu usaha lebih besar dan perhatian khusus
5) Tingkat Kemiskinan	20.00%	17.80%	20.32%	24.27%	7.0-8.0%	Target RPJMD Raja Ampat dan RPJMD Provinsi sudah tercapai pada tahun 2017, perlu ditingkatkan untuk mencapai target RPJMN 2019
6) Tingkat Pengangguran Terbuka	3.10%	3.22%	3.0%	6.45%	4.0-5.0%	Target RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019 sudah tercapai pada tahun 2017, perlu ditingkatkan untuk mencapai target RPJMD Raja Ampat

Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat						
Kependudukan dan Keluarga Berencana						
1) Laju Pertumbuhan Penduduk	1.48%	1.23%	3.0%	2.5%	1.19%	Target RPJMD Raja Ampat dan RPJMD Provinsi sudah tercapai pada tahun 2017, perlu ditingkatkan untuk mencapai target RPJMN 2019
2) Angka Kelahiran Total / TFR	-	-	tidak ada	2.0	2.3	
3) Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi semua cara	10.51%	20.51%	60% (2021)	45%	66%	Perlu usaha lebih besar dan perhatian khusus
Pendidikan						
1) Rata-Rata Lama Sekolah	7.57 tahun	7.63 tahun	7.47 tahun	7.7 tahun	8.8 tahun	Target RPJMD Raja Ampat sudah tercapai pada tahun 2017, perlu ditingkatkan untuk mencapai target RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019
2) Angka Melek Huruf	96.98%	98.75%	97.4%	95.5%	96.1%	Target RPJMD Raja Ampat, RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019 sudah tercapai

3) Angka Partisipasi Murni SD	92.65%	92.79%	97.0%	93.82%	94.8%	On The Track menuju Target RPJMD Raja Ampat, RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019
4) Angka Partisipasi Kasar SD	123.78%	115.40%	115.0%	109.2%	114.1%	Target RPJMD Raja Ampat, RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019 sudah tercapai
5) Angka Partisipasi Murni SMP	51.52%	51.08%	57.0%	72.45%	82.0%	On The Track menuju Target RPJMD Raja Ampat, RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019
6) Angka Partisipasi Kasar SMP	78.04%	68.51%	74.0%	93.88%	106.9%	On The Track menuju Target RPJMD Raja Ampat, RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019
7) Angka Partisipasi Murni SMA	44.86%	45.33%	53.3%	66.1%	67.5%	On The Track menuju Target RPJMD Raja Ampat, RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019
8) Angka Partisipasi Kasar SMA	68.46%	89.19%	72.1%	93.88%	91.6%	Target RPJMD Raja Ampat sudah tercapai pada tahun 2018, perlu ditingkatkan untuk mencapai target RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019
Kesehatan						

1. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat						
1) Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran	758	-	tidak ada	180	306	Perlu usaha lebih besar dan perhatian khusus
2) Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	23	-	tidak ada	43	24	Target RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019 sudah tercapai
3) Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	-	-	tidak ada	8%	17%	
4) Prevalensi stunting anak baduta	-	-	tidak ada	tidak ada	28%	
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular						
1) Prevalensi TBC per 100.000 penduduk	23	-	tidak ada	tidak ada	245	Target RPJMN 2019 sudah tercapai pada tahun 2017
2) Prevalensi HIV	-	-	tidak ada	1.9%	< 0.5%	
5) Persentase merokok penduduk usia <18 tahun	-	-	tidak ada	tidak ada	5.4%	
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan						
1) Indeks Pembangunan Gender	76.67	77.00	tidak ada	92.35	Meningkat	Perlu usaha lebih besar dan perhatian khusus

2) Indeks Pemberdayaan Gender	70.35	69.55	tidak ada	tidak ada	Meningkat	Perlu usaha lebih besar dan perhatian khusus
Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan						
Kedaulatan Pangan						
1. Produksi Dalam Negeri						
1) Produksi Padi (ton)	916	66	1.87 ribu	31.65 ribu	82 juta	Perlu usaha lebih besar dan perhatian khusus
2) Produksi Jagung (ton)	134	-	445	2.8 ribu	24.1 juta	Perlu usaha lebih besar dan perhatian khusus
3) Produksi Kedelai (ton)	87	6	50	1.7 ribu	2.6 juta	Perlu usaha lebih besar dan perhatian khusus
5) Produksi Daging Sapi (ton)	83.3	46.8	tidak ada	4,199	755.1 ribu	Perlu usaha lebih besar dan perhatian khusus
6) Produksi Ikan – diluar rumput laut (ton)	22.67 ribu	22.65 ribu	tidak ada	89.72 ribu	18.8 juta	Perlu usaha lebih besar dan perhatian khusus
2. Konsumsi						
1) Konsumsi kalori (kkal)			1,867	2,010.93	2,150	
2) Konsumsi ikan (kg/kapita/orang)			tidak ada	55.21	54.5	
Maritim dan Kelautan						
4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan						
1) Produksi hasil perikanan (ton)	6.82 ribu	2.67 ribu	tidak ada	186.49 ribu	40-50 juta	Perlu usaha lebih besar dan perhatian khusus

Pariwisata dan Industri Manufaktur						
1. Pariwisata						
1) Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	0.66%	0.66%	0.75% (2021)	1.4%	8%	On The Track menuju Target RPJMD Raja Ampat, RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019
2) Jumlah wisatawan mancanegara (orang)	-	-	12.5 ribu	25 ribu	20 juta	
3) Jumlah wisatawan nusantara	-	-	tidak ada	104,923 orang	275 juta kunjungan	
2. Industri Manufaktur						
1) Pertumbuhan Sektor industri	5.73%	1.91%	tidak ada	tidak ada	8.6%	Perlu usaha lebih besar dan perhatian khusus
2) Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	0.86%	0.82%	tidak ada	29.5%	21.6%	Perlu usaha lebih besar dan perhatian khusus
Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas						
2. Infrastruktur Dasar dan Konektivitas						
1) Rasio elektrifikasi	-	-	45.0%	79.76%	96.6%	
6) Akses Air Minum Layak	29.56%	36.14%	70% (2021)	70%	100%	On The Track menuju Target RPJMD Raja Ampat, RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019

7) Akses Sanitasi Layak	-	-	30.0%	70%	100%	
3. Lingkungan						
2) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	tidak ada	84.51	66.5-68.5	
Sasaran Pembangunan Dimensi Pemerataan						
Menurunkan Kesenjangan Antar Kelompok Ekonomi						
1) Tingkat Kemiskinan	20.00%	17.80%	20.32%	24.27%	7.0-8.0%	Target RPJMD Raja Ampat dan RPJMD Provinsi sudah tercapai pada tahun 2017, perlu ditingkatkan untuk mencapai target RPJMN 2019
2) Tingkat Pengangguran Terbuka	3.10%	3.22%	3.0%	6.45%	4.0-5.0%	Target RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019 sudah tercapai pada tahun 2017, perlu ditingkatkan untuk mencapai target RPJMD Raja Ampat
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Dasar dan Akses terhadap Ekonomi Produktif Masyarakat Kurang Mampu						
3. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja						
2) Persentase Tenaga Kerja Formal	86.12%	89.97%	tidak ada	tidak ada	51.0%	Target RPJMN 2019 sudah tercapai pada tahun 2017

Sasaran Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah

1. Kinerja Keuangan Daerah

1) Persentase belanja pegawai	29.94%	32.56%	tidak ada	30.0% (2022)	35.0%	Target RPJMD Provinsi 2022 sudah tercapai pada tahun 2018, perlu ditingkatkan untuk mencapai target RPJMN 2019
2) Persentase pajak retribusi terhadap total pendapatan	4.59%	0.91%	tidak ada	1.0% (2022)	11.0%	Perlu perhatian khusus untuk mencapai Target RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019
4) Persentase belanja modal	30.14%	32.67%	tidak ada	20.0% (2022)	30.0%	Target RPJMD Provinsi dan RPJMN 2019 sudah tercapai pada tahun 2017

CAPAIAN INDIKATOR MAKRO DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN KOTA SORONG TERHADAP TARGET RPJM

Tabel 3.20.

Gambaran Umum Status Pencapaian Indikator Makro dan Indikator Pembangunan Kota Sorong Terhadap Target RPJM

Indikator	Capaian 2017	Capaian 2018	Target RPJMD Kota Sorong 2018	Target RPJMD Papua Barat 2018	Target RPJMN 2019	Status Capaian
Sasaran Makro:						
Pembangunan Manusia Dan Masyarakat						
1) Indeks Pembangunan Manusia			tidak ada	63,21	76,3	
3) Indeks Rasio Gini			tidak ada	0,38	0,36	
4) Persentase penduduk yg menjadi peserta jaminan kesehatan nasional			tidak ada	tidak ada	95%	
Ekonomi Makro						
1) Pertumbuhan Ekonomi			tidak ada	7,0%	8,0%	
2) PDRB Perkapita tahun dasar 2010 (Ribu Rupiah)			tidak ada	75.000	72,217	
3) Inflasi			tidak ada	4,08%	3,5%	

4) Rasio Pajak terhadap PDRB tahun dasar 2010			tidak ada	tidak ada	16.0%	
5) Tingkat Kemiskinan			17.65%	24.27%	7.0-8.0%	
6) Tingkat Pengangguran Terbuka			tidak ada	6.45%	4.0-5.0%	
Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat						
Kependudukan dan Keluarga Berencana						
1) Laju Pertumbuhan Penduduk			tidak ada	2.5%	1.19%	
2) Angka Kelahiran Total / TFR			tidak ada	2.0	2.3	
3) Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi semua cara			tidak ada	45%	66%	
Pendidikan						
1) Rata-Rata Lama Sekolah			10.93 tahun	7.7 tahun	8.8 tahun	
Indikator	Capaian 2017	Capaian 2018	Target RPJMD Kota Sorong 2018	Target RPJMD Papua Barat 2018	Target RPJMN 2019	Status Capaian
2) Angka Melek Huruf			98.6%	95.5%	96.1%	
3) Angka Partisipasi Murni SD			tidak ada	93.82%	94.8%	

4) Angka Partisipasi Kasar SD	tidak ada	109.2%	114.1%
5) Angka Partisipasi Murni SMP	tidak ada	72.45%	82.0%
6) Angka Partisipasi Kasar SMP	tidak ada	93.88%	106.9%
7) Angka Partisipasi Murni SMA		66.1%	67.5%
8) Angka Partisipasi Kasar SMA		93.88%	91.6%
Kesehatan	tidak ada		
1. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	5		
1) Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran	tidak ada	180	306
2) Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	tidak ada	43	24
3) Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita		8%	17%
4) Prevalensi stunting anak baduta	tidak ada	tidak ada	28%

2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	tidak ada		
1) Prevalensi TBC per 100.000 penduduk	tidak ada	tidak ada	245
2) Prevalensi HIV		1.9%	< 0.5%
5) Persentase merokok penduduk usia <18 tahun	tidak ada	tidak ada	5.4%
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	tidak ada		
1) Indeks Pembangunan Gender		92.35	Meningkat
2) Indeks Pemberdayaan Gender		tidak ada	Meningkat
Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan			
Kedaulatan Pangan	tidak ada		
1. Produksi Dalam Negeri	tidak ada		
1) Produksi Padi (ton)	tidak ada	31.65 ribu	82 juta
2) Produksi Jagung (ton)	tidak ada	2.8 ribu	24.1 juta

Indikator	Capaian 2017	Capaian 2018	Target RPJMD Kota Sorong 2018	Target RPJMD Papua Barat 2018	Target RPJMN 2019	Status Capaian
3) Produksi Kedelai (ton)			tidak ada	1.7 ribu	2.6 juta	
5) Produksi Daging Sapi (ton)			tidak ada	4,199	755.1 ribu	
6) Produksi Ikan – diluar rumput laut (ton)			tidak ada	89.72 ribu	18.8 juta	
2. Konsumsi						
1) Konsumsi kalori (kkal)			tidak ada	2,010.93	2,150	
2) Konsumsi ikan (kg/kapita/orang)			tidak ada	55.21	54.5	
Maritim dan Kelautan						
4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan						
1) Produksi hasil perikanan (ton)			tidak ada	186.49 ribu	40-50 juta	
Pariwisata dan Industri Manufaktur						
1. Pariwisata						
1) Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB			tidak ada	1.4%	8%	
2) Jumlah wisatawan mancanegara (orang)			tidak ada	25 ribu	20 juta	

3) Jumlah wisatawan nusantara	tidak ada	104,923 orang	275 juta kunjungan			
2. Industri Manufaktur						
1) Pertumbuhan Sektor industri	tidak ada	tidak ada	8.6%			
2) Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	tidak ada	29.5%	21.6%			
Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas						
2. Infrastruktur Dasar dan Konektivitas						
1) Rasio elektrifikasi	tidak ada	79.76%	96.6%			
6) Akses Air Minum Layak	tidak ada	70%	100%			
7) Akses Sanitasi Layak	tidak ada	70%	100%			
3. Lingkungan						
2) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	tidak ada	84.51	66.5-68.5			
Sasaran Pembangunan Dimensi Pemerataan						
Indikator	Capaian 2017	Capaian 2018	Target RPJMD Kota Sorong 2018	Target RPJMD Papua Barat 2018	Target RPJMN 2019	Status Capaian
Menurunkan Kesenjangan Antar Kelompok Ekonomi						
1) Tingkat Kemiskinan		17.65%	24.27%	7.0-8.0%		

2) Tingkat Pengangguran Terbuka	tidak ada	5.81%	4.0-5.0%
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Dasar dan Akses terhadap Ekonomi Produktif Masyarakat Kurang Mampu			
3. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja			
2) Persentase Tenaga Kerja Formal	tidak ada	tidak ada	51.0%
Sasaran Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan			
Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah			
1. Kinerja Keuangan Daerah			
1) Persentase belanja pegawai	tidak ada	30.0% (2022)	35.0%
2) Persentase pajak retribusi terhadap total pendapatan	tidak ada	1.0% (2022)	11.0%
4) Persentase belanja modal	tidak ada	20.0% (2022)	30.0%



04

ANALISIS APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam pembiayaan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan pencapaian pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan nasional, stabilitas perekonomian dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Dalam prakteknya APBN memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Setiap penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara maka harus dimasukkan ke dalam APBN. Apabila terjadi surplus penerimaan negara maka bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran yang berikutnya.

Mengacu pada penjelasan di atas, penjelasan dari masing-masing fungsi APBN sebagai berikut :

1. Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja negara di tahun yang bersangkutan. Dengan demikian maka pembelanjaan atau pendapatan bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

2. Fungsi Perencanaan mengandung arti bahwa APBN dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan di tahun yang bersangkutan. Sehingga apabila anggaran pembelanjaan telah direncanakan maka negara dapat membuat rencana rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut.
3. Fungsi Pengawasan memiliki makna bahwa pembuatan rencana anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Sehingga dengan begitu akan mudah bagi masyarakat untuk menilai Apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara sudah dapat dibenarkan atau tidak.
4. Fungsi Alokasi berarti anggaran negara harus diarahkan pada pengurangan pemborosan sumber daya serta pengangguran dan juga meningkatkan Efisiensi dan efektivitas perekonomian. Pada pelaksanaannya fungsi alokasi dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya, efektifitas, serta efisiensi perekonomian. Misalnya, pembuatan jalan/ jembatan/ tanggul, dan juga perbaikan jalan/ jembatan/ tanggul.
5. Fungsi Distribusi sebagai kebijakan dalam memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pada pelaksanaannya fungsi distribusi dalam hal ini dilakukan dengan mempergunakan uang negara untuk kepentingan kemanusiaan, seperti; subsidi, dana pensiun, dan premi.
6. Fungsi Stabilisasi sebagai alat dalam pemeliharaan serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian NKRI. Dalam pelaksanaannya, fungsi stabilisasi ini dilakukan dengan menjaga arus uang maupun barang untuk mencegah laju inflasi dan deflasi yang terlalu besar.

4.1. APBN PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Pendapatan pemerintah pusat di Provinsi Papua Barat terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Realisasinya pada tahun 2018 mencapai Rp 2.465 miliar atau turun 2.2 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan ini antara lain dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional yang masih dalam tahap pemulihan (*economic recovery*) sehingga memberikan dampak terhadap penerimaan negara di Provinsi Papua Barat belum maksimal sehingga belum mencapai target; ketergantungan penerimaan negara terhadap sumber daya alam (*natural resources*) yang rentan terhadap harga pada pasar komoditas; pelaksanaan proses produksi masih belum ditunjang dengan inovasi daerah sehingga mempengaruhi penerimaan negara.

Penerimaan perpajakan pemerintah pusat tingkat provinsi terdiri atas penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak dalam negeri di Provinsi Papua Barat terdiri dari PPh Perseorangan, PPh Badan, PBB, PPN dan Pajak Lainnya. Sementara itu, di Provinsi Papua Barat tidak memiliki penerimaan negara berupa pajak perdagangan internasional. Berikut ini target dan realisasi penerimaan perpajakan pemerintah pusat di Provinsi Papua Barat tahun 2017 – 2018:

Belanja pemerintah pusat merupakan bagian dari belanja negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah pusat baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah. Belanja pemerintah pusat dapat dibedakan menjadi belanja pemerintah pusat menurut organisasi, belanja pemerintah pusat menurut fungsi, dan belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja.

Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara. Penerima alokasi APBN di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 adalah 45 Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan 1 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) sehingga jumlah seluruhnya adalah 46 Bagian Anggaran (BA).

Jumlah total dana APBN yang dialokasikan untuk Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan dari Rp 9.954 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp 10.065,42 miliar pada tahun 2018 atau naik 1.12 persen. Hal ini dikarenakan terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada alokasi belanja kementerian perhubungan. Adapun pagu belanja APBN terbesar pada tahun 2018 di Provinsi Papua Barat dialokasikan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan masing-masing sebesar Rp 2.392,9 miliar dan Rp 1.059,94 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk akselerasi pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua Barat seperti penyelesaian jalan trans Papua, jembatan, waduk dan irigasi. Walaupun memiliki alokasi terbesar, pagu Kementerian Pekerjaan Umum mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan penurunan yang cukup signifikan pada pagu belanja modal disebabkan proyek-proyek infrastruktur strategis di Provinsi Papua Barat telah memasuki tahap akhir penyelesaian, sehingga alokasi belanja modal pada proyek-proyek tersebut semakin berkurang.

Belanja pemerintah pusat dapat dibagi menjadi 11 fungsi antara lain fungsi pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan dan

perlindungan sosial. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan alokasi belanja

APBN di Provinsi Papua Barat yang dialami beberapa fungsi diantaranya fungsi ketertiban & keamanan, pendidikan, perumahan & fasilitas umum, pertahanan, lingkungan hidup, kesehatan, perlindungan sosial dan pariwisata & budaya.

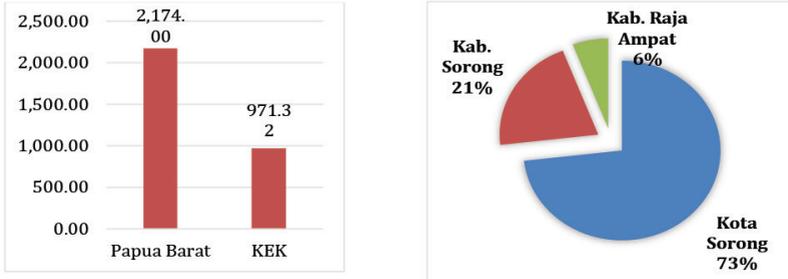
Alokasi belanja terbesar tahun 2018 yaitu pada fungsi pelayanan umum yaitu sebesar Rp 3.623,83 miliar. Hal tersebut cukup relevan mengingat *core bussiness* dari pemerintah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga alokasi belanja pada fungsi tersebut harus sejalan dengan peningkatan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Penerimaan perpajakan pemerintah pusat tingkat provinsi terdiri atas penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak dalam negeri di Provinsi Papua Barat terdiri dari PPh Persorangan, PPh Badan, PBB, PPN dan Pajak Lainnya, sedangkan penerimaan negara berupa pajak perdagangan internasional belum ada. Realisasi penerimaan perpajakan pemerintah pusat di Provinsi Papua Barat mengalami penurunan sebesar 4,01 persen yaitu dari Rp 2.265 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp2.174 miliar pada tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh penurunan realisasi pada jenis pajak PPN Dalam Negeri dan PPh non migas lainnya.

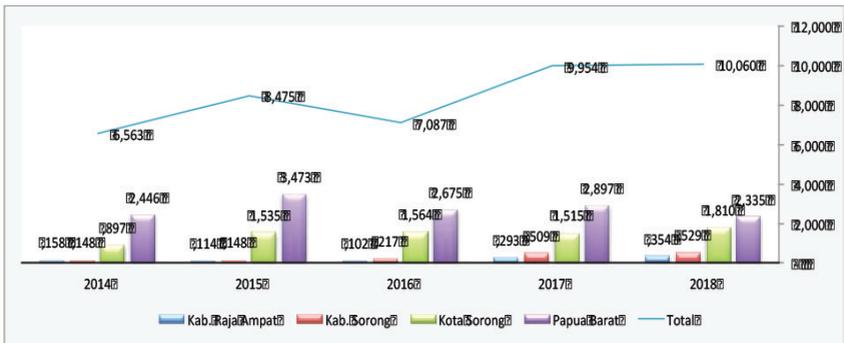
Penerimaan kedua jenis pajak tersebut sangat ditentukan oleh kondisi perekonomian dimana pada tahun 2018 masih dalam tahap pemulihan (*economic recovery*). Dari keseluruhan jenis pajak pemerintah pusat yang ada di Provinsi Papua Barat, PPN Dalam Negeri masih mendominasi jumlah penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp 1.107 miliar atau 50,89 persen dari total penerimaan pajak pemerintah pusat. Kemudian diikuti PPh perseorangan sebesar Rp 473,78 miliar atau 33,14 persen dari total penerimaan pajak pemerintah pusat dengan kontribusi terbesar berasal dari penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Final.

Realisasi penerimaan pajak tertinggi pada tahun 2018 yaitu Kota Sorong dan Kab. Manokwari masing-masing sebesar Rp 710,71 miliar dan Rp 603,45 miliar. Kontribusi penerimaan pajak kawasan KEK terhadap Provinsi Papua Barat sebesar Rp 971,32miliar dengan Kota Sorong yang memberikan kontribusi terbesar mencapai 73 persen sedangkan Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat masing-masing 21 persen dan 6 persen. (Gambar 4.1)

Gambar 4.1. Kontribusi Penerimaan Pajak Provinsi dan KEK



Pagu Anggaran APBN untuk tingkat provinsi Papua Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung berfluktuasi, dimana pada tahun 2017 sempat mengalami penurunan. Jika dilihat untuk proporsi APBN pada Kota Sorong paling besar dibandingkan Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat yakni dengan nilai rata-rata sekitar Rp 1 triliun per tahun. Sedangkan Kabupaten Sorong rata-rata sebesar Rp 310 Miliar per tahun dan Kabupaten Raja Ampat yakni dengan nilai rata-rata Rp 204 Miliar per tahun.



Gambar 4.2. Perolehan Pagu Anggaran APBN, 2014 – 2018

Sumber: APBN Provinsi Papua Barat, 2014 – 2018 (Data diolah)

Dana Realisasi APBN untuk tingkat provinsi Papua Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung berfluktuasi, dimana pada tahun 2017 mengalami penurunan seiring dengan penurunan Pagu Anggaran APBN. Realisasi APBN pada Kota Sorong memiliki nilai rata-rata sekitar Rp 1 triliun per tahun. Sedangkan Kabupaten Sorong

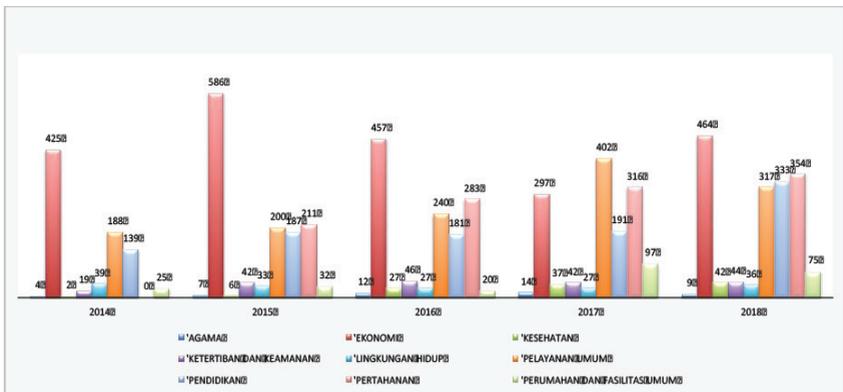
rata-rata sebesar Rp 291 Milliar per tahun dan Kabupaten Raja Ampat yakni dengan nilai rata-rata Rp 195 Milliar per tahun. (Gambar 4.2).



Gambar 4.3. Dana Realisasi APBN, 2014 – 2018

Sumber: APBN Provinsi Papua Barat, 2014 – 2018 (Data diolah)

Dana yang dibelanjakan oleh pemerintah pusat di Kota Sorong paling tinggi yakni pada tahun 2018 sebesar Rp 1,6 Triliun (Gambar 4.3). Pengelolaan dana pemerintah pusat di Kota Sorong jika dilihat dari fungsinya dalam kurun waktu lima tahun terakhir, alokasi belanja pusat di daerah lebih banyak dimanfaatkan untuk fungsi ekonomi yaitu rata-rata sebesar Rp 445 Milliar per tahunnya atau sekitar 34 persen dari total belanja. (Gambar 4.4).

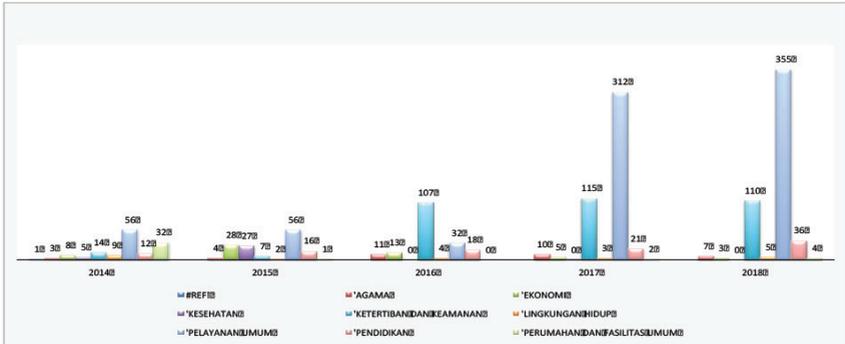


Gambar 4.4.

Dana APBN yang dibelanjakan di Kota Sorong, 2014 – 2018

Sumber: APBN Provinsi Papua Barat, 2014 – 2018 (Data diolah)

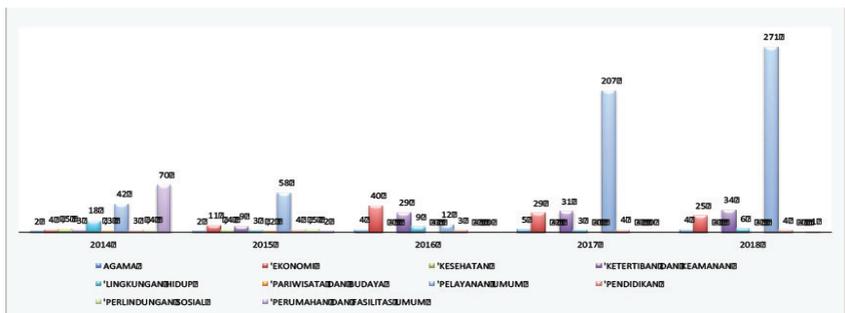
Dana yang dibelanjakan oleh pemerintah pusat di Kabupaten Sorong sebesar Rp 291 Milliar. Pengelolaan dana tersebut di Kabupaten Sorong jika dilihat dari fungsinya, maka alokasi belanja pusat di daerah lebih banyak dimanfaatkan untuk fungsi pelayanan umum yaitu dengan nilai rata-rata sebesar Rp 162 Milliar per tahunnya atau sekitar 56 persen dari total belanja.



Gambar 4.5. Dana APBN yang dibelanjakan di Kabupaten Sorong, 2014 – 2018

Sumber: APBN Provinsi Papua Barat, 2014 – 2018 (Data diolah)

Dana yang dibelanjakan oleh pemerintah pusat di Kabupaten Raja Ampat rata-rata hanya sebesar Rp 195 Milliar per tahun. Dapat dilihat pada Gambar 4.6 , bahwa untuk pengelolaan dana tersebut di Kabupaten Raja Ampat tidak dialokasikan pada fungsi kesehatan, pariwisata dan budaya, serta perlindungan sosial selamatiga tahun terakhir, yakni tahun 2016 sampai dengan 2018. Alokasi belanja pusat di Kabupaten Raja Ampat lebih banyak dimanfaatkan untuk fungsi pelayanan umum yaitu dengan nilai rata-rata sebesar Rp 118 Milliar per tahunnya atau sekitar 61 persen dari total belanja.



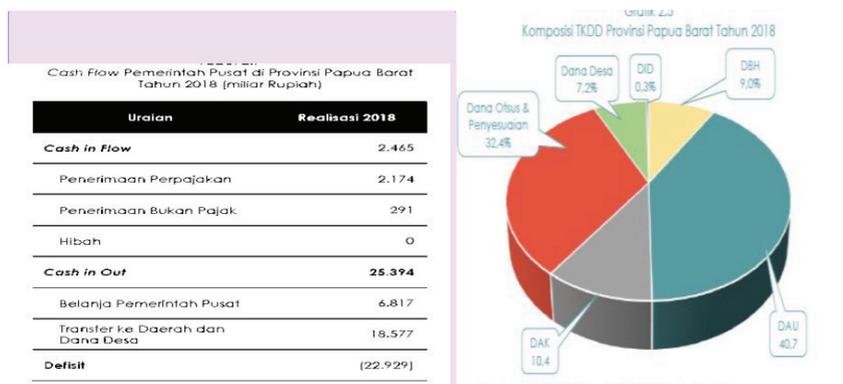
Gambar 4.6. Dana APBN yang dibelanjakan di Kabupaten Raja Ampat, 2014 – 2018

Sumber: APBN Provinsi Papua Barat, 2014 – 2018 (Data diolah)

4.2. ANALISIS CASH FLOW PEMERINTAH PUSAT

Cash flow pemerintah pusat menggambarkan kondisi arus kas masuk (*cash in flow*) dan arus kas keluar (*cash out flow*) yang dilakukan oleh pemerintah pusat pada suatu daerah dan periode waktu tertentu. Arus kas masuk pemerintah pusat adalah semua penerimaan yang diterima oleh pemerintah pusat dari pemerintah daerah provinsi tertentu sedangkan arus kas keluar adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi tertentu. Yang termasuk dalam arus kas masuk bagi pemerintah pusat adalah semua penerimaan negara yang diterima oleh pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi tertentu seperti penerimaan pajak, PNBP, dan hibah. Yang termasuk dalam arus kas keluar pemerintah pusat adalah semua belanja pemerintah pusat dalam APBN yang terdiri dari belanja KP/KD/DK/TP/UB dan dana transfer untuk provinsi berkenaan. Berikut ini cash flow pemerintah pusat di Provinsi Papua Barat Tahun 2018, *Cash in Flow* Pemerintah Pusat di Provinsi Papua Barat sebesar Rp 2.465 miliar, sedangkan *Cash in Out* sebesar Rp 25.322 miliar sehingga dalam hal ini di Provinsi Papua Barat mengalami defisit yang cukup besar mencapai Rp 22.857 miliar, dapat dilihat pada Gambar 4.7. Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan Provinsi Papua Barat kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi, sehingga memerlukan subsidi silang dari daerah lain yang mengalami surplus.

Gambar 4.7. Cash Flow Pemerintah Pusat di Provinsi Papua Barat Tahun 2018



Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat memberikan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada pemerintah daerah. Transfer ke Daerah terbagi menjadi (1) dana perimbangan; (2) dana insentif daerah (DID) dan (3) dana otonomi khusus.. Adapun dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil

(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana yang diberikan pemerintah pusat kepada Provinsi Papua Barat dalam bentuk TKDD jumlahnya semakin meningkat. Pada tahun 2017, total realisasi TKDD yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar Rp 19,3 triliun. Kemudian jumlahnya meningkat menjadi Rp 17,8 triliun pada tahun 2018 atau naik sebesar 29,9 persen. Hal ini menunjukkan bentuk

Berdasarkan komposisinya, komponen terbesar dari TKDD Provinsi Papua Barat berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2018, komponen DAU menyumbang 40,7 persen dari total keseluruhan TKDD yang diterima Provinsi Papua Barat. Komponen terbesar kedua yaitu Dana Otonomi Khusus & Penyesuaian sebesar 32,4 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan Provinsi Papua Barat terhadap pemerintah pusat sangat tinggi, (Gambar 4.8).

Kedadaan ini patut diwaspadai mengingat pengalaman sebagian besar daerah yang memiliki ketergantungan tinggi pada dana transfer akan lebih memilih status quo terhadap penerimaan dari pemerintah pusat.

Gambar 4.8. Pagu dan Realisasi Dana Transfer Tahun 2017 – 2018
Provinsi Papua Barat

Uraian	2017		2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
DBH	4.349	3.191	1.776	1.676
DAU	7.933	7.933	7.963	7.556
DAK	2.296	2.023	2.241	1.936
Dana Otsus & DID	3.334	3.334	6.436	6.079
Dana Desa	1.364	1.364	1.330	1.330
Total	19.275	17.844	19.746	18.577



05

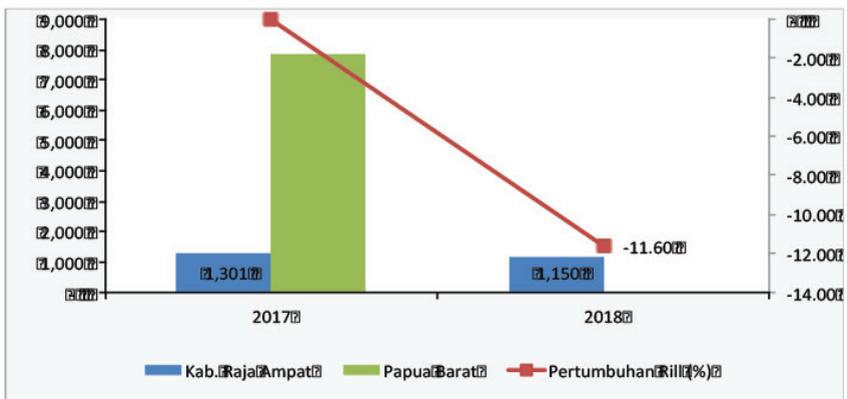
ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode. Analisis varians pendapatan pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja keuangan pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif dan kecenderungan (*trend*) meningkat. Sebaliknya. Jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan bahwa terjadi penurunan kinerja keuangan pendapatan daerah..

5.1. ANALISIS PENDAPATAN KABUPATEN RAJA AMPAT

5.1.1. Gambaran Umum Pendapatan Daerah

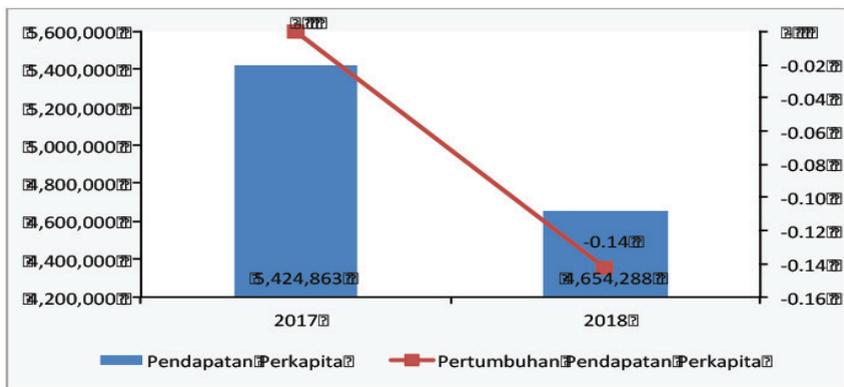
Pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Raja Ampat cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2018, dari Rp 1.301 Milliar di tahun 2017 menjadi Rp 1.150 Milliar di tahun 2018 (Gambar 5.1). Hal ini dikarenakan adanya penurunan yang cukup signifikan pada bagian lain-lain penerimaan yang sah, yakni dari Rp 329 Milliar di tahun 2017 menjadi Rp 125 Milliar pada tahun berikutnya. Penurunan ini disebabkan porsi bagian lain-lain penerimaan yang sah dalam hal ini pos pendapatan hibah mengalami penurunan.



Gambar 5.1 Total dan Pertumbuhan Pendapatan Rill Daerah Kabupaten Raja Ampat, 2017 – 2018

Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, 2017 – 2018 (Data diolah)

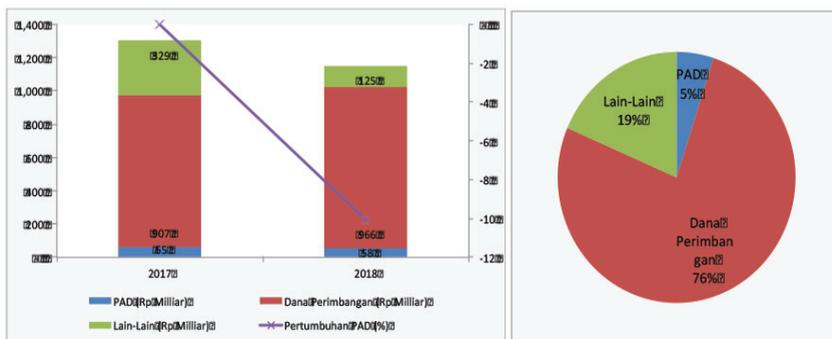
Pertumbuhan pendapatan perkapita Kabupaten Raja Ampat cenderung menurun pada dua tahun terakhir. Pendapatan perkapita Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2017 mencapai Rp 5,424,863, namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan yakni sebesar Rp 4,654,288. Penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan pendapatan daerah. (Gambar 5.2)



Gambar 5.2 Total dan Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Kabupaten Raja Ampat, 2017– 2018 *Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, 2017– 2018 (Data diolah)*

5.1.2. Struktur Pendapatan Riil

Pada periode 2017 – 2018, pendapatan daerah riil Kabupaten Raja Ampat didominasi oleh pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan. Dana perimbangan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak, DAU dan DAK sebesar 76 persen. Sementara lain-lain sebesar 19 persen dan PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah hanya sebesar 5 persen. (Gambar 5.3)

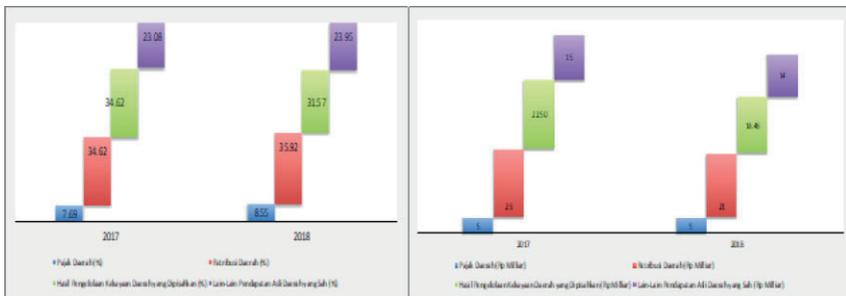


Gambar 5.3 Perkembangan Pendapatan Daerah Riil dan Proporsinya Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Raja Ampat, 2017 – 2018

Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, 2017 – 2018 (Data diolah)

5.1.3. Komposisi Pendapatan Asli Daerah

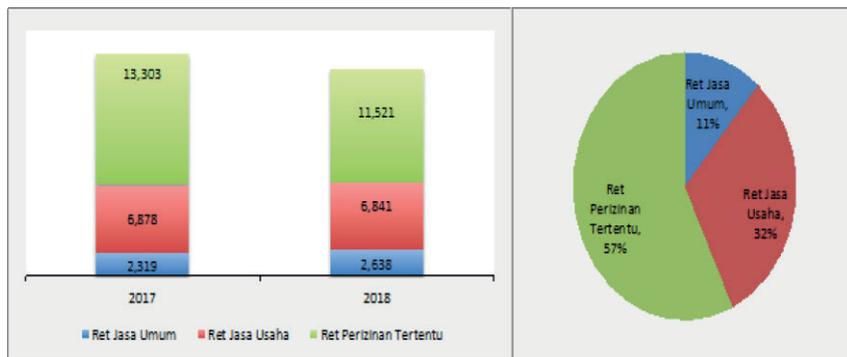
Komposisi PAD Kabupaten Raja Ampat didominasi oleh Retribusi Daerah. Dapat dilihat pada gambar berikut bahwa retribusi daerah mendominasi dengan rata-rata sebesar 35 persen, diikuti dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 33 persen, lain-lain PAD yang sah 23 persen dan pajak daerah sebesar 8 persen. Dengan rendahnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Raja Ampat menunjukkan bahwa banyak komponen-komponen penerimaan yang bersumber dari berbagai jenis pajak belum dimaksimalkan dan dikelola dengan baik. (Gambar 5.4)



Gambar 5.4 Komposisi dan Proporsi PAD Kabupaten Raja Ampat, 2017 – 2018

Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, 2017 – 2018 (Data diolah)

Retribusi daerah Kabupaten Raja Ampat cenderung menurun pada tahun 2018. Retribusi daerah didominasi oleh retribusi perizinan tertentu yakni sebesar 57 persen, kemudian diikuti dengan retribusi jasa usaha sebesar 32 persen dan retribusi jasa umum sebesar 11 persen, Gambar 5.5. Penurunan porsi retribusi daerah pada tahun 2018 menunjukkan bahwa penanganan terhadap sumber pendapatan tersebut masih perlu dibenahi sehingga paling tidak iklim ekonomi daerah dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi penerimaan daerah.



Gambar 5.5 Komposisi dan Proporsi Retribusi Daerah Kabupaten Raja Ampat, 2017 – 2018

Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, 2017 – 2018 (Data diolah)

Kontribusi pajak daerah di Kabupaten Raja Ampat memiliki kontribusi yang kecil terhadap PAD yakni sebesar 8 persen. Walaupun demikian dapat dilihat bahwa potensi pajak daerah yang dapat memberikan tambahan kontribusi sudah diperoleh. Dimana nominal total pajak daerah cenderung sama di dua tahun terakhir yakni sebesar Rp 5 Miliar, dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Perolehan Sumber-Sumber pajak Daerah Kabupaten Raja Ampat 2017 – 2018 (dalam Rp Juta)

Komponen Pajak Daerah	2017	2018
Pajak Hotel	2,077	2,077
Pajak Restoran	595	595
Pajak Hiburan	18	18
Pajak Reklame	35	35
Pajak Pengerangan Jalan	477	477
Logam dan Batuan	1,344	1,344
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	420	420
Bangunan (BPHTB)	35	35
Total Pajak Daerah	5,000	5,000

Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, 2017 – 2018

Perolehan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan secara nominal mengalami penurunan pada tahun 2018. Secara proporsional sumber dana dari dana perimbangan merupakan penyumbang terbesar terhadap pendapatan rill Kabupaten Raja Ampat setelah PAD (Gambar 5.3). Dimana sumber terbesar dari dana

perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan rata-rata kontribusi sebesar 70.27 persen. Pendapatan daerah yang bersumber dari DAU tersebut cenderung meningkat di dua tahun terakhir, yakni dari Rp 649 Milliar di tahun 2017 menjadi Rp 667 Milliar di tahun 2018. Sementara untuk pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan kontribusi rata-rata sebesar 16.57 persen. Pendapatan daerah yang bersumber dari DAK juga meningkat di dua tahun terakhir, yakni dari Rp 136 Milliar menjadi Rp 175 Milliar di tahun berikutnya, Gambar 5.6.



Gambar 5.6 Perkembangan & Komposisi Dana Perimbangan Rill Kabupaten Raja Ampat, 2017 – 2018

Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, 2017 – 2018 (Data diolah)

Perolehan dana bagi hasil pajak/bukan pajak terhadap dana perimbangan Kabupaten Raja Ampat menurun di tahun 2018. Nominal perolehan dana bagi hasil pajak menurun pada tahun 2018 dari Rp 20 Milliar menjadi Rp 16 Milliar, Gambar 5.7. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan sumber-sumber bagi hasil pajak dan aktivitas ekonomi masyarakat.

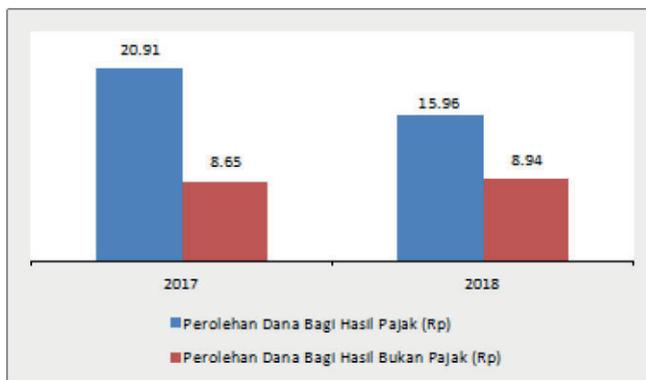


Gambar 5.7

Perolehan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Raja Ampat, 2017 – 2018

Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, 2017 – 2018 (Data diolah)

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak cenderung meningkat di dua tahun terakhir yakni dengan memberikan nominal rata-rata kontribusi sebesar Rp 8.80 Milliar (Gambar 5.8). Perolehan dana bagi hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan eksploitasi sumberdaya pada tahun 2018 dimana ada peningkatan dari Rp8. 65 Milliar di tahun 2017 menjadi Rp 8.94 Milliar.

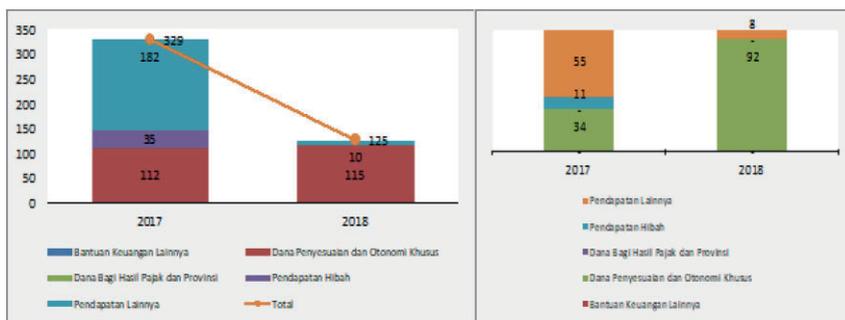


Gambar 5.8

Perkembangan Bagian Lain-Lain Penerimaan yang Sah Kab. Raja Ampat, 2017 – 2018

Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, 2017 – 2018 (Data diolah)

Bagian lain-lain penerimaan yang sah menurun pada tahun 2018 (Gambar 5.8). Hal ini dikarenakan adanya penurunan dana penyesuaian dan otonomi khusus, pendapatan hibah dan pendapatan lainnya.



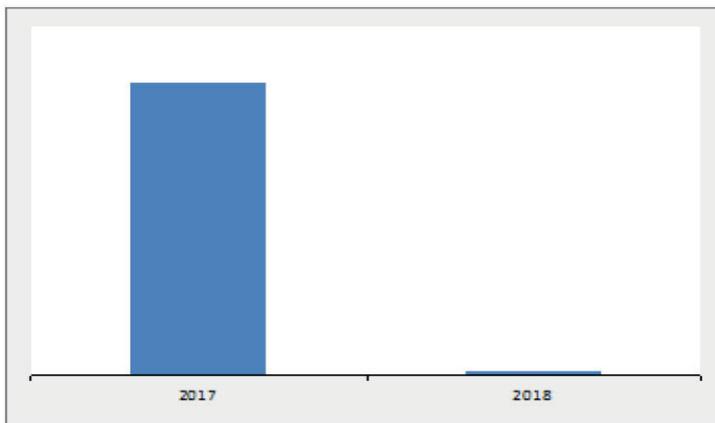
Gambar 5.9 Proporsi Bagian Lain-Lain Penerimaan yang Sah di Kabupaten Raja Ampat, 2017 – 2018

Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, 2017 – 2018 (Data diolah)

Sepanjang dua tahun terakhir perolehan dana penyesuaian dan otonomi khusus mendominasi komponen lain-lain penerimaan yang sah yakni rata-rata sebesar 50 persen. Secara nominal nilai riil dana penyesuaian dan otonomi khusus mengalami peningkatan di tahun 2018 dari Rp 112 Milliar menjadi Rp 115 Milliar. Sementara pendapatan lainnya yang juga cukup besar dengan rata-rata 42 persen. Namun pada tahun 2018 nominal riil pendapatan lainnya menurun signifikan dari Rp 182 Milliar menjadi Rp 10 Milliar, Gambar 5.9. Walaupun demikian perkembangan sumber lain-lain penerimaan riilnya mengalami penurunan. Kondisi ini disebabkan kontribusi pendapatan hibah dan pendapatan lainnya tidak stabil.

5.1.4. Analisis Surplus/Defisit APBD

APBD Kabupaten Raja Ampat mencapai surplus periode 2017 dan 2018. Surplus pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 (Gambar 5.10). Pembiayaan surplus dicapai tidak semata-mata sebagai sebuah kebijakan keuangan daerah, tetapi karena daya serap anggaran oleh pemerintah daerah yang rendah. Adanya surplus yang besar menunjukkan mekanisme perencanaan penganggaran yang masih perlu dibenahi sehingga *surplus* tidak melebihi 6 persen sesuai dengan standar pengelolaan keuangan daerah.



Gambar 5.10 Perkembangan Surplus dan Defisit APBD di Kabupaten Raja Ampat, 2017 – 2018

Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, 2017 – 2018 (Data diolah)

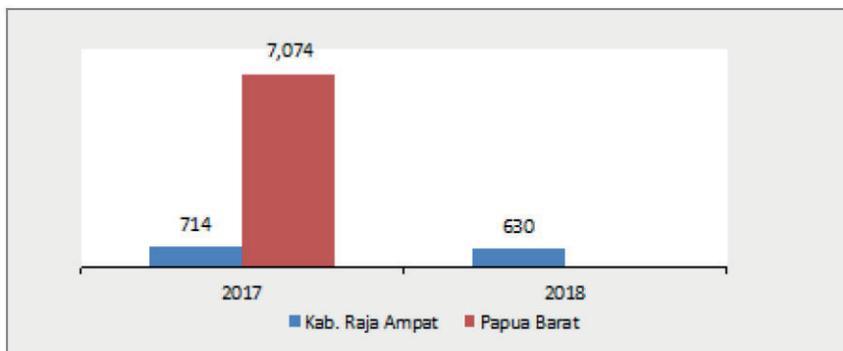
5.1.5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pendapatan rill Kabupaten Raja Ampat cenderung mengalami penurunan pada tahun 2018. Penurunan pada tahun 2018 disebabkan oleh porsi bagian lain-lain penerimaan yang sah. Penurunan ini disebabkan porsi bagian lain-lain penerimaan yang sah yakni pos pendapatan hibah mengalami penurunan. Dana perimbangan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan rill Kabupaten Raja Ampat selama dua tahun terakhir. Struktur pendapatan daerah terutama terkait dengan kontribusi pajak masih cukup rendah. Hal tersebut perlu penanganan lebih optimal. Pada sepanjang tahun masih diperoleh surplus yang melebihi standar sehingga perlu dilakukan pembenahan terhadap mekanisme perencanaan penganggaran yang memadai sehingga perolehan surplus masih pada batas yang wajar.

5.2. ANALISIS BELANJA KABUPATEN RAJA AMPAT

5.2.1. Gambaran Umum Belanja Daerah

Secara umum, realisasi belanja rill di Kabupaten Raja Ampat mengalami penurunan di tahun 2018. Pada tahun 2018 realisasi belanja rill mengalami penurunan seiring dengan menurunnya pendapatan daerah karena adanya penurunan pada pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PAD. Pada tahun 2018 porsi belanja menurun dari Rp 714 Milliar menjadi Rp 630 Milliar. Dengan demikian, selama kurun waktu 2017 – 2018, rata-rata belanja rill Rp 448 Milliar (Gambar 5.11).



Gambar 5.11 Perkembangan Total Belanja Rill Kabupaten Raja Ampat dan Posisi Relatif terhadap Provinsi Papua Barat tahun 2017 – 2018

Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, 2017 – 2018 (Data diolah)

Belanja per kapita Kabupaten Raja Ampat dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2018 cenderung mengalami penurunan seiring dengan adanya penurunan pada total belanja daerah. Pada tahun 2017 belanja per kapita mencapai Rp 2,976,610, kemudian turun menjadi Rp 2,550,272 di tahun 2018 (Gambar 5.12). Kondisi ini menggambarkan bahwa alokasi belanja untuk setiap penduduk yang menurun. Selama periode 2017 – 2018, belanja per kapita Kabupaten Raja Ampat secara rata-rata Rp 2,763,441. Besarnya belanja per kapita di Kabupaten Raja Ampat diharapkan akan berimplikasi terhadap perbaikan pelayanan publik maupun aktivitas ekonomi yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Raja Ampat.

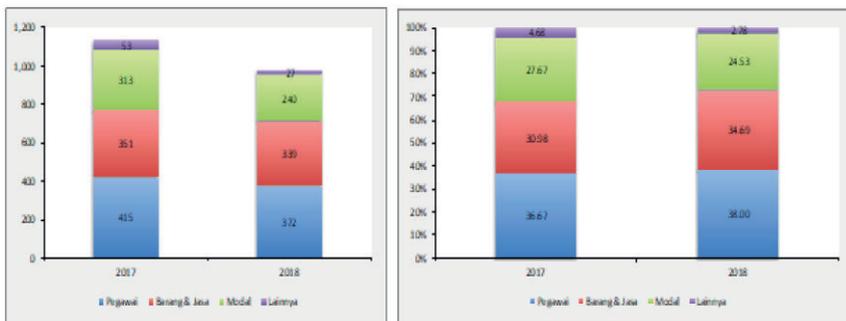


Gambar 5.12 Belanja Perkapita Kabupaten Raja Ampat, 2017 – 2018

Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, 2017 – 2018 (Data diolah)

5.2.2. Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi

Alokasi belanja rill berdasarkan klasifikasi ekonomi didominasi oleh belanja modal pegawai selama dua tahun terakhir. Selama kurun waktu 2017 sampai 2018, porsi alokasi belanja pegawai rata-rata 37.33 persen per tahun, disusul oleh belanja barang dan jasa sebesar 32.84 persen per tahun. Secara nominal porsi belanja pegawai mengalami penurunan, dimana dari Rp 415 Milliar di tahun 2017 menjadi Rp 372 Milliar di tahun 2018. Pada periode yang sama alokasi belanja barang dan jasa juga menurun dari Rp 351 Milliar di tahun 2017 menjadi Rp 339 Milliar di tahun 2018 (Gambar 5.13).

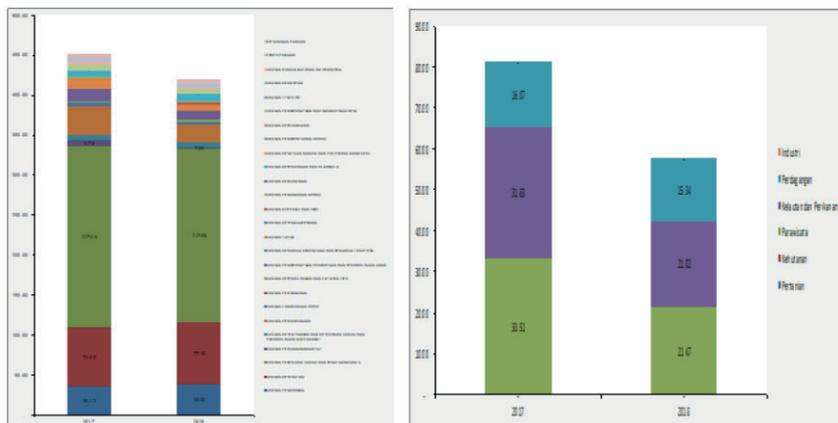


Gambar 5.13 Komposisi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Kabupaten Raja Ampat, 2017 – 2018

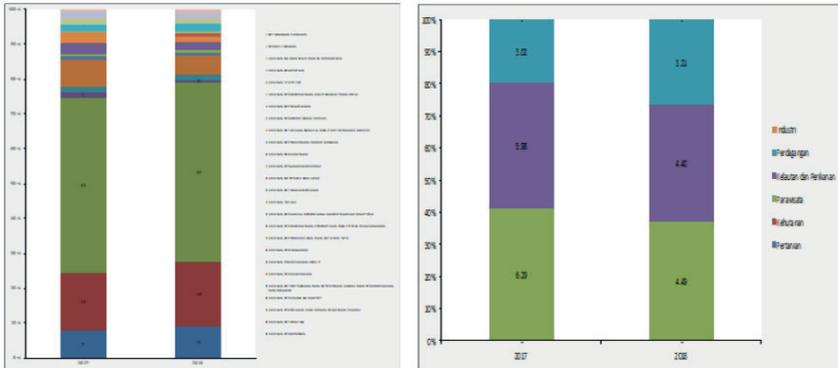
Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, 2017 – 2018 (Data diolah)

5.2.3. Belanja Sektoral di Kabupaten

Sektor pekerjaan umum memperoleh alokasi belanja yang cukup besar dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dengan rata-rata Rp 222 Miliar atau 44,04 persen dari total belanja. Namun penurunan belanja sektor pekerjaan umum di tahun 2018 mendorong peningkatan porsi belanja untuk sektor kesehatan. Pada tahun 2018, porsi belanja untuk sektor kesehatan mencapai 16 persen (Gambar 5.14).



Gambar 5.14 Perkembangan Belanja Sektoral di Kabupaten Raja Ampat, 2017 – 2018 *Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, 2017 – 2018 (Data diolah)*



Gambar 5.15 Proporsi Belanja Sektoral Terhadap Total Belanja di Kabupaten Raja Ampat, 2017 – 2018

Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, 2017 – 2018 (Data diolah)

Alokasi belanja sektoral yang paling rendah adalah sektor penanaman modal dengan rata-rata belanja adalah Rp 1.79 Milliar (0.36 persen). Dapat dilihat juga ada beberapa sektor lain yang sebagai leading sektor tetapi memperoleh porsi belanja yang kecil seperti pariwisata, kelautan dan perikanan dan perdagangan (Gambar 5.15). Kondisi ini menggambarkan bahwa kebijakan anggaran tidak pro terhadap sektor prioritas daerah. Maka dari itu, diperlukan adanya perencanaan dan penganggaran secara terintegrasi ke depannya agar sektor prioritas memperoleh dukungan pembiayaan.

5.2.4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Belanja daerah di Kabupaten Raja Ampat mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan rata-rata belanja rill sebesar Rp 672 Milliar. Berdasarkan klasifikasi ekonomi, proporsi belanja terbesar dialokasikan untuk belanja modal, sementara alokasi berdasarkan sektor terbesar adalah sektor pekerjaan umum. Akan tetapi pada tahun 2018, terjadi pergeseran alokasi belanja ke sektor pemerintahan umum. Sektor yang berpotensi sebagai *leading* sektor seperti sektor pariwisata, kelautan dan perikanan dan perdagangan kurang memperoleh dukungan pembiayaan. Untuk mendorong perekonomian di Kabupaten Raja Ampat, direkomendasikan beberapa kegiatan berupa: (i) perlu dukungan kebijakan pembiayaan untuk leading sektor atau sektor prioritas, (ii) penghematan belanja barang dan jasa, (iii) pengalokasian belanja untuk sektor-sektor yang menjadi prioritas perlu disinkronkan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah sehingga visi dan misi pembangunan senantiasa mendapat dukungan pembiayaan yang memadai.

5.3. ANALISIS PENDAPATAN KABUPATEN SORONG

5.3.1. Gambaran Umum Pendapatan Daerah

Pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Sorong cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018 pertumbuhan pendapatan daerah mengalami perbaikan dengan pertumbuhan sebesar 49.52 persen. Penurunan yang cukup drastis terjadi pada tahun 2017, dimana pada tahun 2016 pendapatan daerah dari Rp 1,429 miliar turun menjadi Rp 948 miliar (Gambar 5.16). Penurunan ini disebabkan porsi pendapatan asli daerah dalam hal ini pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan. Sedangkan jika dibandingkan dengan pendapatan Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan pada tahun 2017.



Gambar 5.16 Total dan Pertumbuhan Pendapatan Rill Daerah Kabupaten Sorong, 2016 – 2018

Sumber: APBD Kabupaten Sorong, 2016 – 2018 (Data diolah)

Pertumbuhan pendapatan perkapita Kabupaten Sorong berfluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Pendapatan perkapita Kabupaten Sorong pada tahun 2016 mencapai Rp 6,139,535, namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan dan meningkat kembali pada tahun 2018, sehingga cenderung berfluktuasi (Gambar 5.17). Fluktuasi tersebut dikarenakan adanya penurunan pendapatan daerah.

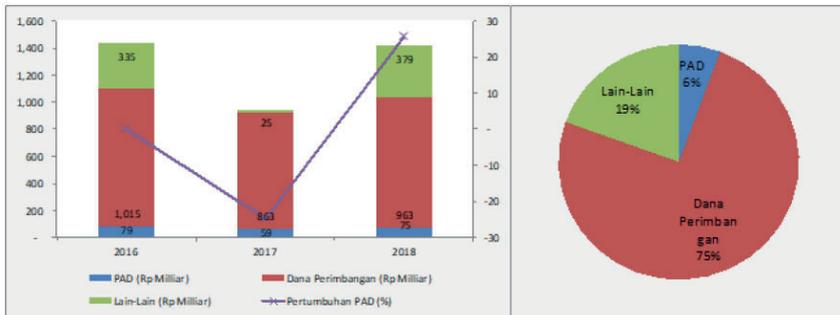


Gambar 5.17 Total dan Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Kabupaten Sorong, 2016 – 2018

Sumber: APBD Kabupaten Sorong, 2016 – 2018 (Data diolah)

5.3.2. Struktur Pendapatan Riil

Pada periode 2016 – 2018, pendapatan daerah riil Kabupaten Sorong didominasi oleh pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan. Dana perimbangan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak, DAU dan DAK sebesar 75 persen (Gambar 5.18). Sementara lain-lain sebesar 19 persen dan PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah hanya sebesar 6 persen.

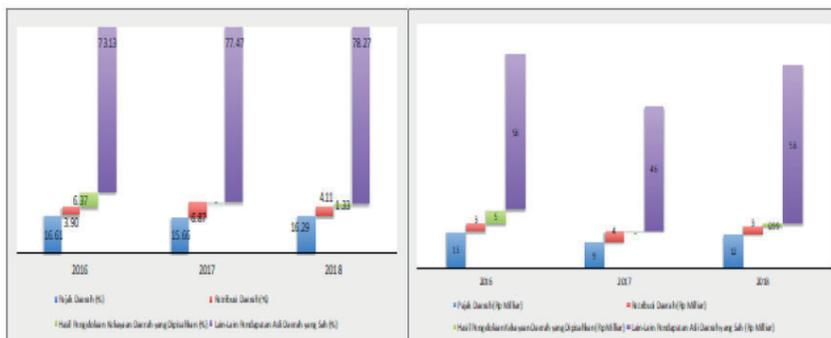


Gambar 5.18 Perkembangan Pendapatan Daerah Riil dan Proporsinya Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong, 2016 – 2018

Sumber: APBD Kabupaten Sorong, 2016 – 2018 (Data diolah)

5.3.3. Komposisi Pendapatan Asli Daerah

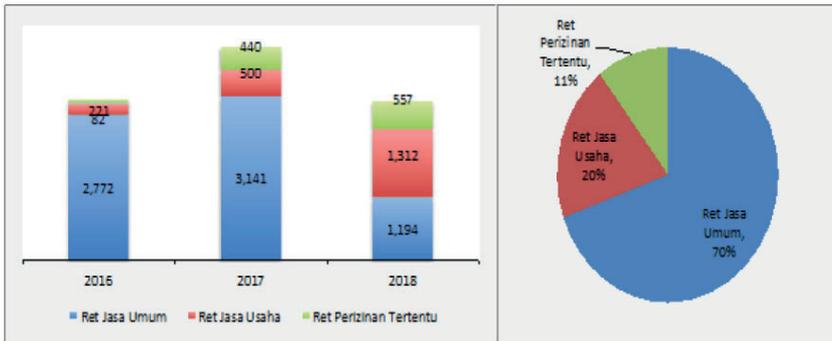
Komposisi PAD Kabupaten Sorong didominasi oleh Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Lain-lain pendapatan PAD yang sah mengalami penurunan pada tahun 2017, sebaliknya pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dari Rp 59 Milliar menjadi Rp 75 Milliar. Dapat dilihat bahwa komposisi Lain-Lain PAD yang sah mendominasi dengan kontribusi rata-rata 76.29 persen, diikuti dengan pajak daerah dengan rata-rata 16.18 persen, retribusi daerah 4.95 persen dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 2.56 persen (Gambar 5.19). Dengan rendahnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Sorong menunjukkan bahwa banyak komponen-komponen penerimaan yang bersumber dari berbagai jenis pajak yang belum dimaksimalkan dan dikelola dengan baik.



Gambar 5.19 Komposisi dan Proporsi PAD Kabupaten Sorong, 2016 – 2018

Sumber: APBD Kabupaten Sorong, 2016 – 2018 (Data diolah)

Retribusi daerah Kabupaten Sorong cenderung menurun pada tahun 2018, dimana persinya terhadap PAD hanya mencapai 4.11 persen. Walaupun rendah namun retribusi daerah masih memberikan sumbangan terhadap PAD Kabupaten Sorong, dimana retribusi daerah didominasi oleh retribusi jasa umum (Gambar 5.20). Penurunan porsi retribusi daerah pada tahun 2018 menunjukkan bahwa penanganan terhadap sumber pendapatan tersebut masih perlu dibenahi sehingga paling tidak iklim ekonomi daerah dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi penerimaan daerah.



Gambar 5.20 Komposisi dan Proporsi Retribusi Daerah Kabupaten Sorong, 2016 – 2018

Sumber: APBD Kabupaten Sorong, 2016 – 2018 (Data diolah)

Kontribusi pajak daerah di Kabupaten Sorong cukup kecil dikarenakan sepanjang tahun pajak daerah mengalami fluktuatif. Dimana pada tahun 2017 menurun dari Rp 13 Milliar menjadi Rp 9 Milliar, kemudian meningkat kembali di tahun berikutnya menjadi Rp 12 Milliar (Tabel 5.2). Fluktuasi ini disebabkan karena masih banyak pajak daerah yang belum memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah. Potensi pajak daerah yang dapat memberikan tambahan kontribusi antara lain pajak hotel, hiburan dan bahan galian golongan C. Oleh karena itu perlu penanganan lebih optimal sehingga sumber-sumber pajak tersebut dapat diperoleh.

Komponen Pajak Daerah	2016	2017	2018
Hotel	-	-	-
Restoran	0.81	1.41	1.04
Hiburan	-	-	-
Reklame	0.30	0.31	1.26
Penerangan Jalan	2.24	2.79	3.33
Bahan Galian Golongan C	0.21	-	0.11
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.85	1.90	1.57
Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan	7.18	2.90	2.91
Total Pajak Daerah	13.10	9.30	12.15

Tabel 5.2 Perolehan Sumber-Sumber pajak Daerah Kabupaten Sorong, 2016 – 2018 (dalam Rp Milliar)

Sumber: APBD Kabupaten Sorong, 2016 – 2018

Perolehan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan secara nominal mengalami penurunan pada tahun 2017, namun meningkat kembali pada tahun berikutnya. Secara proporsional sumber dana dari dana perimbangan merupakan penyumbang terbesar terhadap pendapatan riil Kabupaten Sorong setelah PAD (Gambar 5.21). Dimana sumber terbesar dari dana perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan rata-rata kontribusi sebesar 53.91 persen. Pendapatan daerah yang bersumber dari DAU tersebut cenderung fluktuatif selama tiga tahun terakhir, sehingga proporsinya terhadap pembentukan pendapatan riil kabupaten juga cenderung fluktuatif. Untuk pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga cenderung fluktuatif dengan kontribusi rata-rata 22.54 persen.



Gambar 5.21

Perkembangan dan Komposisi Dana Perimbangan Riil Kabupaten Sorong, 2016 – 2018

Sumber: APBD Kabupaten Sorong, 2016 – 2018 (Data diolah)

Perolehan dana bagi hasil pajak/bukan pajak terhadap dana perimbangan Kabupaten Sorong fluktuatif dalam tiga tahun terakhir dengan rata-rata 23.55 persen terhadap dana perimbangan. Nominal perolehan dana bagi hasil pajak menurun pada tahun 2016 dari Rp 192 Milliar menjadi Rp 132 Milliar pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018 meningkat sebesar Rp 154 Milliar (Gambar 5.22). Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan sumber-sumber bagi hasil pajak dan aktivitas ekonomi masyarakat.

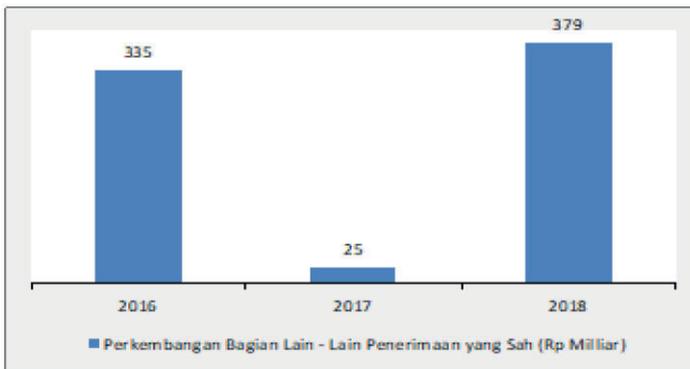


Gambar 5.22

Perolehan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Sorong, 2016 – 2018

Sumber: APBD Kabupaten Sorong, 2016 – 2018 (Data diolah)

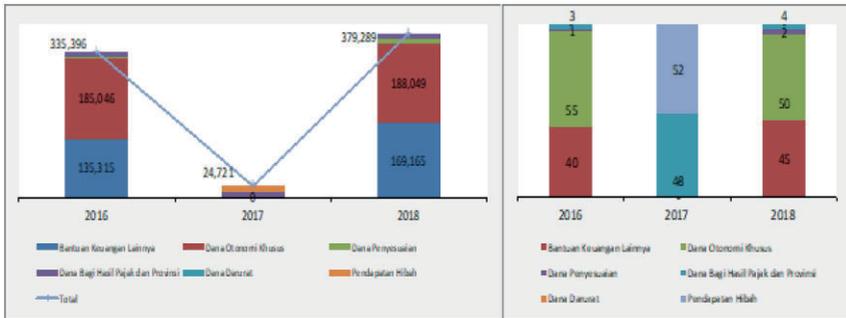
Dana bagi hasil bukan pajak cenderung fluktuatif selama tahun 2016 hingga 2018 dengan memberikan nominal rata-rata kontribusi sebesar Rp189 Milliar. Perolehan dana bagi hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan eksploitasi sumberdaya pada tahun 2017 dimana ada peningkatan dari Rp49 Milliar di tahun 2016 menjadi Rp72 Milliar. Namun kemudian turun pada tahun 2018 menjadi Rp66 Milliar.



Gambar 5.23 Perkembangan Bagian Lain-Lain Penerimaan yang Sah Kabupaten Sorong, 2016 – 2018

Sumber: APBD Kabupaten Sorong, 2016 – 2018 (Data diolah)

Bagian lain-lain penerimaan yang sah selama 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, bagian lain-lain penerimaan yang sah menurun drastis dikarenakan menurunnya dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lain (Gambar 5.23).



Gambar 5.24

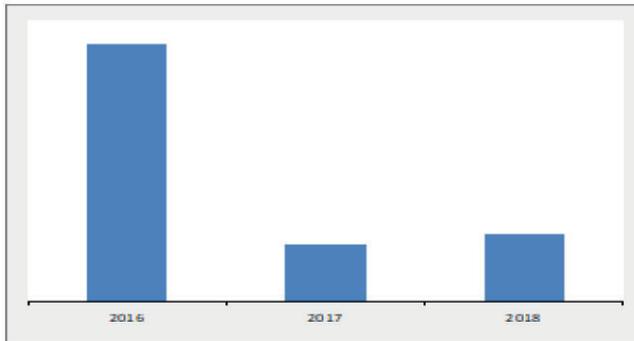
Proporsi Bagian Lain-Lain Penerimaan yang Sah di Kabupaten Sorong, 2016 – 2018

Sumber: APBD Kabupaten Sorong, 2016 – 2018 (Data diolah)

Sepanjang tahun 2016 hingga 2018 perolehan dana otonomi khusus mendominasi komponen lain-lain penerimaan yang sah. Secara nominal nilai riil dana otonomi khusus mengalami penurunan di tahun 2017, begitu juga dengan nominal nilai riil dana bantuan keuangan lainnya dan dana penyesuaian (Gambar 5.24). Walaupun demikian perkembangan sumber lain-lain penerimaan riilnya mengalami fluktuasi. Kondisi ini disebabkan kontribusi dana penyesuaian, bantuan keuangan lainnya, dana otonomi khusus dan pendapatan hibah yang tidak stabil dari tahun ke tahun.

5.3.4. Analisis Surplus/Defisit APBD

APBD Kabupaten Sorong mencapai surplus selama periode 2016 – 2018. Surplus pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2016 (Gambar 5.25). Pembiayaan surplus dicapai tidak semata-mata sebagai sebuah kebijakan keuangan daerah, tetapi karena daya serap anggaran oleh pemerintah daerah yang rendah. Adanya *surplus* yang besar menunjukkan mekanisme perencanaan penganggaran yang masih perlu dibenahi sehingga surplus tidak melebihi 6 persen sesuai dengan standar pengelolaan keuangan daerah.



Gambar 5.25 Perkembangan Surplus dan Defisit APBD di Kabupaten Sorong, 2016 – 2018

Sumber: APBD Kabupaten Sorong, 2016 – 2018 (Data diolah)

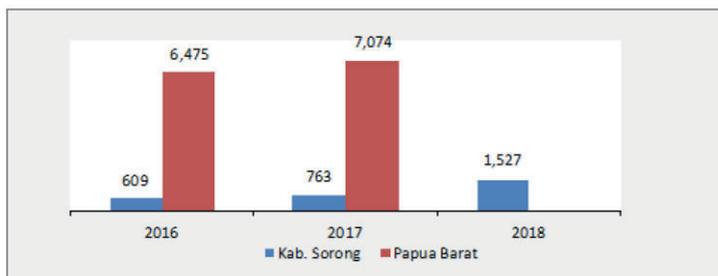
Pendapatan rill Kabupaten Sorong cenderung berfluktuasi selama kurun waktu 2016 – 2018. Adanya penurunan pada tahun 2017 itu disebabkan karena menurunnya porsi Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan. Dana perimbangan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan rill Kabupaten Sorong selama tiga tahun terakhir. Struktur pendapatan daerah terutama terkait dengan kontribusi pajak daerah masih berfluktuasi sepanjang tahun dan cukup rendah. Hal tersebut perlu penanganan lebih optimal terutama pada potensi penerimaan pajak daerah seperti pajak hotel dan pajak hiburan. Penyiapan sumber daya manusia terkait penanganan tersebut perlu dilakukan dan adanya dukungan dalam bentuk fasilitas penunjang bagi petugas agar dapat dengan optimal melakukan pemungutan pajak. Pada sepanjang tahun masih diperoleh surplus yang melebihi standar sehingga perlu dilakukan pembenahan terhadap mekanisme perencanaan penganggaran yang memadai sehingga perolehan surplus masih pada batas yang wajar.

5.4. ANALISIS BELANJA KABUPATEN SORONG

5.4.1. Gambaran Umum Belanja Daerah

Secara umum, realisasi belanja rill di Kabupaten Sorong mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2017 realisasi belanja rill mengalami peningkatan walaupun pendapatan daerah menurun karena adanya penurunan pada pos pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PAD. Pada tahun 2018 porsi belanja mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari Rp 763 Milliar di tahun 2017

menjadi Rp 1,527 Milliar. Dengan demikian, selama kurun waktu 2016 – 2018, rata-rata belanja rill Rp 966 Milliar (Gambar 5.26).



Gambar 5.26

Perkembangan Total Belanja Rill Kabupaten Sorong dan Posisi Relatif terhadap Provinsi Papua Barat tahun 2016 – 2018

Sumber: APBD Kabupaten Sorong, 2016 – 2018 (Data diolah)

Belanja per kapita Kabupaten Sorong dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2018 cenderung mengalami peningkatan seiring adanya peningkatan pada total belanja daerah. Pada tahun 2017 mencapai Rp 3.181.117 dan kemudian meningkat drastis pada tahun 2018 yakni sebesar Rp 6.181.119 (Gambar 5.27). Kondisi ini menggambarkan bahwa alokasi belanja untuk setiap penduduk yang meningkat. Selama periode 2016 – 2018, belanja per kapita Kabupaten Sorong secara rata-rata Rp 3.991.901. Besarnya belanja per kapita di Kabupaten Sorong diharapkan akan berimplikasi terhadap perbaikan pelayanan publik maupun aktivitas ekonomi yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sorong.

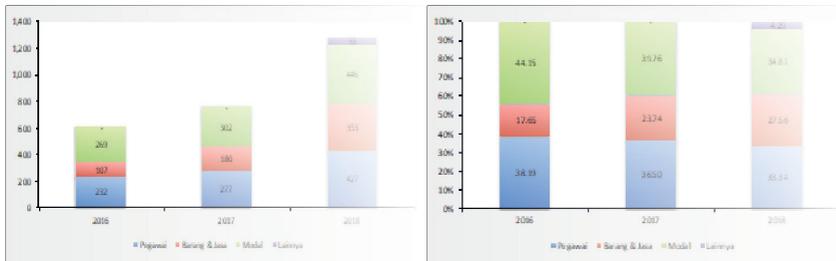


Gambar 5.27 Belanja Perkapita Kabupaten Sorong, 2016 – 2018

Sumber: APBD Kabupaten Sorong, 2016 – 2018 (Data diolah)

5.4.2. Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi

Alokasi belanja riil berdasarkan klasifikasi ekonomi didominasi oleh belanja modal hingga tahun 2018. Selama kurun waktu 2016 sampai 2018, porsi alokasi belanja modal rata-rata 39.58 persen per tahun, disusul oleh belanja pegawai sebesar 36.01 persen per tahun. Secara nominal porsi belanja modal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana dari Rp 269 Milliar di tahun 2016 menjadi Rp 302 Milliar di tahun 2017 dan Rp 466 Milliar di tahun 2018. Pada periode yang sama alokasi belanja barang dan jasa juga meningkat dari Rp 107 Milliar di tahun 2016 menjadi Rp 180 Milliar di tahun 2017 dan Rp 353 Milliar di tahun 2018 (Gambar 5.28).

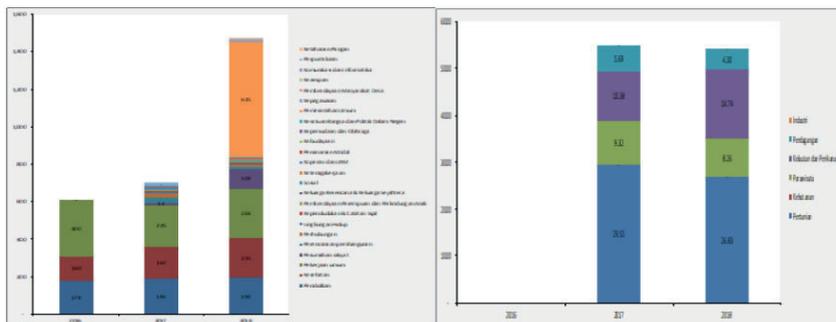


Gambar 5.28 Komposisi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Kabupaten Sorong, 2016 – 2018

Sumber: APBD Kabupaten Sorong, 2016 – 2018 (Data diolah)

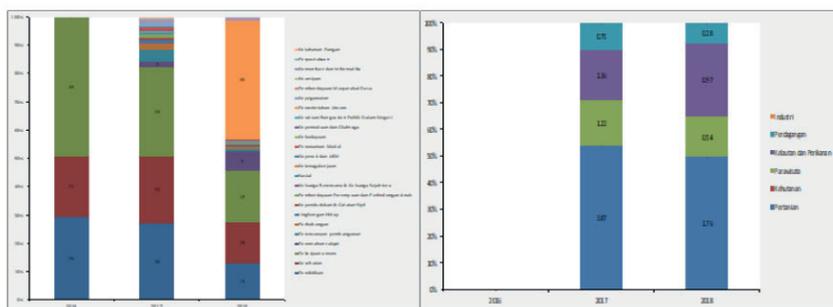
5.4.3. Belanja Sektoral di Kabupaten

Sektor pekerjaan umum memperoleh alokasi belanja yang cukup besar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dengan rata-rata Rp 262 Milliar atau **32 persen dari total belanja**. Namun penurunan belanja sektor pekerjaan umum di tahun 2018 mendorong peningkatan porsi belanja untuk sektor pemerintahan umum. Pada tahun 2018, porsi belanja untuk sektor pemerintahan umum mencapai 40 persen. Hal ini dikarenakan adanya pemekaran wilayah (Gambar 5.29).



Gambar 5.29 Perkembangan Belanja Sektoral di Kabupaten Sorong, 2016 – 2018

Sumber: APBD Kabupaten Sorong, 2016 – 2018 (Data diolah)



Gambar 5.30 Proporsi Belanja Sektoral Terhadap Total Belanja di Kabupaten Sorong, 2016 – 2018

Sumber: APBD Kabupaten Sorong, 2016 – 2018 (Data diolah)

Alokasi belanja sektoral yang paling rendah adalah sektor perpustakaan dengan rata-rata belanja adalah Rp 1.50 Milliar (0.15 persen). Dapat dilihat juga ada beberapa sektor lain yang sebagai leading sektor tetapi memperoleh porsi belanja yang kecil seperti pertanian, kehutanan, parawisata, kelautan dan perikanan, perdagangan serta industry (Gambar 5.30). Kondisi ini menggambarkan bahwa kebijakan anggaran tidak pro terhadap sektor prioritas daerah. Oleh karena itu diperlukan adanya perencanaan dan penganggaran secara terintegrasi ke depan agar sektor prioritas memperoleh dukungan pembiayaan.

5.4.4. Kesimpulan dan Rekomendasi

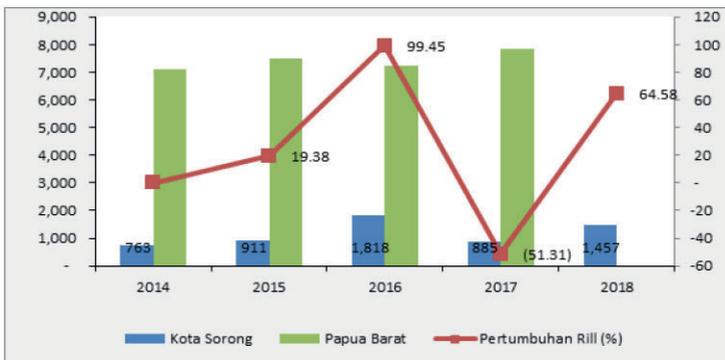
Belanja daerah di Kabupaten Sorong mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir, dari 2016 hingga 2018 dengan rata-rata belanja rill sebesar Rp 966

Milliar. Berdasarkan klasifikasi ekonomi, proporsi belanja terbesar dialokasikan untuk belanja modal, sementara alokasi berdasarkan sektor terbesar adalah sektor pekerjaan umum. Akan tetapi pada tahun 2018, terjadi pergeseran alokasi belanja ke sektor pemerintahan umum. Sektor yang berpotensi sebagai leading sektor seperti sektor kehutanan dan industri kurang memperoleh dukungan pembiayaan. Untuk mendorong perekonomian di Kabupaten Sorong, direkomendasikan beberapa kegiatan berupa: (i) dukungan kebijakan pembiayaan untuk leading sektor atau sektor prioritas, (ii) penghematan belanja barang dan jasa, (iii) pengalokasian belanja untuk sektor-sektor yang menjadi prioritas perlu disinkronkan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah sehingga visi dan misi pembangunan senantiasa mendapat dukungan pembiayaan yang memadai.

5.5. ANALISIS PENDAPATAN KOTA SORONG

5.5.1. Gambaran Umum Pendapatan Daerah

Pertumbuhan pendapatan daerah Kota Sorong cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018 pertumbuhan pendapatan daerah mengalami perbaikan dengan pertumbuhan sebesar 64.58 persen. Penurunan yang cukup drastis terjadi pada tahun 2017, dimana pada tahun 2016 pendapatan daerah dari Rp 1,818 miliar turun menjadi Rp 885 miliar (Gambar 5.31). Penurunan ini disebabkan porsi pendapatan asli daerah dalam hal ini pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan. Sedangkan jika dibandingkan dengan pendapatan Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan pada tahun 2017.

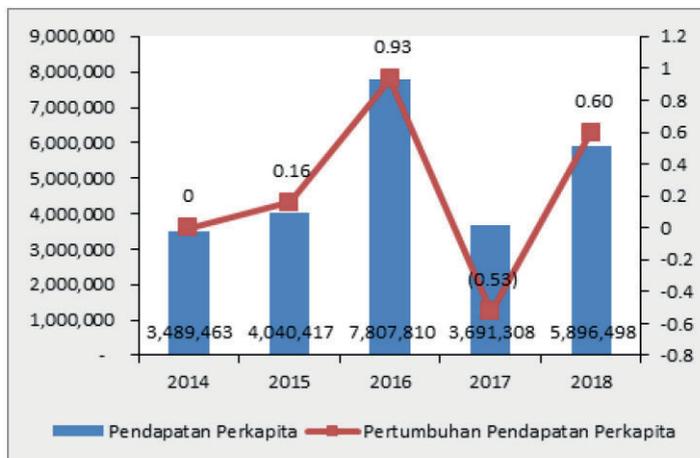


Gambar 5.31

Total dan Pertumbuhan Pendapatan Rill Daerah Kota Sorong, 2014 – 2018

Sumber: APBD Kota Sorong, 2014 – 2018 (Data diolah)

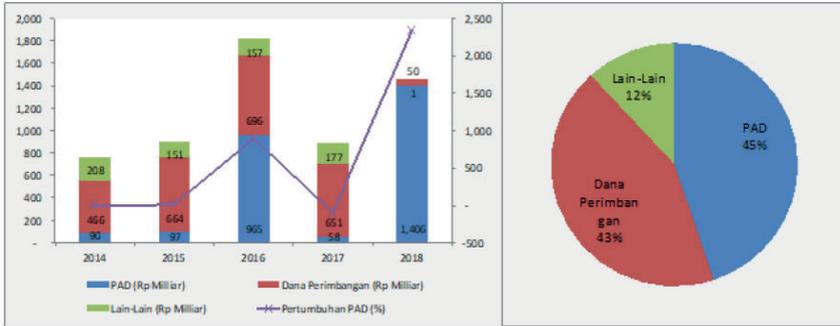
Pertumbuhan pendapatan perkapita Kota Sorong berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pendapatan perkapita Kota Sorong cenderung meningkat hingga Rp 7,807,810 pada tahun 2016 (Gambar 5.32), walaupun pada tahun berikutnya mengalami penurunan, sehingga cenderung berfluktuasi. Fluktuasi tersebut dikarenakan adanya penurunan pendapatan daerah.



Gambar 5.32 Total dan Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Kota Sorong, 2014 – 2018 *Sumber: APBD Kota Sorong, 2014 – 2018 (Data diolah)*

5.5.2. Struktur Pendapatan Riil

Pada periode 2014 – 2018, pendapatan daerah riil Kota Sorong didominasi oleh pendapatan yang berasal dari PAD. Walaupun demikian kontribusi yang berasal dari dana perimbangan juga cukup memberikan kontribusi yang besar. PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah sebesar 45 persen, sementara dana perimbangan yang bersumber dari DAU, DAK dan DBH sebesar 43 persen dan lain-lain sebesar 12 persen (Gambar 5.33).

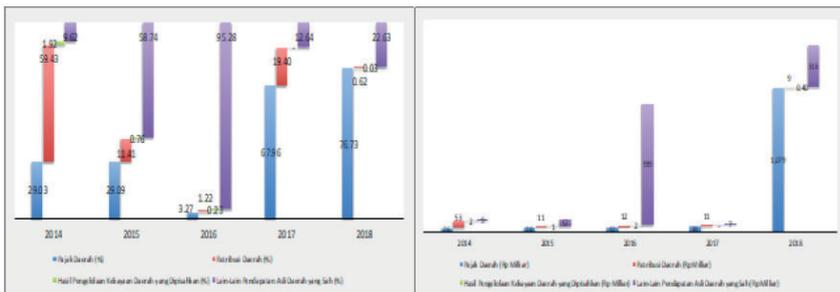


Gambar 5.33 Perkembangan Pendapatan Daerah Rill dan Proporsinya Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Sorong, 2014 – 2018

Sumber: APBD Kota Sorong, 2014 – 2018 (Data diolah)

5.5.3. Komposisi Pendapatan Asli Daerah

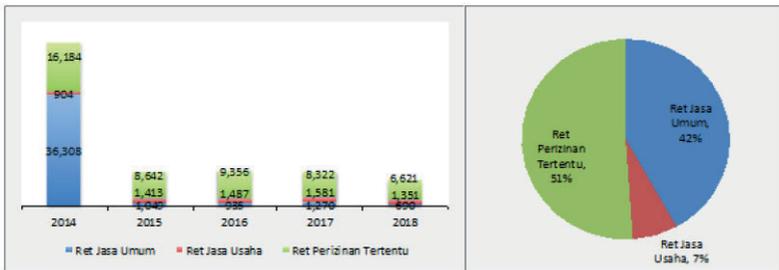
Komposisi PAD Kota Sorong didominasi oleh pajak daerah. Pajak daerah Kota Sorong mengalami penurunan pada tahun 2016, sebaliknya pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dari Rp 39 Milliar menjadi Rp 1,079 Milliar. Dapat dilihat bahwa komposisi pajak daerah terhadap PAD pada tahun tersebut mendominasi dengan kontribusi sebesar 76.73 persen, diikuti dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 22.63 persen (Gambar 5.34). Dengan tingginya kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Sorong menunjukkan bahwa banyak komponen-komponen penerimaan yang bersumber dari berbagai jenis pajak yang dimaksimalkan dan dikelola dengan baik.



Gambar 5.34 Komposisi dan Proporsi PAD Kota Sorong, 2014 – 2018

Sumber: APBD Kota Sorong, 2014 – 2018 (Data diolah)

Retribusi daerah Kota Sorong cenderung menurun pada tahun 2018, dimana porsinya terhadap PAD hanya mencapai 0.03 persen. Walaupun rendah namun retribusi daerah masih memberikan sumbangan terhadap PAD Kota Sorong, dimana retribusi daerah didominasi oleh perijinan dan retribusi jasa umum. Penurunan porsi retribusi daerah selama lima tahun menunjukkan bahwa penanganan terhadap sumber pendapatan tersebut masih perlu dibenahi sehingga paling tidak iklim ekonomi daerah dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi penerimaan daerah (Gambar 5.35).



Gambar 5.35

Komposisi dan Proporsi Retribusi Daerah Kota Sorong, 2014 – 2018

Sumber: APBD Kota Sorong, 2014 – 2018 (Data diolah)

Kontribusi pajak daerah di Kota Sorong dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2014 sebesar Rp 26 Milliar meningkat menjadi Rp 1,079 Milliar (Tabel 5.3). Perolehan porsi pajak yang cukup tinggi ini disebabkan karena banyak sumber pajak daerah telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah, terutama pada komponen pajak daerah bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pajak daerah pada tahun 2018, yakni sebesar Rp 1,042 Milliar.

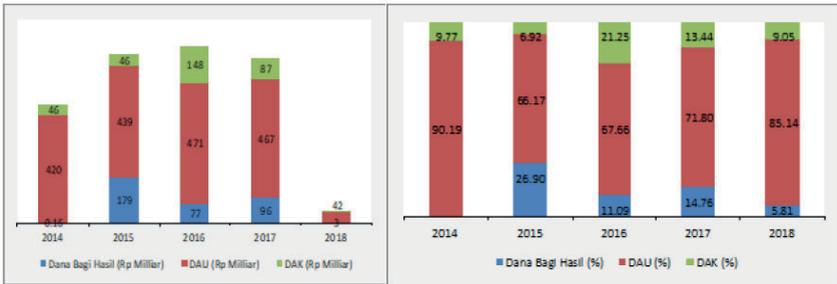
Komponen Pajak Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
Hotel	3	2	3	3	4
Restoran	3	4	4	5	7
Hiburan	1	1	1	1	2
Reklame	1	1	1	1	1
Penerangan Jalan	5	5	6	6	5
Bahan Galian Golongan C	1	1	1	1	3
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	7	8	8	9	1,042
Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan	5	5	7	12	16
Total Pajak Daerah	26	28	32	39	1,079

Tabel 5.3 Perolehan Sumber-Sumber pajak Daerah

Kota Sorong, 2014 – 2018 (dalam Rp Milliar)

Sumber: APBD Kota Sorong, 2014 – 2018

Perolehan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan secara nominal mengalami peningkatan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Secara proporsional sumber dana dari dana perimbangan merupakan penyumbang terbesar terhadap pendapatan rill Kota Sorong setelah PAD (Gambar 4.3). Dimana sumber terbesar dari dana perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan rata-rata kontribusi sebesar 73 persen. Namun dapat dilihat pada Gambar 4.6 bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari DAU tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2018. Hal ini disebabkan adanya pemekaran wilayah sehingga berpengaruh terhadap perolehan DAU. Sedangkan untuk pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) cenderung berfluktuasi selama 5 tahun terakhir. Sumbangan terendah dari DAK terhadap dana perimbangan rill adalah pada tahun 2015 yakni sebesar 9.05 persen. Walaupun demikian, didapati rata-rata kontribusi dana bagi hasil terhadap pendapatan rill masih lebih tinggi dibandingkan DAK yakni sebesar 14 persen dengan nominal rata-rata per tahun sebesar Rp 71 Milliar (Gambar 5.36).



Gambar 5.36 Perkembangan dan Komposisi Dana Perimbangan Rill Kota Sorong, 2014 – 2018

Sumber: APBD Kota Sorong, 2014 – 2018 (Data diolah)

Perolehan dana bagi hasil pajak terhadap dana perimbangan Kota Sorong mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir. Namun pada tahun 2018 nominal perolehan dana bagi hasil pajak menurun dari Rp 96 Milliar pada tahun 2017 menjadi Rp 813 Juta pada tahun 2018 (Gambar 5.37). Hal ini selain menunjukkan adanya penurunan sumber-sumber bagi hasil pajak karena menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat, namun juga karena faktor pembagi yang semakin besar sebagai akibat semakin bertambahnya daerah otonom baru.



Gambar 5.37 Perolehan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kota Sorong, 2014 – 2018

Sumber: APBD Kota Sorong, 2014 – 2018 (Data diolah)

Dana bagi hasil bukan pajak memberikan nominal rata-rata kontribusi sebesar Rp 18 Milliar. Namun perolehan dana bagi hasil tersebut pada tahun 2016 dan 2017 menunjukkan bahwa adanya penurunan eksploitasi sumberdaya, yang ditunjukkan dengan tidak adanya penerimaan selama dua tahun berturut-turut (Gambar 5.38).



Gambar 5.38 Perkembangan Bagian Lain-Lain Penerimaan yang Sah Kota Sorong, 2014 – 2018

Sumber: APBD Kota Sorong, 2014 – 2018 (Data diolah)

Bagian lain-lain penerimaan yang sah selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, bagian lain-lain penerimaan yang sah menurun drastis dikarenakan dana bagi hasil pajak menurun dari provinsi dan pemerintah daerah lain (Gambar 5.39).



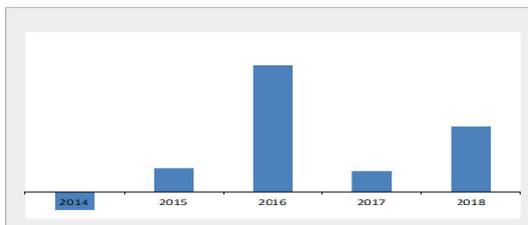
Gambar 5.39 Proporsi Bagian Lain-Lain Penerimaan yang Sah di Kota Sorong, 2014 – 2018

Sumber: APBD Kota Sorong, 2014 – 2018 (Data diolah)

Sepanjang tahun 2014 hingga 2018 perolehan dana bagi hasil pajak dan provinsi mendominasi komponen lain-lain penerimaan yang sah. Secara nominal nilai rill dana bagi hasil pajak dan provinsi mengalami penurunan di tahun 2016 dan 2018, begitu juga dengan nominal nilai rill dana otsus. Walaupun demikian perkembangan sumber lain-lain penerimaan rill mengalami fluktuasi. Kondisi ini disebabkan kontribusi dana penyesuaian dan bantuan dari provinsi serta pendapatan hibah yang tidak stabil dari tahun ke tahun.

5.5.4. Analisis Surplus/Defisit APBD

APBD Kota Sorong lebih dominan mencapai surplus daripada mengalami defisit selama periode 2015 – 2018. Pembiayaan surplus dicapai pada tahun 2015 – 2018, dan mengalami defisit pada tahun 2014. Surplus pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2016 (Gambar 5.40). Pembiayaan surplus dicapai tidak semata-mata sebagai sebuah kebijakan keuangan daerah, tetapi karena daya serap anggaran oleh pemerintah daerah yang rendah. Pada periode defisit, pembiayaan belanja daerah menggunakan sisa lebih perhitungan tahun lalu (SiLPa). Surplus yang besar menunjukkan mekanisme perencanaan penganggaran yang masih perlu dibenahi sehingga *surplus* tidak melebihi 6 persen sesuai dengan standar pengelolaan keuangan daerah.



Gambar 5.40 Perkembangan Surplus dan Defisit APBD di Kota Sorong, 2014 – 2018

Sumber: APBD Kota Sorong, 2014 – 2018 (Data diolah)

5.5.5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pendapatan rill Kota Sorong cenderung berfluktuasi selama kurun waktu 2014 – 2018. Penurunan pada tahun 2017 itu disebabkan karena porsi Pendapatan Asli Daerah menurun. Hal ini dikarenakan pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami penurunan. Walaupun demikian PAD tetap memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan rill Kota Sorong selama lima tahun terakhir, diikuti juga dengan dana perimbangan. Struktur pendapatan daerah terutama terkait dengan kontribusi pajak daerah sudah mulai ditingkatkan dengan tingginya kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Sorong. Pada sepanjang tahun masih diperoleh surplus yang melebihi standar sehingga perlu dilakukan pembenahan terhadap mekanisme perencanaan penganggaran yang memadai sehingga perolehan surplus masih pada batas yang wajar.

5.6. ANALISIS BELANJA KOTA SORONG

5.6.1. Gambaran Umum Belanja Daerah

Secara umum, realisasi belanja rill di Kota Sorong berfluktuasi sepanjang lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 realisasi belanja rill mengalami penurunan seiring dengan penurunan pendapatan daerah yang disebabkan karena adanya penurunan pada pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PAD. Pada tahun tersebut, posisi relative belanja rill Kota Sorong jauh di bawah dari belanja pemerintah Provinsi Papua Barat. Namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari Rp 723 Milliar di tahun 2017 menjadi Rp 962 Milliar (Gambar 5.41). Dengan demikian, selama kurun waktu 2014 – 2018, rata-rata belanja rill Rp 878 Milliar.



Gambar 5.41 Perkembangan Total Belanja Rill Kota Sorong dan Posisi Relatif terhadap Provinsi Papua Barat tahun 2014 – 2018

Sumber: APBD Kota Sorong, 2014 – 2018 (Data diolah)

Belanja per kapita Kota Sorong pada tahun 2017 mengalami penurunan drastis akibat dari penurunan total belanja daerah. Namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari Rp 3.013.707 di tahun 2017 menjadi Rp 3.895.134 (Gambar 5.42). Kondisi ini menggambarkan bahwa alokasi belanja untuk setiap penduduk yang tadinya mengalami penurunan mulai meningkat. Selama periode 2014 – 2018, belanja per kapita Kota Sorong secara rata-rata Rp 3.779.178. Besar belanja per kapita di Kota Sorong diharapkan akan berimplikasi terhadap perbaikan pelayanan publik maupun aktivitas ekonomi yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Sorong.

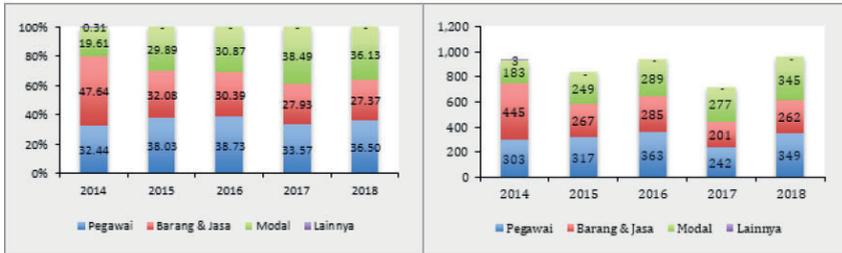


Gambar 5.42 Belanja Perkapita Kota Sorong, 2014 – 2018

Sumber: APBD Kota Sorong, 2014 – 2018 (Data diolah)

5.6.2. Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi

Alokasi belanja riil berdasarkan klasifikasi ekonomi didominasi oleh belanja pegawai. Selama kurun waktu 2014 sampai 2018, porsi alokasi belanja modal rata-rata 35.86 persen per tahun, disusul oleh belanja barang dan jasa sebesar 33.08 persen per tahun. Meskipun proporsi belanja pegawai terbesar diantara jenis belanja lain, namun secara nominal perkembangannya berfluktuasi, dimana dari Rp 363 Milliar di tahun 2016 menjadi Rp 242 Milliar di tahun 2017. Pada periode yang sama alokasi belanja barang dan jasa juga menurun dari Rp 285 Milliar di tahun 2016 menjadi Rp 201 Milliar di tahun 2017. Walaupun kemudian pada tahun 2018 baik belanja pegawai dan barang dan jasa mengalami peningkatan (Gambar 5.43).

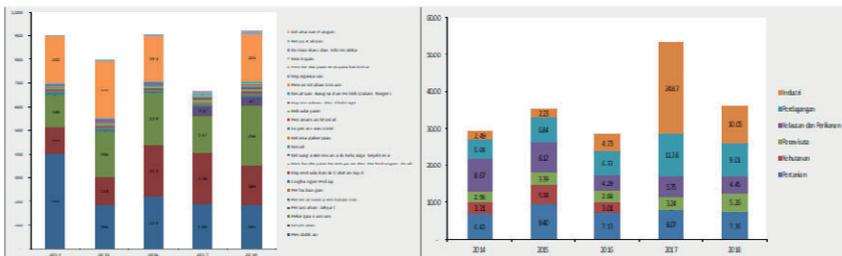


Gambar 5.43 Komposisi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Kota Sorong, 2014 – 2018

Sumber: APBD Kota Sorong, 2014 – 2018 (Data diolah)

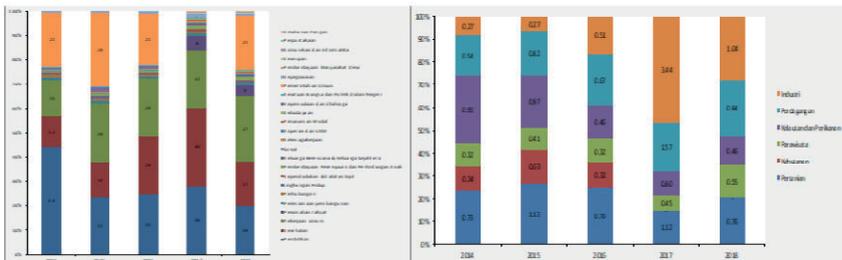
5.6.3. Belanja Sektoral di Kabupaten

Sektor pendidikan memperoleh alokasi belanja yang cukup besar dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dengan rata-rata Rp 237 Miliar atau 27 persen dari total belanja (Gambar 5.44). Hal ini dikarenakan pengeluaran untuk pembangunan gedung dan pengadaan alat-alat dalam menunjang kegiatan pendidikan di Kota Sorong.



Gambar 5.44 Perkembangan Belanja Sektoral di Kota Sorong, 2014 – 2018

Sumber: APBD Kota Sorong, 2014 – 2018 (Data diolah)



Gambar 5.45 Proporsi Belanja Sektoral Terhadap Total Belanja di Kota Sorong, 2014 – 2018

Sumber: APBD Kota Sorong, 2014 – 2018 (Data diolah)

Penurunan belanja sektor pendidikan mendorong peningkatan porsi belanja untuk sektor pekerjaan umum. Pada tahun 2018, porsi belanja untuk sektor pekerjaan umum meningkat menjadi 27 persen dari 22 persen di tahun 2017. Alokasi belanja sektoral yang paling rendah adalah sektor pemberdayaan masyarakat desa dengan rata-rata belanja adalah Rp 95.2 juta (0.01 persen) (Gambar 5.45). Dapat dilihat juga ada beberapa sektor lain yang sebagai leading sektor tetapi memperoleh porsi belanja yang kecil seperti perdagangan, pariwisata, industri, perikanan, pertanian, kehutanan dan kelautan. Kondisi ini menggambarkan bahwa kebijakan anggaran tidak pro terhadap sektor prioritas daerah. Maka dari itu, diperlukan adanya perencanaan dan penganggaran secara terintegrasi ke depannya agar sektor prioritas memperoleh dukungan pembiayaan.

5.6.4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Belanja daerah di Kota Sorong mengalami penurunan di tahun 2017, namun kemudian meningkat di tahun berikutnya yakni sebesar Rp 962 Miliar dari Rp 723 Miliar. Berdasarkan klasifikasi ekonomi, proporsi belanja terbesar dialokasikan untuk belanja modal, sementara alokasi berdasarkan sektor terbesar adalah sektor pendidikan. Akan tetapi pada tahun 2018, terjadi pergeseran alokasi belanja ke sektor pekerjaan umum. Sektor yang berpotensi sebagai leading sektor seperti sektor perdagangan, sektor pertanian kurang memperoleh dukungan pembiayaan. Untuk mendorong perekonomian di Kota Sorong, direkomendasikan beberapa kegiatan berupa: (i) perlu dukungan kebijakan pembiayaan untuk leading sektor atau sektor prioritas, (ii) penghematan belanja barang dan jasa, (iii) pengalokasian belanja untuk sektor-sektor yang menjadi prioritas perlu disinkronkan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah sehingga visi dan misi pembangunan senantiasa mendapat dukungan pembiayaan yang memadai.

5.7. PERBANDINGAN ANALISIS PENDAPATAN PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

5.7.1. Gambaran Umum Pendapatan Daerah

Pertumbuhan pendapatan daerah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018 pertumbuhan pendapatan daerah mengalami perbaikan dengan pertumbuhan sebesar 64.58 dan 49.52 persen. Penurunan yang cukup drastis pada Kota Sorong terjadi pada tahun 2017, dimana pada tahun 2016 pendapatan daerah dari Rp 1,818 miliar turun menjadi Rp 885 miliar. Sedangkan pada Kabupaten Sorong

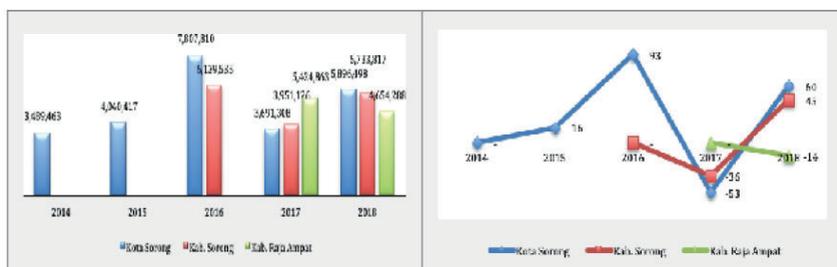
dari Rp 1,429 milliard turun menjadi Rp 948 milliard. Penurunan ini disebabkan porsi pendapatan asli daerah dalam hal ini pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penurunan. Untuk Kabupaten Raja Ampat mengalami penurunan sebesar 11.60 persen pada tahun 2018, yakni dari Rp 1,301 milliard menjadi Rp 1,150 milliard (Gambar 5.46). Selanjutnya untuk pendapatan Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan cenderung mengalami peningkatan.



Gambar 5.46 Total dan Pertumbuhan Pendapatan Rill, 2014 – 2018

Sumber: APBD Kota Sorong, Kab. Sorong & Kab. Raja Ampat, 2014 – 2018 (Data diolah)

Pertumbuhan pendapatan perkapita masing-masing Kabupaten Kota berfluktuasi. Pendapatan perkapita Kota Sorong cenderung meningkat hingga Rp 7,807,810 pada tahun 2016, walaupun pada tahun berikutnya mengalami penurunan, sehingga cenderung berfluktuasi. Fluktuasi tersebut dikarenakan adanya penurunan pendapatan daerah. Hal yang sama juga terdapat pada pendapatan perkapita Kabupaten Sorong yang menurun pada tahun 2017 yakni sebesar 36 persen yang kemudian meningkat sebesar 45 persen. Sedangkan untuk Kabupaten Raja Ampat menurun sebesar 14 persen (Gambar 5.47).

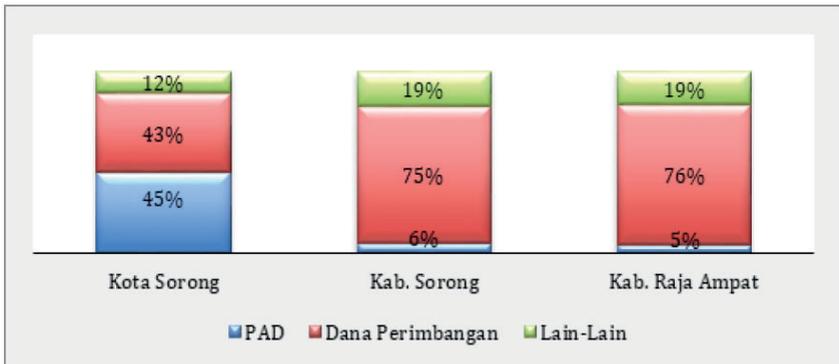


Gambar 5.47 Total dan Pertumbuhan Pendapatan Perkapita, 2014 – 2018

Sumber: APBD Kota Sorong, Kab. Sorong & Kab. Raja Ampat, 2014 – 2018 (Data diolah)

5.7.2. Struktur Pendapatan Riil

Pendapatan daerah riil Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat didominasi oleh pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan, yakni sebesar 75 dan 76 persen (Gambar 5.48). Sedangkan untuk Kota Sorong, pendapatan daerah riil didominasi oleh PAD. Walaupun demikian kontribusi yang berasal dari dana perimbangan juga cukup memberikan kontribusi yang besar. PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah sebesar 45 persen, sementara dana perimbangan yang bersumber dari DAU, DAK dan DBH sebesar 43 persen dan lain-lain sebesar 12 persen.



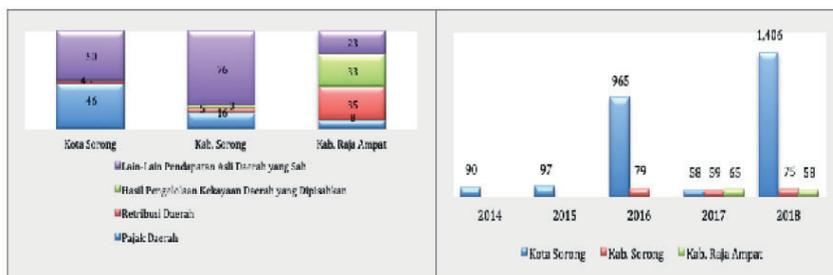
Gambar 5.48

Proporsi Pendapatan Daerah Riil Terhadap Total Pendapatan Daerah, 2014 – 2018

Sumber: APBD Kota Sorong, 2014 – 2018 (Data diolah)

5.7.3. Komposisi Pendapatan Asli Daerah

Komposisi PAD Kota Sorong didominasi oleh Pajak Daerah. Pajak daerah Kota Sorong mengalami penurunan pada tahun 2016, sebaliknya pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dari Rp 39 Milliar menjadi Rp 1,079 Milliar. Dapat dilihat bahwa komposisi pajak daerah terhadap PAD pada tahun tersebut mendominasi dengan kontribusi sebesar 76.73 persen, diikuti dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 22.63 persen (Gambar 5.49). Dengan tingginya kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Sorong menunjukkan bahwa banyak komponen-komponen penerimaan yang bersumber dari berbagai jenis pajak yang dimaksimalkan dan dikelola dengan baik.



Gambar 5.49

Pedapatan Asli Daerah dan Proporsi PAD, 2014 – 2018

Sumber: APBD Kota Sorong, Kab. Sorong & Kab. Raja Ampat, 2014 – 2018 (Data diolah)

Kontribusi pajak daerah di Kota Sorong dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2014 sebesar Rp 26 Milliar meningkat menjadi Rp 1,079 Milliar. Perolehan porsi pajak yang cukup tinggi ini disebabkan karena banyak sumber pajak daerah telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah, terutama pada komponen pajak daerah bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pajak daerah pada tahun 2018, yakni sebesar 89,15 persen. Sedangkan untuk Kabupaten Sorong kontribusi yang cukup besar terhadap pajak daerah yakni sebesar 40,44 persen adalah komponen *Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan*. Untuk Kabupaten Raja Ampat di dominasi oleh komponen *Bahan Galian Golongan C* yakni sebesar 45,98 persen (Gambar 5.50).

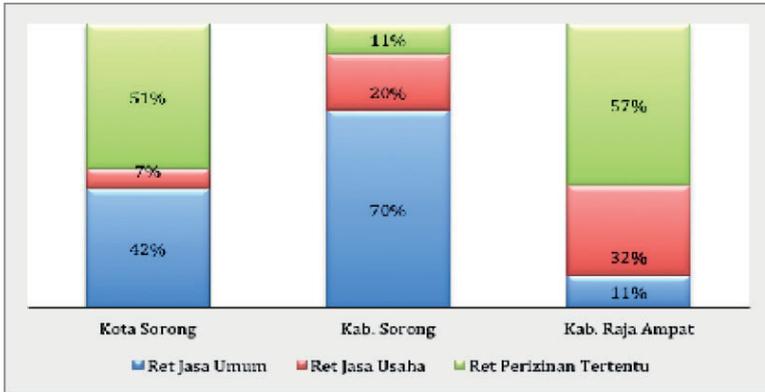


Gambar 5.50 Pajak Daerah dan Proporsi Pajak Daerah, 2014 – 2018

Sumber: APBD Kota Sorong, Kab. Sorong & Kab. Raja Ampat, 2014 – 2018 (Data diolah)

Proporsi Retribusi Daerah pada masing-masing Kabupaten Kota berbeda. Dimana retribusi daerah Kota Sorong didominasi oleh perijinan dan retribusi jasa umum yakni sebesar 51 dan 42 persen. Sedangkan untuk Kabupaten Sorong retribusi daerah

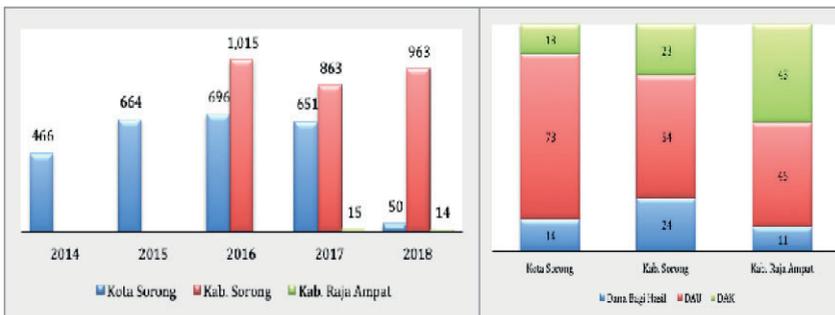
didominasi oleh retribusi jasa umum yakni sebesar 70 persen. Untuk Kabupaten Raja Ampat didominasi oleh retribusi perizinan tertentu yakni sebesar 57 persen yang diikuti dengan Retribusi Jasa usaha sebesar 32 persen (Gambar 5.51).



Gambar 5.51 Proporsi Retribusi Daerah, 2014 – 2018

Sumber: APBD Kota Sorong, Kab. Sorong & Kab. Raja Ampat, 2014 – 2018 (Data diolah)

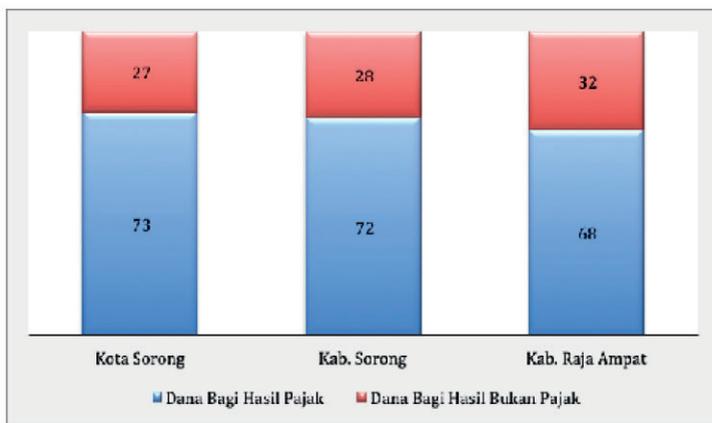
Perolehan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan secara nominal mengalami peningkatan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Secara proporsional sumber dana terbesar dari dana perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk masing-masing Kabupaten Kota, dimana Kota Sorong sebesar 73 persen, Kabupaten Sorong sebesar 54 persen dan Kabupaten Raja Ampat sebesar 46 persen (Gambar 5.52).



Gambar 5.52 Perkembangan dan Proporsi Dana Perimbangan Rill, 2014 – 2018

Sumber: APBD Kota Sorong, Kab. Sorong & Kab. Raja Ampat, 2014 – 2018 (Data diolah)

Proporsi Dana Bagi Hasil Pajak untuk masing-masing Kabupaten Kota didominasi oleh Dana Bagi Hasil pajak. Dimana untuk Kota Sorong sebesar 73 persen, Kabupaten Sorong sebesar 72 persen dan Kabupaten Raja Ampat sebesar 68 persen (Gambar 5.53).

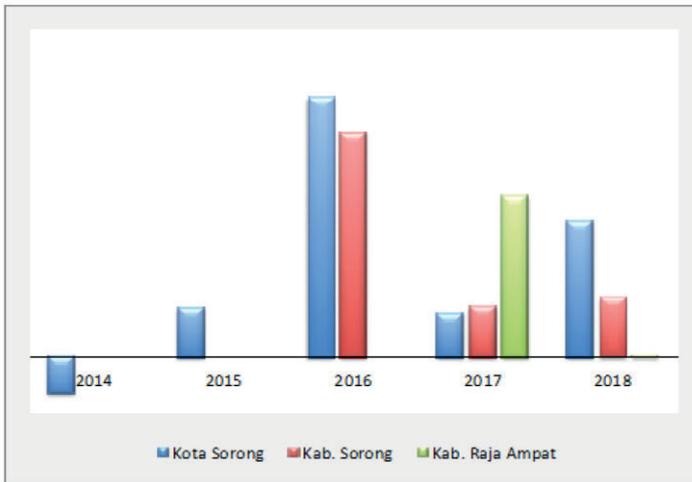


Gambar 5.53 Proporsi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, 2014 – 2018

Sumber: APBD Kota Sorong, Kab. Sorong & Kab. Raja Ampat, 2014 – 2018 (Data diolah)

5.7.4. Analisis Surplus/Defisit APBD

APBD Kota Sorong dan kabuapten Sorong lebih dominan mencapai surplus dari pada mengalami defisit. Pembiayaan surplus dicapai pada tahun 2015 – 2018, dan mengalami defisit pada tahun 2014, sedangkan surplus pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2016 (Gambar 5.54). Pembiayaan surplus dicapai tidak semata-mata sebagai sebuah kebijakan keuangan daerah, tetapi karena daya serap anggaran oleh pemerintah daerah yang rendah. Pada periode defisit, pembiayaan belanja daerah menggunakan sisa lebih perhitungan tahun lalu. Adanya surplus yang besar menunjukkan mekanisme perencanaan penganggaran yang masih perlu dibenahi sehingga surplus tidak melebihi 6 persen sesuai dengan standar pengelolaan keuangan daerah.



Gambar 5.54 Perkembangan Surplus dan Defisit APBD, 2014 – 2018

Sumber: APBD Kota Sorong, Kab. Sorong & Kab. Raja Ampat, 2014 – 2018 (Data diolah)

5.7.5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pendapatan riil Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat cenderung berfluktuasi selama kurun waktu 2014 – 2018. Penurunan pada tahun 2017 itu disebabkan karena menurunnya porsi Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan pos Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan. Walaupun demikian PAD tetap memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan riil Kota Sorong selama lima tahun terakhir, diikuti juga dengan dana perimbangan. Untuk Kabupaten Sorong, dana perimbangan juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan riil Kabupaten Sorong selama tiga tahun terakhir.

Struktur pendapatan daerah pada Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat terutama terkait dengan kontribusi pajak daerah masih berfluktuasi sepanjang tahun dan cukup rendah. Hal tersebut perlu penanganan lebih optimal. Penyiapan sumber daya manusia terkait penanganan tersebut perlu dilakukan dan adanya dukungan dalam bentuk fasilitas penunjang bagi petugas agar dapat dengan optimal melakukan pemungutan pajak. Sedangkan untuk Kota Sorong sudah cukup baik dimana kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Sorong cukup tinggi sehingga menunjukkan bahwa

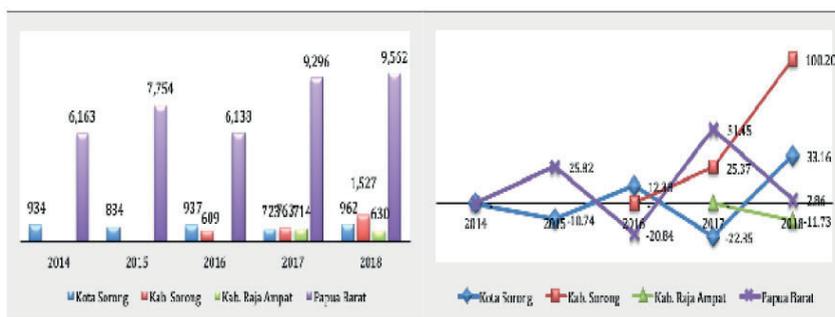
banyak komponen-komponen penerimaan yang bersumber dari berbagai jenis pajak yang dimaksimalkan dan dikelola dengan baik.

Pada sepanjang tahun masih diperoleh surplus yang melebihi standar sehingga perlu dilakukan pembenahan terhadap mekanisme perencanaan penganggaran yang memadai sehingga perolehan surplus masih pada batas yang wajar untuk masing-masing kabupaten/kota.

5.8. PERBANDINGAN ANALISIS BELANJA PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

5.8.1. Gambaran Umum Belanja Daerah

Secara umum, realisasi belanja rill di Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat berfluktuasi. Pada tahun 2017 realisasi belanja rill pada Kota Sorong mengalami penurunan seiring dengan penurunan pendapatan daerah yang disebabkan karena penurunan pada pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PAD. Pada tahun tersebut, posisi relatif belanja rill Kota Sorong jauh di bawah dari belanja pemerintah Provinsi Papua Barat. Namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari Rp 723 Milliar di tahun 2017 menjadi Rp 962 Milliar. Kabupaten Sorong mengalami kenaikan realisasi belanja pada tahun 2017 yakni dari Rp 609 Milliar menjadi Rp 763 Milliar atau sebesar 25.37 persen. Kabupaten Raja Ampat mengalami penurunan sebesar 11.73 persen (Gambar 5.55).



Gambar 5.55 Perkembangan Total Belanja Rill dan Posisi Relatif terhadap Provinsi Papua Barat tahun 2014 – 2018

Sumber: APBD Kota Sorong, Kab. Sorong & Kab. Raja Ampat, 2014 – 2018 (Data diolah)

Belanja per kapita Kota Sorong pada tahun 2017 mengalami penurunan drastis akibat dari penurunan total belanja daerah. Namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari Rp 3.013.707 di tahun 2017 menjadi Rp 3.895.134. Kabupaten Sorong

mengalami peningkatan yang cukup signifikan juga yakni mencapai Rp 6,181,119 dari Rp 3,181,117. Kondisi ini menggambarkan bahwa alokasi belanja untuk setiap penduduk yang mengalami penurunan mulai meningkat. Kabupaten Raja Ampat yang mengalami penurunan dari Rp 2,976,610 menjadi Rp 2,550,272 (Gambar 5.56). Besar belanja per kapita di masing-masing Kabupaten Kota diharapkan berimplikasi terhadap perbaikan pelayanan publik maupun aktivitas ekonomi yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota.



Gambar 5.56 Belanja Perkapita, 2014 – 2018

Sumber: APBD Kota Sorong, Kab. Sorong & Kab. Raja Ampat, 2014 – 2018 (Data diolah)

5.8.2. Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi

Alokasi belanja riil berdasarkan klasifikasi ekonomi didominasi oleh belanja pegawai untuk Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat yakni sebesar 35.92 dan 37.29 persen. Untuk Kabupaten Sorong porsi belanja Modal yang mendominasi yakni sebesar 38.28 persen. Namun diikuti oleh belanja Pegawai yakni sebesar 35.36 persen (Gambar 5.57).

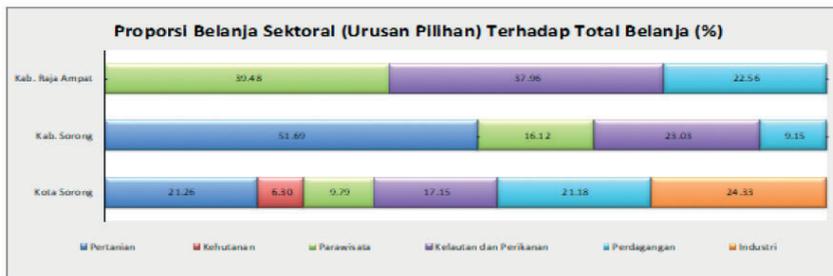


Gambar 5.57 Komposisi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi, 2014 – 2018

Sumber: APBD Kota Sorong, Kab. Sorong & Kab. Raja Ampat, 2014 – 2018 (Data diolah)

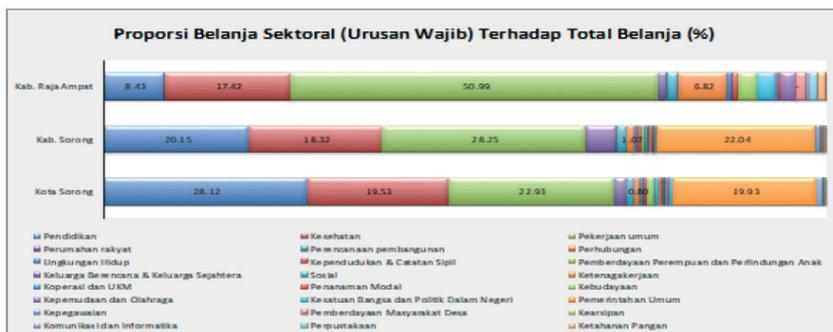
5.8.3. Belanja Sektoral di Kabupaten

Proporsi belanja sektoral untuk urusan wajib didominasi oleh sektor pendidikan dan pekerjaan umum. Dimana untuk Kota Sorong didominasi oleh sektor pendidikan yakni sebesar 28 persen, Kabupaten Sorong didominasi oleh sektor pekerjaan umum sebesar 28.25 dan 50.99 persen (Gambar 5.58). Sedangkan untuk urusan pilihan Kabupaten Sorong didominasi oleh sektor industri sebesar 24.33 persen diikuti dengan sektor pertanian (21.26 persen) dan sektor perdagangan (21.18 persen). Kabupaten Raja Ampat didominasi oleh sektor pertanian sebesar 51.69 persen. Untuk Kabupaten Raja Ampat didominasi oleh sektor pariwisata (39.48 persen) dan sektor kelautan dan perikanan (37.96 persen). Untuk Kabupaten Raja Ampat didominasi oleh sektor pariwisata (39.48 persen) dan sektor kelautan dan perikanan (37.96 persen).



Gambar 5.58 Proporsi Belanja Sektoral Urusan Wajib Terhadap Total Belanja, 2014 – 2018

Sumber: APBD Kota Sorong, Kab. Sorong & Kab. Raja Ampat, 2014 – 2018 (Data diolah)



Gambar 5.59 Proporsi Belanja Sektoral Urusan Wajib Terhadap Total Belanja, 2014 – 2018

Sumber: APBD Kota Sorong, Kab. Sorong & Kab. Raja Ampat, 2014 – 2018 (Data diolah)

5.8.4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Belanja daerah di masing-masing Kabupaten Kota cenderung berfluktuasi. Kota Sorong mengalami penurunan di tahun 2017, kemudian meningkat di tahun berikut sebesar Rp 962 Milliar dari Rp 723 Milliar. Belanja daerah Kabupaten Sorong mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir, dari 2016 hingga 2018 dengan rata-rata belanja rill sebesar Rp966 Milliar. Selanjutnya Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan rata-rata belanja rill sebesar Rp 672 Milliar.

Berdasarkan klasifikasi ekonomi, proporsi belanja Kota Sorong terbesar dialokasikan untuk belanja modal, sementara alokasi berdasarkan sektor terbesar adalah sektor pendidikan. Sektor yang berpotensi sebagai leading sektor seperti sektor perdagangan, sektor pertanian kurang memperoleh dukungan pembiayaan. Kabupaten Sorong, berdasarkan klasifikasi ekonomi, proporsi belanja terbesar dialokasikan untuk belanja modal, sementara alokasi berdasarkan sektor terbesar adalah sektor pekerjaan umum. Sektor yang berpotensi sebagai leading sektor seperti sektor kehutanan dan industri kurang memperoleh dukungan pembiayaan. Kabupaten Raja Ampat, proporsi belanja terbesar dialokasikan untuk belanja modal, sementara alokasi berdasarkan sektor terbesar adalah sektor pekerjaan umum. Sektor yang berpotensi sebagai leading sektor seperti sektor pariwisata, kelautan dan perikanan dan perdagangan kurang memperoleh dukungan pembiayaan.

Untuk mendorong perekonomian di Kota Sorong, Kabuapten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat direkomendasikan beberapa kegiatan berupa: (i) dukungan kebijakan pembiayaan untuk leading sektor atau sektor prioritas, (ii) penghematan belanja barang dan jasa, (iii) pengalokasian belanja untuk sektor-sektor yang menjadi prioritas perlu disinkronkan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah sehingga visi dan misi pembangunan senantiasa mendapat dukungan pembiayaan yang memadai.



06

ANALISIS SEKTOR

Provinsi Papua Barat telah memasuki pembangunan lima tahun ketiga, yaitu periode tahun 2017-2022. Target dan sasaran misi pembangunan pada masa ini ditekankan pada upaya mencapai kemandirian wilayah. Salah satu upaya mencapai kemandirian tersebut melalui akses, layanan, dan kualitas pendidikan.

Ada lima strategi penting dalam rangka mewujudkan kemandirian wilayah melalui akses, layanan, dan kualitas pendidikan. *Pertama*, meningkatkan terwujudnya sinkronisasi kebijakan pendidikan melalui peran koordinasi, pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat. *Kedua*, peningkatan cakupan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah. *Ketiga*, peningkatan kualitas tenaga pendidik pada semua jenjang pendidikan. *Keempat*, peningkatan kualitas substansi dan metode pembelajaran pada semua jenjang pendidikan. Dan *Kelima*, meningkatkan cakupan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal. (RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022).

Pembahasan pada Bab 6 ini difokuskan pada capaian pembangunan pada sektor-sektor strategis di Provinsi Papua Barat, yakni sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor pekerjaan umum dan sektor-sektor ekonomi unggulan.

6.1. SEKTOR PENDIDIKAN

Beberapa indikator pendidikan digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan pendidikan di Provinsi Papua Barat seperti diantaranya: kemampuan baca dan tulis (angka melek huruf), angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Pencapaian pendidikan harus didasarkan pada kemampuan baca dan tulis setiap warga atau yang dikenal pula sebagai indikator angka melek huruf. Penduduk berumur 15 tahun ke atas di Provinsi Papua Barat yang dapat baca dan tulis cukup menggembirakan. Sebanyak 97,37 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas telah memiliki kemampuan baca tulis ini, sementara hanya sebesar 2,63 persen yang tergolong buta aksara, dimana buta aksara tertinggi terjadi di Kabupaten Pegunungan Arfak yang mencapai 20,73 persen (Gambar 6.1).



Gambar 6.1. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Kemampuan Baca dan Tulis, 2018

Sedangkan untuk tiga kabupaten yang menjadi fokus penelitian dalam publikasi ini, yakni Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong, terlihat hanya Kabupaten Sorong yang indikator kemampuan baca tulis masyarakatnya paling

rendah diantara ketiganya, yakni hanya sebesar 96,89 persen, sementara indikator kemampuan baca tulis masyarakat Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat berada pada capaian angka 98,83 persen dan 98,75 persen.

Status Sekolah

Kemudian dari sisi indikator status sekolah, terlihat bahwa persentase penduduk usia 7-24 tahun yang masih bersekolah di Provinsi Papua Barat pada tahun 2018 sebanyak 74,99 persen. Kabupaten Fakfak memiliki persentase tertinggi untuk kategori masih bersekolah dengan persentase sebesar 99,25 persen, dan yang terendah berada di Kabupaten Manokwari Selatan yakni dengan persentase sebesar 93,62 persen. Sementara untuk tiga kabupaten penelitian, terlihat bahwa Kabupaten Sorong memiliki persentase tertinggi untuk kategori masih bersekolah, yakni dengan persentase sebesar 79,25 persen, disusul oleh untuk Kota Sorong dengan persentase sebesar 77,26 persen dan Kabupaten Raja Ampat dengan persentase sebesar 69,04 persen (Gambar 6.2).

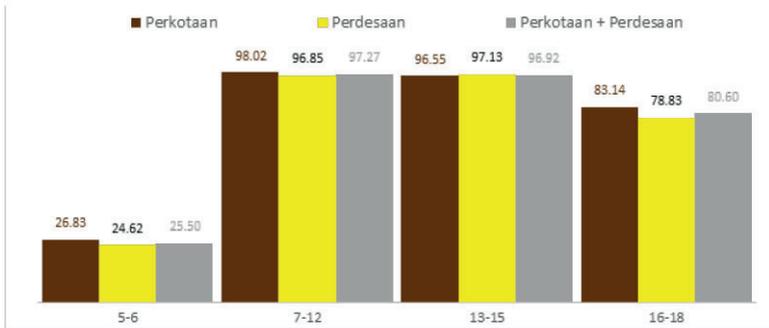


Gambar 6.2. Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/ Kota dan Status Sekolah, 2018

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS Provinsi Papua Barat

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

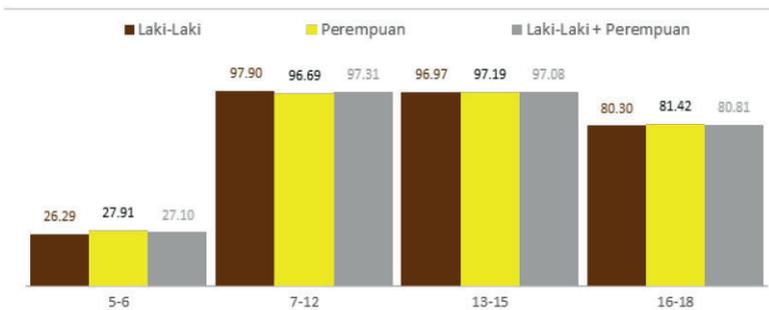
Angka Partisipasi Sekolah (APS) mengukur persentase penduduk usia sekolah yang masih bersekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk kelompok umur yang sesuai. Pada perhitungan APS, pendidikan nonformal seperti paket A, B, dan C juga diperhitungkan. Indikator ini mencerminkan pemerataan akses pendidikan dasar.



Gambar 6.3. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Perkotaan dan Pedesaan di Papua Barat, 2018

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS Provinsi Papua Barat

Berdasarkan gambar 6.3, terlihat bahwa pada tahun 2018 sebanyak 97,31 persen penduduk usia 7 – 12 tahun berstatus masih sekolah terhadap penduduk usia 7-12 tahun secara total. Sementara itu, tren yang terus menurun ditunjukkan pada APS kelompok usia 13-15 dan 16-18 tahun. Pada kelompok usia 13-15 tahun, sebanyak 97,08 persen masih bersekolah, dan di kelompok usia 16-18 sebanyak 80,81 persen yang masih bersekolah. Jika dilihat sepintas, maka dapat dikatakan APS di perkotaan jauh lebih baik dibanding wilayah pedesaan yang ditunjukkan dengan nilai yang cukup berbeda di antara keduanya terkhusus di kelompok usia 16-18 tahun.

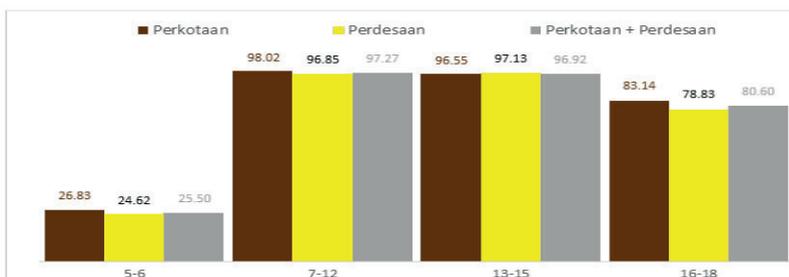


Gambar 6.4. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Papua Barat, 2018

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS Provinsi Papua Barat

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

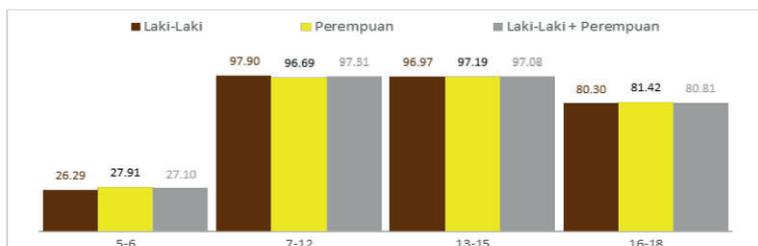
Angka Partisipasi Sekolah (APS) mengukur persentase penduduk usia sekolah yang masih bersekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk kelompok umur yang sesuai. Pada perhitungan APS, pendidikan nonformal seperti paket A, B, dan C juga diperhitungkan. Indikator ini mencerminkan pemerataan akses pendidikan dasar.



Gambar 6.5. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Perkotaan dan Pedesaan di Papua Barat, 2018

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS Provinsi Papua Barat

Berdasarkan gambar 6.3, terlihat bahwa pada tahun 2018 sebanyak 97,31 persen penduduk usia 7 – 12 tahun berstatus masih sekolah terhadap penduduk usia 7-12 tahun secara total. Sementara itu, tren yang terus menurun ditunjukkan pada APS kelompok usia 13-15 dan 16-18 tahun. Pada kelompok usia 13-15 tahun, sebanyak 97,08 persen masih bersekolah, dan di kelompok usia 16-18 sebanyak 80,81 persen yang masih bersekolah. Jika dilihat sepintas, maka dapat dikatakan APS di perkotaan jauh lebih baik dibanding wilayah pedesaan yang ditunjukkan dengan nilai yang cukup berbeda di antara keduanya terkhusus di kelompok usia 16-18 tahun.



Gambar 6.6. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Papua Barat, 2018

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS Provinsi Papua Barat

Penduduk laki-laki yang masih bersekolah pada kelompok umur 7-12 tahun menunjukkan porsi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, sementara penduduk perempuan yang masih bersekolah pada kelompok umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun justru menunjukkan porsi yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki (Gambar 6.6).

Tabel 6.1. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2017-2018 (Persen)

Kabupaten/ Kota	2017			2018		
	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fakfak	99.00	98.57	86.66	98.86	n.a	90.73
Kaimana	98.68	98.49	70.51	98.26	99.02	75.96
Teluk Wondama	96.32	96.25	75.84	97.10	97.16	71.70
Teluk Bintuni	94.85	95.87	73.47	94.29	95.79	71.14
Manokwari	95.41	96.05	87.32	95.03	97.24	85.43
Sorong Selatan	99.11	98.24	85.06	99.25	98.03	80.19
Sorong	99.02	98.07	80.02	99.12	97.15	89.07
Raja Ampat	94.67	93.81	73.71	95.26	95.00	64.07
Tambrau	95.99	95.89	78.67	95.27	95.98	82.63
Maybrat	NA	NA	79.20	n.a	n.a	81.96
Manokwari Selatan	94.19	93.55	74.54	93.62	94.38	64.62
Pegunungan Arfak	95.08	92.36	79.62	95.61	92.00	77.75
Kota Sorong	98.17	97.05	80.51	98.82	96.55	80.45
Papua Barat	97.27	96.92	80.60	97.31	97.08	80.81

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS Provinsi Papua Barat

Perbedaan APS penduduk usia 7-12 tahun antar kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tidak berbeda nyata, baik pada tahun 2017 maupun tahun 2018. Demikian pula halnya dengan ketiga kabupaten penelitian, dimana Kabupaten

Sorong menunjukkan capaian angka partisipasi sekolah yang lebih tinggi pada semua kelompok usia dibandingkan dengan Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. Hal ini disebabkan karena jumlah sekolah dasar telah tersebar hampir merata di semua desa yang ada di kabupaten/kota sebagai buah dari Program Wajib Belajar 6 Tahun yang dicanangkan sejak tahun 1984. Jumlah desa di Provinsi Papua Barat yang telah dilengkapi sekolah dasar hingga tahun 2018 sebanyak 932 desa dari 1.987 desa (BPS, Pendataan Potensi Desa 2018) (Tabel 6.1).

Tabel 6.2. Banyak Desa/Kelurahan yang Memiliki Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2018 (Unit)

Kabupaten/Kota	TK	SD	SMP	SMA	SMK	PT	SLB	PP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Fakfak	30	106	21	7	3	4	0	2
Kaimana	10	76	13	2	3	0	0	1
Teluk Wondama	19	51	16	3	2	0	0	0
Teluk Bintuni	61	84	36	18	1	1	3	3
Manokwari	33	79	32	11	5	10	0	5
Sorong Selatan	30	79	18	4	3	2	1	0
Sorong	36	110	42	20	7	2	0	5
Raja Ampat	22	99	36	16	5	1	0	1
Tambrauw	7	62	18	7	3	0	0	0
Maybrat	12	62	14	4	1	0	0	0
Manokwari Selatan	14	38	13	6	1	5	0	0
Pegunungan Arfak	4	48	16	8	2	0	0	0
Kota Sorong	29	38	22	18	8	11	2	2
Papua Barat	307	932	297	124	44	36	6	19

Sumber: Potensi Desa 2018, BPS Provinsi Papua Barat

Keterangan
SLB : Sekolah Luar Biasa, PP : Pondok Pesantren

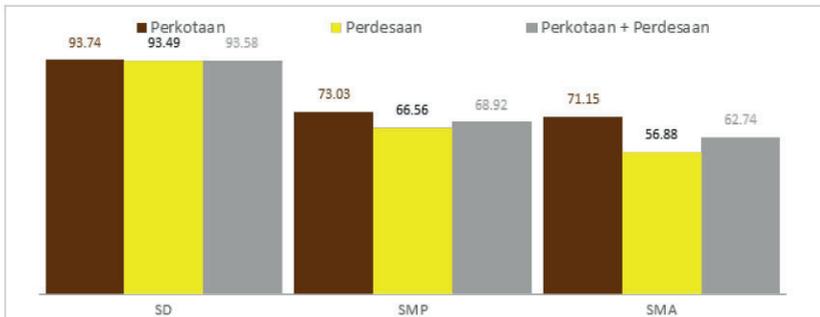
Perbedaan APS tampak nyata pada penduduk usia 16—18 tahun. Kelompok usia 16-18 tahun Kabupaten Fakfak memiliki nilai APS tertinggi sebesar 90,73 persen, sementara yang terendah berada di Kabupaten Raja Ampat sebesar 64,07 persen. Perbedaan APS pada kelompok usia ini sangat dipengaruhi oleh jumlah SMA/SMK. Mengacu pada hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018, jumlah desa di Provinsi

Papua Barat mempunyai SMA sebanyak 124 desa dan SMK sebanyak 44 desa (Tabel 6.2). Fasilitas pendidikan SMA/SMK tersebut banyak terpusat di Kabupaten Sorong, Kota Sorong dan Raja Ampat yang menjadi fokus penelitian dalam publikasi ini.

Dengan adanya informasi ini, maka perlu dilakukan upaya yang konkret dan langsung menyisir desa-desa pedalaman yang kekurangan fasilitas pendidikan. Tentu upaya ini harus juga dicermati lebih dalam terkait lokasi pembangunan fasilitas pendidikan yang harus mudah diakses dan tepat lokasi dan sasaran.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Berbeda dengan APS, angka partisipasi murni (APM) mengukur partisipasi sekolah dari penduduk usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Sebagai contoh, APM SD mengukur partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah SD/ sederajat, APM SMP mengukur partisipasi sekolah penduduk usia 13—15 tahun yang masih bersekolah SMP/ sederajat, dan seterusnya (Gambar 6.7).

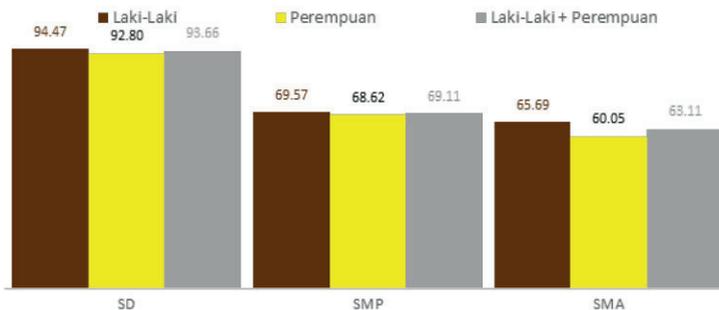


Gambar 6.7. Angka Partisipasi Murni Menurut Perkotaan dan Pedesaan di Papua Barat, 2018

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS Provinsi Papua Barat

Dikaitkan dengan target Pendidikan untuk semua-PUS (Education for All-EFA) di mana pada tahun 2015, semua anak mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan yang bermutu. Target nasional PUS adalah 100 persen APM pada pendidikan dasar dan menengah. Untuk capaian APM SD, Provinsi Papua Barat hampir mencapai target nasional PUS karena telah berada di 93,66 persen pada tahun 2018. Hal berbeda ditunjukkan pada pencapaian APM di tingkat SMP, SMA, dan perguruan tinggi yang masih jauh dari harapan. APM tingkat SMP Papua Barat tahun 2018

hanya 69,11 persen. Hal ini memberikan gambaran bahwa penduduk usia 13-15 tahun yang masih bersekolah SMP di Papua Barat pada tahun 2018 masih cukup rendah. Hal yang tidak berbeda ditunjukkan pula pada APM SMA yang menunjukkan nilai capaian sebesar 63,11 persen (Gambar 6.6).



Gambar 6.8. Angka Partisipasi Murni Menurut Jenis Kelamin di Papua Barat, 2018

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS Provinsi Papua Barat

Menurut jenis kelamin, APM SD menunjukkan perbedaan yang tidak tampak nyata. Perbedaan cukup nyata justru ditunjukkan pada jenjang SMP dan SMA. Pada jenjang SMP, APM laki-laki di Provinsi Papua Barat pada tahun 2018 sebesar 69,57 persen, sementara perempuan hanya 68,62 persen. Pada jenjang selanjutnya, APM SMA laki-laki berada di 65,69 persen, sementara perempuan hanya 60,05 persen (Gambar 6.8). Dari fenomena ini, dapat dilihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, seorang laki-laki jauh lebih banyak sekolah tepat waktu dibanding perempuan.

Pencapaian APM level kabupaten/kota pun menunjukkan perbedaan yang cukup nyata antar wilayah. Di tingkat SMP, APM tertinggi tahun 2018 diraih oleh Kabupaten Maybrat yang mencapai 83,11 persen, sementara yang terendah berada di Kabupaten Tambrauw yang hanya mencapai 51,43 persen. Pada tingkat yang lebih tinggi, SMA misalnya, APM tertinggi juga ditempati oleh Kabupaten Maybrat yang mencapai 73,39 persen, sementara yang terendah berada di Kabupaten Teluk Wondama yang hanya mencapai 39,74 persen. Secara rata-rata, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Maybrat merupakan kabupaten yang pencapaian APM-nya terbaik dibanding kabupaten/kota lainnya.

Sedangkan untuk ketiga kabupaten yang menjadi fokus penelitian dalam publikasi ini, terlihat bahwa Kabupaten Sorong memiliki pencapaian APM tertinggi di tingkat SD

dan SMP jika dibandingkan dengan Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong, yakni dengan capaian APM SD sebesar 96,98 persen dan APM SMP sebesar 73,40 persen, sedangkan pencapaian APM tertinggi di tingkat SMA justru berada di Kota Sorong yakni dengan capaian APM SMA sebesar 70,63 persen, sementara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, capaian APM SMA-nya hanya sebesar 65,58 persen dan 45,33 persen (Tabel 6.3).

Tabel 6.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, Tahun 2017-2018 (Persen)

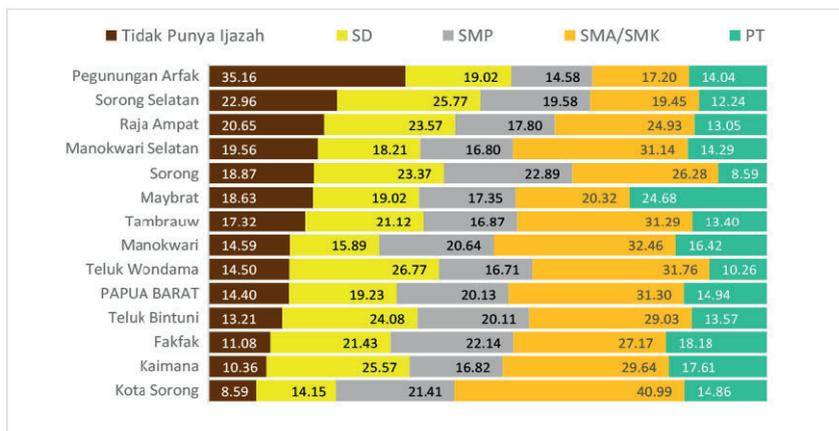
Kabupaten/ Kota (1)	2017			2018		
	SD (2)	SMP (3)	SMA (4)	SD (5)	SMP (6)	SMA (7)
Fakfak	97.70	75.99	70.15	97.34	73.71	66.93
Kaimana	93.65	58.51	56.44	96.43	56.84	52.20
Teluk Wondama	93.48	66.14	39.74	90.82	65.30	38.97
Teluk Bintuni	91.47	64.44	56.16	92.59	65.55	56.12
Manokwari	93.98	73.55	68.52	92.49	74.78	69.32
Sorong Selatan	93.66	52.71	50.83	92.91	57.56	55.72
Sorong	94.20	71.84	67.56	96.98	73.40	65.58
Raja Ampat	92.65	51.52	44.86	92.79	51.08	45.33
Tambrau	95.99	57.44	45.20	95.27	57.49	47.13
Maybrat	96.64	83.86	73.39	97.73	88.39	69.10
Manokwari Selatan	85.29	72.69	43.03	87.40	75.04	47.02
Pegunungan Arfak	95.08	53.70	51.87	95.61	51.68	47.92
Kota Sorong	92.03	72.79	68.87	91.95	71.68	70.63
Papua Barat	93.58	68.92	62.74	93.66	69.11	63.11

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS Provinsi Papua Barat

PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator output lain dalam penyelenggaraan pendidikan. Gambar 6.7 memberikan gambaran tentang pencapaian pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Papua Barat menurut kabupaten/kota dan ijazah/STTB yang dimiliki pada tahun 2018.

Data tersebut mengindikasikan sebesar 14,40 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas tidak memiliki ijazah SD tahun 2018. Hal ini mencerminkan, kualitas SDM dari aspek pendidikan di Papua Barat masih tergolong rendah. Hanya 14,94 Persen penduduk 15 tahun ke atas yang lulus dari perguruan tinggi. Kabupaten dengan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah adalah Kabupaten Pegunungan Arfak yang hampir mencapai 40 persen. Hal ini memberikan informasi bahwa banyaknya penduduk yang tidak bersekolah di wilayah tersebut.



Gambar 6.9. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/ Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2018

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS Provinsi Papua Barat

Sedangkan untuk ketiga kabupaten yang menjadi fokus penelitian dalam publikasi ini, terlihat bahwa Kabupaten Raja Ampat memiliki proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah yang paling terbesar di antara ketiganya yakni mencapai lebih dari 20 persen. Hal ini memberikan informasi bahwa penduduk yang tidak bersekolah di Kabupaten Raja Ampat jauh lebih banyak dibandingkan dengan Kabupaten Sorong dan Kota Sorong. Dari gambar 6.9 juga terlihat bahwa Kabupaten Raja Ampat memiliki proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah SD terbesar diantara ketiganya, yakni sebesar 23,57 persen, Kabupaten Sorong memiliki proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah SMP terbesar diantara ketiganya, yakni sebesar 22,89 persen, dan Kota Sorong memiliki proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah SMA dan perguruan tinggi terbesar diantara ketiganya, yakni masing-masing sebesar 40,99 persen dan 14,86 persen.

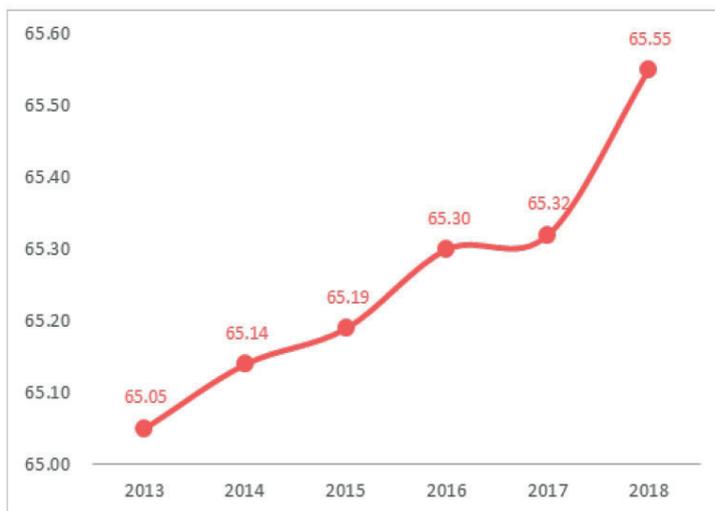
6.2. SEKTOR KESEHATAN

Mulai 1 Januari 2014, Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Sebelumnya, dalam UU No. 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Secara operasional, pelaksanaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI); Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; dan Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional).

Sebelum program jaminan kesehatan nasional bergulir, Pemerintah RI telah menjalankan program jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin. Tujuan Jamkesmas adalah meningkatkan akses terhadap masyarakat miskin dan hampir miskin agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan demikian, sebelum tahun 2014, pemerintah memberikan jaminan kesehatan terbatas pada penduduk miskin atau hampir miskin.

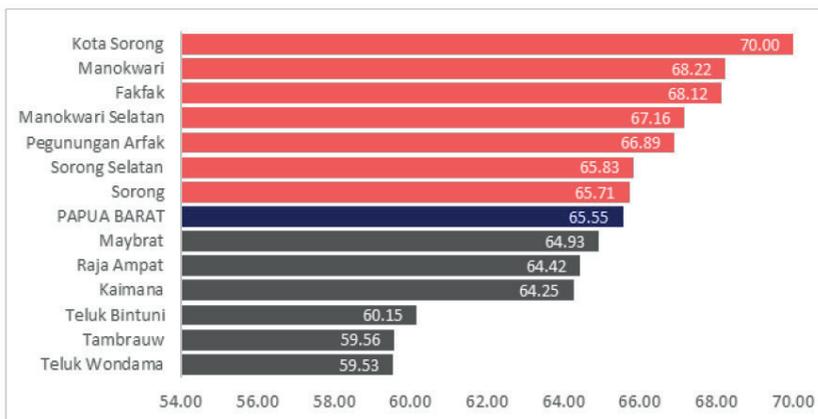
Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Papua Barat dalam 6 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, UHH Papua Barat berada pada level 65,05 tahun, sementara di 2018 telah meningkat menjadi 65,55 tahun (Gambar 6.10). Peningkatan ini meski tidak signifikan, tapi patut untuk diapresiasi. UHH Papua Barat bermakna rata-rata usia seorang bayi yang lahir dapat hidup hingga mencapai 65 hingga 66 tahun dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya kini. UHH menjadi alat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan khususnya.



Gambar 6.10. Umur Harapan Hidup Provinsi Papua Barat, 2013-2018

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2018, BPS Provinsi Papua Barat



Gambar 6.11. Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2018

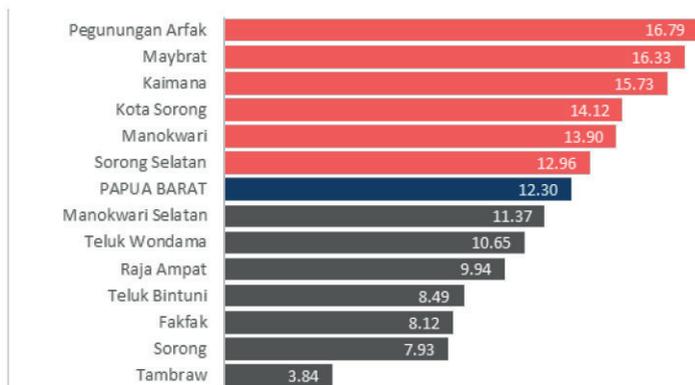
Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2018, BPS Provinsi Papua Barat

UHH antar kabupaten/kota menunjukkan perbedaan harapan hidup yang cukup signifikan. Kota Sorong menjadi wilayah dengan UHH tertinggi yang mencapai 70 tahun, sementara yang terendah berada di Kabupaten Teluk Wondama dengan capaian UHH sebesar 59,53 tahun. Sementara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, keduanya harus puas di capaian UHH 65,71 tahun dan 64,42 tahun (Gambar 6.11). Kesenjangan antara Kota Sorong dengan Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat atau ekstrimnya dengan Kabupaten Teluk Wondama cukup memprihatinkan, mengingat *gap* yang terjadi pada capaian nilai UHH ini terpaut lebih dari 10 tahun. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi kabupaten-kabupaten yang masih memiliki UHH yang rendah untuk dapat meningkatkan kualitas kesehatan di daerahnya. Penambahan fasilitas kesehatan dan peningkatan kualitas tenaga medis menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan.

Sejak tahun 2014, penghitungan UHH mengalami pembaharuan dari metode sebelumnya. Perubahan metode penghitungan UHH terkait dengan perubahan metode proyeksi penduduk yang semula menggunakan metode estimasi (geometrik) berubah menjadi metode *component-cohort*. Selain itu, adanya asumsi Total Fertility Rate (TFR) nasional sebesar 2,1 di tahun 2025 turut mempengaruhi penghitungan umur harapan hidup baik di tingkat nasional, provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Dengan adanya perubahan ini, maka penghitungan UHH tahun sebelumnya juga dilakukan perbaikan.

Morbiditas

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah angka kesakitan atau morbiditas. Angka ini menunjukkan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang mengakibatkan gangguan terhadap aktivitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah atau mengerjakan pekerjaan rumah.



Gambar 6.12. Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2018

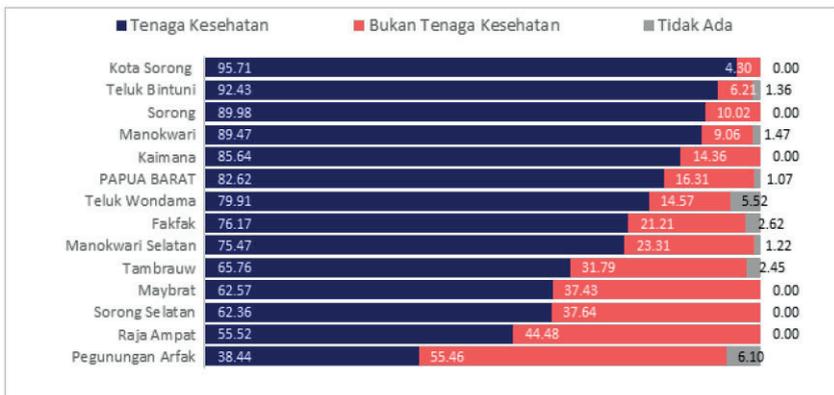
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS
Provinsi Papua Barat

Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Persentase penduduk yang menderita sakit selama sebulan terakhir di Papua Barat tahun 2018 mencapai 12,30 persen, artinya dari seluruh jumlah penduduk yang ada, terdapat 1 dari 8 orang penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Semakin tingginya angka ini menunjukkan buruknya tingkat kesehatan masyarakat tersebut. Tahun 2018 di Papua Barat, Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi kabupaten dengan keluhan kesehatan yang tertinggi mencapai 16,79 persen, sementara yang terendah di Kabupaten Tambrau yang hanya 3,84 persen. Sementara untuk ketiga kabupaten penelitian, terlihat bahwa Kota Sorong menjadi kabupaten dengan keluhan kesehatan yang tertinggi yakni mencapai 14,12 persen, sedangkan yang terendah diantara ketiganya adalah Kabupaten Sorong yang persentase keluhan kesehatannya hanya sebesar 7,93 persen (Gambar 6.12). Jika diperhatikan lebih dalam, wilayah yang memiliki penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang lebih tinggi lebih disebabkan oleh faktor akses transportasi ke fasilitas kesehatan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat di lingkungan

tersebut cukup rendah dan perlunya upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang mudah, murah, dan merata untuk semua penduduk.

Penurunan angka kesakitan dan peningkatan angka umur harapan hidup tidak terlepas dari upaya pencegahan (preventif) dan kuratif (pengobatan) baik yang dilakukan oleh masing-masing individu maupun diinisiasi oleh pemerintah. Beberapa upaya preventif tersebut antara lain: peningkatan peran tenaga kesehatan dalam proses persalinan, peningkatan peran ibu dalam pemberian ASI eksklusif, dan pemberian imunisasi.



Gambar 6.13. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Menurut Penolong Persalinan Kelahiran Terakhir di Papua Barat, 2018

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS Provinsi Papua Barat

Peningkatan peran tenaga kesehatan dalam proses persalinan bertujuan untuk mengurangi kasus kematian bayi. Dengan menurunkan jumlah kasus kematian bayi, diharapkan nantinya dapat meningkatkan lama harapan hidup. Penolong persalinan kelahiran terakhir di Papua Barat tahun 2018 oleh tenaga kesehatan berada di capaian sebesar 82,62 persen, hal ini berarti bahwa 4 dari 5 persalinan terakhir dibantu oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang dimaksud di sini mencakup dokter kandungan, dokter umum, bidan, dan perawat. Sementara bukan tenaga kesehatan seperti dukun beranak/paraji, famili, dan lain.

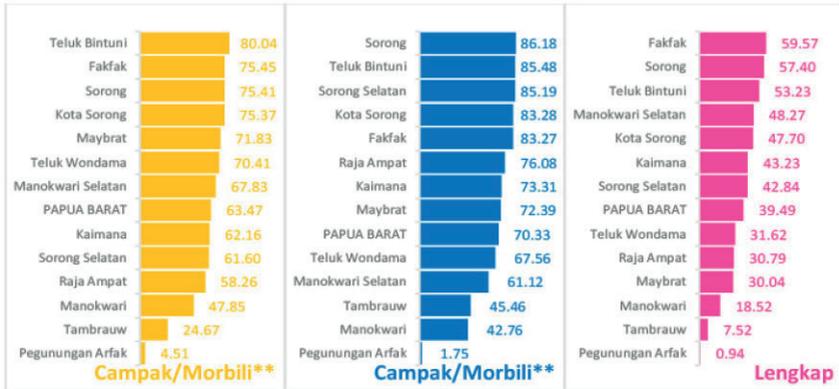
Kota Sorong memiliki persentase tertinggi yang persalinan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan mencapai 95,71 persen. Atau dengan kata lain, 9 dari 10 kelahiran terakhir di Kota Sorong ditolong oleh tenaga kesehatan.

Di sisi lain, Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi satu-satunya kabupaten di Papua Barat yang penolong persalinan terakhirnya di bawah 40 persen atau hanya sebesar 38,44 persen, dan Kabupaten Raja Ampat menjadi satu-satunya kabupaten di Papua Barat yang penolong persalinan terakhirnya di bawah 60 persen atau hanya sebesar 55,52 persen (Gambar 6.13). Tingginya angka persalinan tanpa ditolong tenaga kesehatan di Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Raja Ampat, utamanya dikarenakan setidaknya oleh dua hal yaitu: *pertama*, masih kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai dan menjangkau seluruh desa; *kedua*, masih adanya budaya melahirkan masyarakat yang masih konvensional, baik dilakukan sendiri maupun dibantu oleh anggota keluarga saja. Persalinan pun biasanya dilakukan di luar rumah atau di hutan, sehingga memungkinkan risiko yang lebih besar untuk melahirkan anak lahir mati.

Imunisasi & ASI

Imunisasi adalah pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu. Vaksin membantu tubuh untuk menghasilkan antibodi yang berfungsi melindungi dan mencegah dari penyakit agar anak sehat.





Gambar 6.14. Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi dan Kabupaten/Kota di Papua Barat, 2017

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS Provinsi Papua Barat

Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa imunisasi yang wajib diberikan kepada bayi berumur satu tahun adalah BCG, DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis B. Waktu pemberiannya sudah ditetapkan secara bertahap. Imunisasi BCG diberikan satu kali pada anak usia 0-2 bulan. Demikian juga untuk imunisasi Polio dan Hepatitis B untuk pertama kali. Imunisasi DPT dan Polio diberikan secara bersamaan dan berulang pada usia 2, 3, atau 4 bulan dan pengulangannya 4 bulan kemudian sebanyak 3 kali. Imunisasi campak diberikan sebanyak 2 kali. Pertama, pada saat anak berumur 9 bulan atau lebih, dan kedua diberikan pada usia 5-7 tahun. Pada kejadian luar biasa dapat diberikan pada usia 6 bulan dan diulang 6 bulan kemudian.

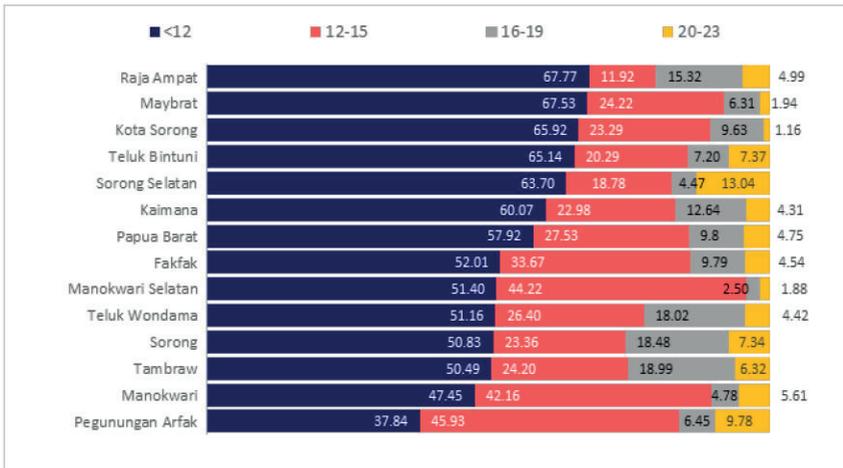
Gambar 6.14 menunjukkan cakupan layanan imunisasi pada anak balita menurut jenis imunisasi di tahun 2017 dikarenakan data tahun 2018 belum tersedia. Jika dilihat dari cakupan imunisasi lengkap, hanya sebanyak 39,49 persen baduta yang memperoleh imunisasi lengkap. Hal ini memprihatinkan mengingat kegunaan imunisasi bagi bayi sangat besar untuk menjaga kesehatannya. Imunisasi lengkap tertinggi berada di Kabupaten Fakfak dengan capaian sebesar 59,57 persen, sementara yang terendah berada di Kabupaten Pegunungan Arfak yang hanya mencakup 0,94 persen. Sedangkan untuk tiga kabupaten penelitian, terlihat bahwa cakupan imunisasi tertinggi berada di Kabupaten Sorong dengan capaian sebesar 57,40 persen, sementara yang terendah berada di Kabupaten Raja Ampat yang hanya sebesar 30,79 persen.

Hal yang tidak berbeda ditunjukkan untuk pemberian imunisasi menurut jenis imunisasi. Kabupaten Pegunungan Arfak selalu menempati posisi yang terbelakang misalnya saja BCG hanya 11,80 persen, DPT hanya 7,65 persen, polio hanya 22,00 persen, campak/morbili hanya 4,51 persen, dan hepatitis B hanya 1,75 persen. Sedangkan untuk tiga kabupaten penelitian, terlihat bahwa Kabupaten Raja Ampat selalu menempati posisi cakupan imunisasi yang terendah di antara ketiganya, kecuali untuk imunisasi BCG dimana Kabupaten Raja Ampat sedikit lebih tinggi cakupannya dibanding Kabupaten Sorong.

Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah agar dapat meningkatkan target imunisasi di Kabupaten Pegunungan Arfak, ataupun Kabupaten Raja Ampat, mengingat kondisi geografis Kabupaten Pegunungan Arfak yang berupa wilayah pegunungan dan kondisi geografis Kabupaten Raja Ampat yang berupa wilayah kepulauan yang terdiri atas banyak pulau yang terpencar-pencar. Lebih lanjut terkait peningkatan kekhawatiran ibu yang memiliki bayi untuk memberikan imunisasi pada anaknya akibat pemberitaan negatif tentang dampak negatif pemberian imunisasi pada anak sebagai akibat beredarnya vaksin imunisasi palsu.

Selain imunisasi, upaya meningkatkan ketahanan tubuh bayi adalah dengan pemberian Air Susu Ibu (ASI). Pemberian ASI pada anak balita merupakan pola asuh yang sangat dianjurkan. Bila kondisi kesehatan ibu setelah melahirkan baik, menyusui merupakan cara memberi makan yang paling ideal untuk 4-6 bulan pertama sejak dilahirkan tanpa memberikan makanan tambahan, karena ASI dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi.

Gambar 6.15 menunjukkan pemberian ASI kepada anak kurang dari 2 tahun di Provinsi Papua Barat pada tahun 2017 dikarenakan data tahun 2018 belum tersedia. Secara umum, rata-rata pemberian ASI di Papua Barat yang kurang dari 12 bulan sebesar 57,92 persen. Sementara itu, pemberian ASI yang dilakukan hingga anak berusia 20-23 bulan hanya sebesar 4,75 persen. Uniknya diantara kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, ternyata Kabupaten Raja Ampat sebagai salah satu kabupaten yang menjadi ojek penelitian memiliki rata-rata pemberian ASI kurang dari 12 bulan tertinggi, yakni sebesar 67,77 persen. Pemberian ASI eksklusif menurut Badan Kesehatan Dunia WHO adalah selama 6 bulan efektif bagi bayi. ASI eksklusif adalah yang paling efektif dalam mencegah kematian anak. ASI eksklusif diberikan kepada bayi selama 6 bulan tanpa penambahan apapun.

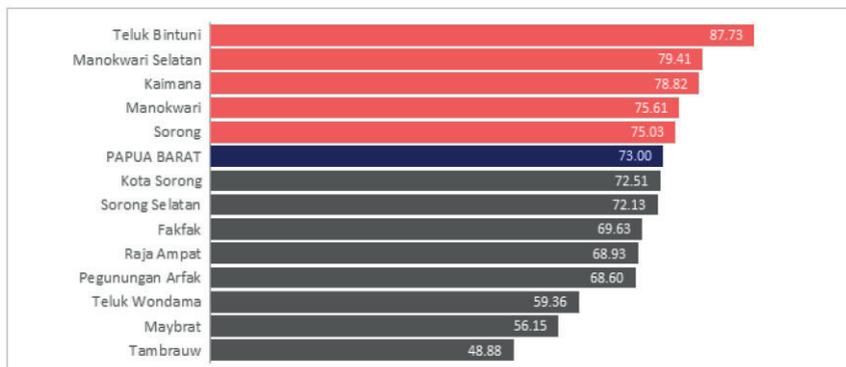


Gambar 6.15. Persentase Anak Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI Menurut Lama Pemberian ASI dan Kabupaten/Kota di Papua Barat, 2017

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS Provinsi Papua Barat

Konsumsi Rokok

Rokok seakan sudah mendarah daging bagi masyarakat Indonesia. Ketergantungan akan rokok seakan mampu menggantikan nasi untuk konsumsi makanan seperti pepatah Jawa “*Mangan ora mangan sing penting kumpul*”. Biasanya kegiatan *ngumpul/nongkrong* pun tak lepas dengan hadirnya si rokok. Padahal telah jelas peringatan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan akan bahaya rokok. Rokok bukan hanya berbahaya bagi si perokok aktif saja, melainkan juga bagi orang di sekitarnya (perokok pasif) yang menghirup asap rokok tersebut. Ancaman yang ditampilkan pada bungkus rokok pun seakan tak memberikan efek jera bagi para “pecandu rokok”.



Gambar 6.16. Persentase Rata-rata Jumlah Barang Rokok yang Dihisap per Minggu oleh Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Merokok Sebulan Terakhir di Papua Barat, 2017

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS

Provinsi Papua Barat

Di Provinsi Papua Barat, konsumsi rokok pun tergolong cukup tinggi. Rata-rata jumlah batang rokok yang dihisap per minggu oleh penduduk 5 tahun ke atas yang merokok sebulan terakhir di tahun 2017 (data 2018 belum tersedia) mencapai 73 batang (Gambar 6.16). Jika dirata-ratakan per hari, setidaknya para perokok menghabiskan 7 hingga 8 batang rokok per hari.

Jika ditelisik menurut kabupaten/kota, Teluk Bintuni menjadi yang terbanyak dalam rata-rata jumlah batang rokok yang dihisap per minggu oleh penduduk 5 tahun ke atas yang merokok sebulan terakhir sebanyak 87 hingga 88 batang rokok per minggu. Sementara itu, yang paling sedikit di Kabupaten Tambrauw sebesar 48 hingga 49 batang rokok per minggu. Kabupaten Sorong menjadi terbanyak dalam rata-rata jumlah batang rokok yang dihisap per minggu oleh penduduk 5 tahun ke atas yang merokok sebulan terakhir sebanyak 75 batang rokok per minggu, sedangkan yang tersedikit berada di Kabupaten Raja Ampat dengan 6 hingga 69 batang rokok per minggunya (Gambar 6.16).

Merokok bukanlah budaya dan bukanlah kebiasaan yang baik, meski tiap orang berhak untuk memilih apa yang disukainya. Karena hal ini akan berdampak pada keutuhan kehidupan bermasyarakat secara umum. Hal ini masih menjadi polemik yang tidak berujung, di satu sisi pemerintah menerima pajak cukai rokok yang cukup besar bagi APBN, sementara di sisi lain, pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan

dan menjaga kesehatan masyarakatnya dari penyakit yang disebabkan oleh rokok melalui Kementerian Kesehatan. Tentu perlunya edukasi yang baik dan menyeluruh dari pemerintah kepada masyarakat tentang bahaya konsumsi rokok, terlebih jika hal tersebut dilakukan di tempat umum. Bagi perokok aktif pun harus tahu dan sadar diri bahwa tidak semua orang menyukai menghirup asap rokok, sehingga mampu memahami kondisi orang lain bukan malah mengesampingkannya demi kesenangan dan kepuasan pribadi.



07

ANALISIS KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI REGIONAL

7.1. TIPOLOGI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014

Setiap daerah memiliki kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Ada daerah yang mampu memacu kegiatan ekonominya sehingga dapat tumbuh pesat dan ada pula daerah yang siklus ekonominya stagnan di satu titik atau bahkan tumbuh negatif. Untuk dapat membandingkan tingkat kemajuan suatu daerah dengan daerah lain dalam suatu lingkup referensi yang sama, maka dapat digunakan Tipologi Klassen sebagai alat analisis.

Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita sebagai sumbu horizontal. Daerah yang diamati akan dibagi menjadi empat klasifikasi yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high share*), daerah maju tapi tertekan (*high share but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low share*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low share*).

Tipologi Klassen merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional yang dapat digunakan untuk mengetahui klasifikasi sektor perekonomian wilayah Provinsi Papua Barat. Melalui analisis ini akan diperoleh empat klasifikasi melalui pendekatan wilayah. Kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai karakteristik pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita yang berbeda-beda diklasifikasi dengan tipologi kelas pendekatan wilayah (Syafrizal, 1997). Pada dasarnya, Tipologi Klassen membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah.

Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu horizontal dan PDRB per kapita sebagai sumbu vertikal, daerah yang diamati diklasifikasi menjadi empat dengan model gambar sebagai berikut (Gambar 7.1).



Keterangan: y_1 = PDRB perkapita kabupaten/kota ,
 y = pendapatan total perkapita provinsi Papua Barat
 r_1 = laju pertumbuhan PDRB kabupaten/ kota ,
 r = laju pertumbuhan total PDRB provinsi Papua Barat

Gambar 7.1. Klasifikasi Tipologi Klassen

Syafrizal (1997) dan Kuncoro (1999) menjelaskan bahwa dengan menggunakan alat analisis Tipologi Klassen maka dapat diperoleh empat karakteristik pertumbuhan masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

a. Kuadran I: Daerah maju dan tumbuh cepat (*Rapid Growth Region*)

Daerah maju dan tumbuh cepat (*Rapid Growth Region*) adalah daerah yang mengalami laju pertumbuhan PDRB dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata seluruh kabupaten/kota di Papua Barat. Pada dasarnya daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang paling maju, baik dari segi tingkat pembangunan maupun kecepatan pertumbuhan. Biasanya daerah-daerah ini merupakan daerah yang mempunyai potensi pembangunan yang sangat besar dan telah dimanfaatkan secara baik untuk kemakmuran masyarakat setempat. Karena diperkirakan daerah ini akan terus berkembang dimasa mendatang.

b. Kuadran II: Daerah maju tapi tertekan (*Retarded Region*)

Daerah maju tapi tertekan (*Retarded Region*) adalah daerah-daerah yang relatif maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Karena itu, walaupun daerah ini merupakan daerah telah maju tetapi dimasa mendatang diperkirakan pertumbuhannya tidak akan begitu cepat, walaupun potensi pembangunan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar.

c. Kuadran III: Daerah relatif tertinggal (*Relatively backward Region*).

Daerah relatif tertinggal (*Underdeveloped Region*) adalah daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan PDRB perkapita yang berada dibawah rata-rata dari seluruh kabupaten/kota di Papua Barat. Ini berarti bahwa baik tingkat kemakmuran masyarakat maupun tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah ini masih relatif rendah. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa didaerah ini tidak akan berkembang di masa mendatang. Melalui pengembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah berikut tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat setempat diperkirakan daerah ini secara bertahap akan dapat pula mengejar ketertinggalannya.

d. Kuadran IV: Daerah berkembang cepat (*Growing Region*)

Daerah berkembang cepat (*Growing Region*) pada dasarnya adalah daerah yang memiliki potensi pengembangan sangat besar, tetapi masih belum diolah secara baik. Oleh karena itu, walaupun tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi namun tingkat pendapatan per kapitanya, yang mencerminkan tahap pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih relatif rendah dibandingkan dengan daerah lain. Karena itu dimasa mendatang daerah ini diperkirakan akan mampu berkembang dengan pesat untuk mengejar ketertinggalannya dengan daerah maju.

Secara lebih jelas mengenai pengklasifikasian kabupaten/kota berdasarkan Tipologi Klassen dapat dilihat pada Tabel 7.1. Tidak ada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat yang memiliki kriteria dengan pertumbuhan maju dan tumbuh pesat. Kabupaten Sorong berada di kuadran ke II yang berarti bahwa memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari Provinsi Papua Barat, tetapi PDRB perkapitanya lebih tinggi dari Provinsi Papua Barat. Kabupaten Sorong merupakan daerah yang termasuk kategori “relatif maju tetapi tertekan” yang dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Karena itu, walaupun daerah ini merupakan daerah telah maju tetapi di masa mendatang diperkirakan pertumbuhannya tidak akan begitu cepat, walaupun potensi pembangunan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar.

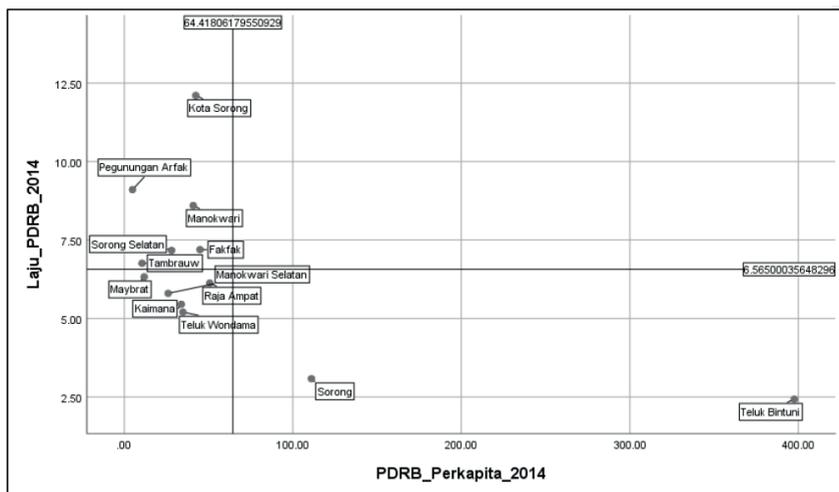
Kabupaten/kota dengan kriteria Maju Tetapi Tertekan: <ul style="list-style-type: none"> - Teluk Bintuni - Kabupaten Sorong 	Kabupaten/kota dengan kriteria Maju dan Tumbuh Pesat: <ul style="list-style-type: none"> -
Kabupaten/kota dengan kriteria Tertinggal: <ul style="list-style-type: none"> - Manokwari Selatan - Raja Ampat - Maybrat - Kaimana - Teluk Wondama 	Kabupaten/kota dengan kriteria Berkembang Pesat: <ul style="list-style-type: none"> - Kota Sorong - Pegunungan Arfak - Sorong Selatan - Tambrau - Fakfak

Tabel 7.1. Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2014.

Kota Sorong yang posisinya berdekatan dengan Kabupaten Sorong berada pada klasifikasi daerah dengan kriteria “berkembang pesat”. Artinya Kota Sorong memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari Provinsi Papua Barat, tetapi PDRB perkapitanya lebih rendah dari Provinsi Papua Barat. Kota Sorong ini pada dasarnya merupakan daerah yang memiliki potensi pengembangan yang sangat besar, namun masih belum diolah secara baik. Oleh karena itu, walaupun tingkat pertumbuhan ekonominya rendah namun tingkat PDRB perkapitanya, yang mencerminkan tahap pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih relatif tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Karena itu dimasa mendatang daerah ini diperkirakan akan mampu berkembang dengan pesat untuk mengejar ketertinggalannya dengan daerah maju.

Kabupaten Raja Ampat termasuk daerah dengan kriteria “tertinggal” atau dengan kata lain memiliki tingkat pertumbuhan dan PDRB perkapita yang berada dibawah

rata-rata. Ini berarti bahwa baik tingkat kemakmuran masyarakat maupun tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Raja Ampat ini masih relatif rendah. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa Kabupaten Raja Ampat tidak akan berkembang di masa mendatang. Melalui pengembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah berikut tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat setempat maka daerah ini diperkirakan secara bertahap akan dapat pula mengejar ketertinggalannya.

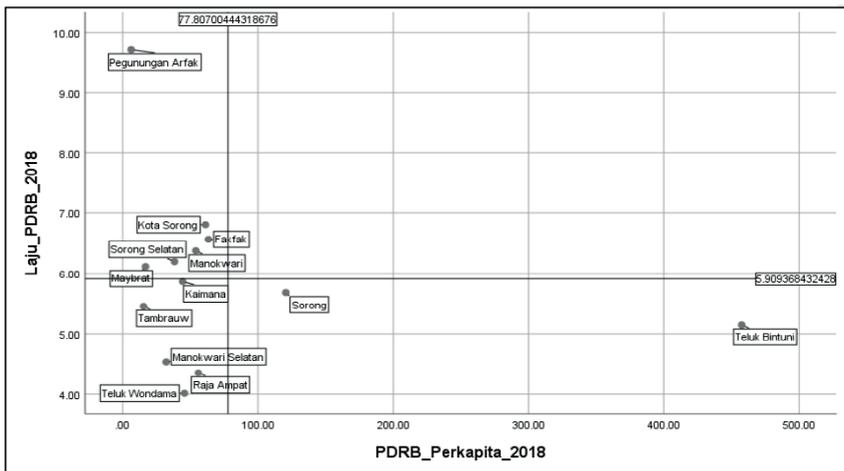


Gambar 7.2. Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Papua Barat Tahun 2014

<p>Kabupaten/kota dengan kriteria Maju Tetapi Tertekan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pegunungan Arfak - Kota Sorong - Fakfak - Manokwari - Sorong Selatan - Maybrat 	<p>Kabupaten/kota dengan kriteria Maju dan Tumbuh Pesat:</p> <ul style="list-style-type: none"> -
<p>Kabupaten/kota dengan kriteria Tertinggal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaimana - Tambrauw - Manokwari Selatan - Raja Ampat - Teluk Wondama 	<p>Kabupaten/kota dengan kriteria Berkembang Pesat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Sorong - Teluk Bintuni

Tabel 7.2. Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2018

Pada Tabel 7.2 terlihat bahwa tidak ada kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat yang memiliki kriteria dengan pertumbuhan maju dan tumbuh pesat. Kabupaten Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat terletak di kuadran ke-2 (maju tapi tertekan) yang berarti bahwa Kabupaten Manokwari bersama Kota Sorong dan empat kabupaten/kota lainnya memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari Provinsi Papua Barat, tetapi PDRB per kapitanya lebih rendah dari Provinsi Papua Barat.



Gambar 7.3. Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Papua Barat Tahun 2018

Berdasarkan gambar 7.3 terlihat bahwa untuk posisi Kabupaten Sorong tetap di bagian Kabupaten dengan kriteria maju tetapi tertekan. Dengan pertumbuhannya yang relatif naik dibandingkan tahun 2014, terlihat Kabupaten Sorong perlahan tetapi pasti akan mempunyai peluang untuk menjadi kabupaten maju dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Yang menarik adalah Kota Sorong, yang mengalami pergerakan yang menurun pada tahun 2018 dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Kota Sorong justru pertumbuhannya jauh dibawah Kabupaten Pegunungan Arfak. Dan mendekati daerah-daerah yang rentan untuk menjadi daerah terbelakang. Pertumbuhan ekonomi Kota Sorong masih diatas nilai pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat, akan tetapi posisinya mengkhawatirkan untuk menjadi daerah yang terbelakang, jika tidak dilakukan inovasi strategi dalam meningkatkan pembangunan daerah khususnya terkait sumber daya manusianya. Peluang untuk menjadi kota yang maju dan pertumbuhan yang cepat sangat dimungkinkan oleh Kota Sorong jika ia memperbaiki struktur ekonomi masyarakatnya.

Kabupaten Raja Ampat juga posisinya masih tetap di bagian kabupaten dengan kriteria terbelakang. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, pada tahun 2018 justru pertumbuhannya semakin menurun. Membuat strategi baru dengan membangun fasilitas berupa sarana dan prasarana di semua sektor perekonomian, termasuk dengan memberikan edukasi kepada semua masyarakatnya untuk mengembangkan potensi lokal daerahnya. Tetapi peluang untuk menjadi kabupaten maju walau dengan pertumbuhan yang lambat juga sangat memungkinkan, karena beda antara nilai dari PDRB perkapitanya dengan rata-rata nilai PDRB perkapita Provinsi Papua Barat tidak terlalu jauh jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang masuk dalam kategori terbelakang

7.1. TIPOLOGI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014

Tipologi Klassen juga dapat digunakan untuk melihat tipologi daerah berdasarkan ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan merubah laju pertumbuhan ekonomi menjadi IPM. Kuncoro (2002) menjelaskan bahwa dengan menggunakan alat analisis Tipologi Klassen kemudian dapat diperoleh empat karakteristik IPM masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

Kuadran I: Daerah maju dan tumbuh cepat (*Rapid Growth Region*)

Daerah maju dan tumbuh cepat (*Rapid Growth Region*) adalah daerah yang mengalami laju pertumbuhan PDRB dan IPM yang lebih tinggi dari rata-rata seluruh kabupaten/kota di Papua Barat.

Kuadran II: Daerah maju tapi tertekan (*Retarded Region*)

Daerah maju tapi tertekan (*Retarded Region*) adalah daerah-daerah yang relatif maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir IPM-nya lebih rendah dari rata-rata seluruh kabupaten/kota di Papua Barat.

Kuadran III: Daerah relatif tertinggal (*Relatively backward Region*).

Daerah relatif tertinggal (*Underdeveloped Region*) adalah daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan IPM yang berada dibawah rata-rata dari seluruh kabupaten/kota di Papua Barat.

Kuadran IV: Daerah berkembang cepat (*Growing Region*)

Daerah berkembang cepat (*Growing Region*) pada dasarnya adalah daerah yang memiliki potensi pengembangan sangat besar, tetapi masih belum diolah secara baik. Oleh karena itu, walaupun tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi namun IPM yang

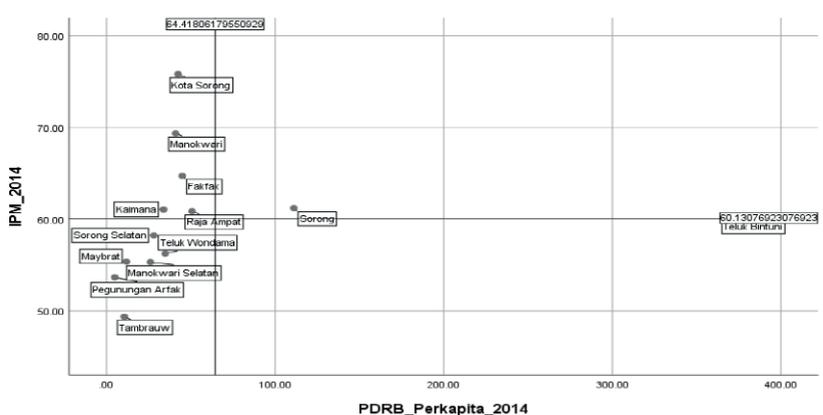
telah dicapai sebenarnya masih relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata seluruh kabupaten/kota di Papua Barat.

Secara lebih jelas mengenai pengklasifikasian kabupaten/kota berdasarkan Tipologi Klassen dapat dilihat pada tabel 7.3.

Tabel 7.3. Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat berbasis IPM, Tahun 2014

<p>Kabupaten/kota dengan kriteria Maju Tetapi Tertekan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kota Sorong - Manokwari - Fakfak - Kaimana - Raja Ampat 	<p>Kabupaten/kota dengan kriteria Maju dan Tumbuh Pesat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Sorong
<p>Kabupaten/kota dengan kriteria Tertinggal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sorong Selatan - Manokwari Selatan - Maybrat - Teluk Wondama - Pegunungan Arfak - Tambrauw 	<p>Kabupaten/kota dengan kriteria Berkembang Pesat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teluk Bintuni

Pada tabel 7.3 terlihat bahwa pada tahun 2014, Kabupaten Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat terletak di kuadran ke-2 (maju tapi tertekan) bersama-sama Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari Provinsi Papua Barat, tetapi IPM-nya lebih rendah dari Provinsi Papua Barat. Sedangkan Kabupaten Sorong menjadi satu-satunya kabupaten/kota yang termasuk dalam kriteria “maju dan tumbuh pesat” (kuadran ke-1), yang berarti memiliki capaian IPM dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari Provinsi Papua Barat. Sementara Kabupaten Teluk Bintuni menjadi satu-satunya kabupaten/kota yang termasuk dalam kriteria “berkembang pesat” (kuadran ke-4) yang dicirikan dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari Provinsi Papua Barat namun masih memiliki capaian IPM yang lebih rendah dari Provinsi Papua Barat (Gambar 7.4).



Gambar 7.4. Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Papua Barat Berbasis IPM Tahun 2014

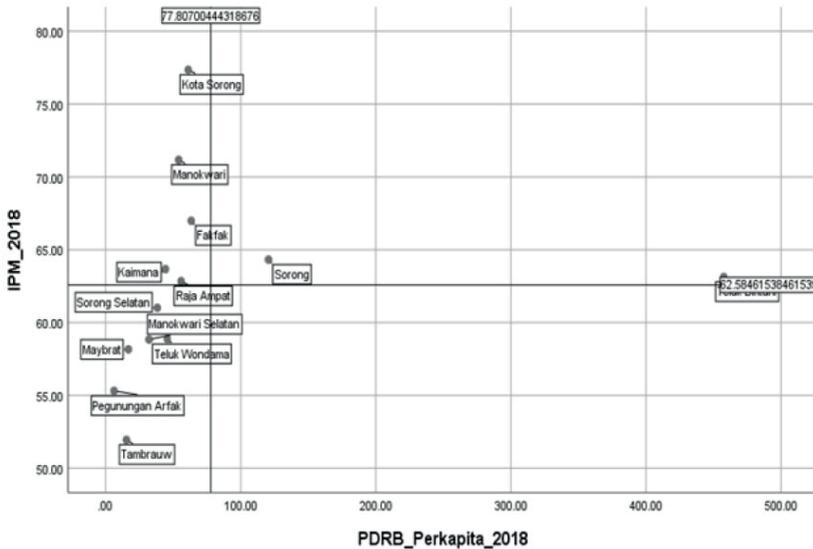
7.4. TIPOLOGI KABUPATEN/KOTA BERBASIS IPM TAHUN 2018

Untuk melihat bagaimana perubahan posisi Tipologi Klassen berbasis IPM dari tahun 2014 ke tahun 2018 maka terlihat pada pada tabel 7.4 berikut ini.

Tabel 7.4. Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat berbasis IPM, Tahun 2018

<p>Kabupaten/kota dengan kriteria Maju Tetapi Tertekan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kota Sorong - Manokwari - Fakfak - Kaimana - Raja Ampat 	<p>Kabupaten/kota dengan kriteria Maju dan Tumbuh Pesat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Sorong
<p>Kabupaten/kota dengan kriteria Tertinggal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sorong Selatan - Manokwari Selatan - Maybrat - Teluk Wondama - Pegunungan Arfak - Tambrauw 	<p>Kabupaten/kota dengan kriteria Berkembang Pesat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teluk Bintuni

Berdasarkan gambar 7.4 dan gambar 7.5 terlihat bahwa tidak ada perubahan tipologi wilayah dari tahun 2014 ke tahun 2018. Posisi Kabupaten Sorong tetap berada di bagian Kabupaten/Kota dengan kriteria “maju dan tumbuh pesat” dengan ciri-ciri baik capaian IPM ataupun pertumbuhan ekonominya sama-sama lebih tinggi dari capaian Provinsi Papua Barat. Sedangkan Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat masih tetap berada di bagian kabupaten/kota dengan kriteria “maju tetapi tertekan” dengan ciri-ciri capaian IPM yang lebih tinggi dari Provinsi Papua Barat tapi masih memiliki nilai pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari Provinsi Papua Barat.



Gambar 7.5. Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Papua Barat Berbasis IPM, Tahun 2018

7.5. ANALISIS BASIS SEKTOR PEREKONOMIAN

Salah satu cara untuk melihat sektor-sektor mana yang mempunyai potensi yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah adalah dengan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ). Tarigan (2005) menggunakan *Location Quotient* (LQ) sebagai metode untuk melihat sektor basis atau potensial suatu daerah. Metode ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan sektor tertentu di suatu daerah

dengan kemampuan sektor yang sama pada level daerah di atasnya. Dalam hal ini, kemampuan sektor tertentu dari kabupaten/kota tertentu dibandingkan dengan kemampuan sektor yang sama pada Provinsi Papua Barat.

Batas nilai dari *Location Quotient* (LQ) menurut Tarigan (2014) adalah:

- a). $LQ > 1$, artinya peranan sektor tersebut lebih besar di daerah daripada wilayah referensi.
- b). $LQ < 1$, artinya peranan sektor tersebut lebih kecil di daerah daripada wilayah referensi.
- c). $LQ = 1$, artinya peranan sektor tersebut sama, baik di daerah ataupun dibandingkan dengan wilayah referensi.

Hal yang sama dilakukan oleh Putra (2011) yang membagi kriteria *Location Quotient* (LQ) sebagai berikut:

- a). $LQ > 1$, berarti mengindikasikan dimungkinkannya dilakukan ekspor pada sektor tersebut (*Relative Spezialization in Sector*). Ekspor dilakukan karena adanya surplus.
- b). $LQ < 1$, berarti mengindikasikan bahwa sektor tersebut perlu melakukan impor (*Production Deficit in Sector*). Impor dilakukan karena sektor tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan daerah tersebut.
- c). $LQ = 1$, berarti produktivitas sektor tersebut berimbang. Artinya hanya cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu saja sehingga masih belum layak untuk diekspor (*Average Production in Sector*).

7.6. ANALISIS BASIS SEKTOR PEREKONOMIAN KABUPATEN SORONG

Pada tabel 7.5 terlihat bahwa hanya nilai *Location Quotient* (LQ) Kabupaten Sorong dari tahun 2014 – 2018 sektor Industri Pengolahan saja yang memiliki nilai rata-rata *Location Quotient* (LQ) di atas 1. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sorong memiliki potensi yang berlebih atau surplus di sektor Industri Pengolahan, sehingga bisa dilakukan langkah prioritas dari hasil-hasil sektor Industri Pengolahan Kabupaten Sorong, misalnya ekspor.

Tabel 7.5. Hasil Penghitungan Location Quotient (LQ) Kabupaten Sorong Menurut Sektor, Tahun 2014-2018

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata2 LQ 2014 - 2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,865751	0,893721	0,933093	0,942362	0,925065	0,911998564
B	Pertambangan dan Penggalian	0,917415	0,862114	0,864281	0,897701	0,917914	0,891884896
C	Industri Pengolahan	1,634392	1,697715	1,70763	1,689667	1,662551	1,678390964
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,422358	0,456931	0,615653	0,67222	0,659132	0,565258768
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,521709	0,541642	0,603173	0,612563	0,608767	0,577570815
F	Konstruksi	0,720894	0,750237	0,815825	0,834411	0,850194	0,794312261
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,470753	0,482681	0,514952	0,520281	0,504169	0,498567075
H	Transportasi dan Pergudangan	0,217903	0,219868	0,227469	0,226238	0,218104	0,221916281
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,344069	0,357965	0,380827	0,388129	0,39054	0,372306015
J	Informasi dan Komunikasi	0,209148	0,21366	0,224863	0,228688	0,232453	0,221762678
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,391521	0,408365	0,438025	0,432926	0,416652	0,417497757
L	Real Estate	0,279124	0,291095	0,314409	0,322901	0,321452	0,305796153
M,N	Jasa Perusahaan	0,5129	0,538207	0,588572	0,609232	0,612836	0,572349342

0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,710272	0,728355	0,760162	0,768833	0,751614	0,743847367
P	Jasa Pendidikan	0,617181	0,641308	0,694415	0,716784	0,706574	0,675252307
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,512326	0,530503	0,564419	0,581668	0,583521	0,554487388
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,263927	0,270321	0,288973	0,293048	0,290461	0,281346217

Sektor industri pengolahan yang mungkin dapat ditingkatkan di Kabupaten Sorong adalah industri makanan dan minuman; industri tekstil dan pakaian jadi; industri kayu, barang dari kayu, gabus, dan barang anyaman dari bambu, rotan; industri kimia, farmasi dan obat tradisional; industri karet, barang dari karet dan plastik; industri barang galian bukan logam; dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk sektor-sektor lainnya, terlihat bahwa nilai rata-rata *Location Quotient* (LQ) masih kurang dari 1. Artinya Kabupaten Sorong pada sektor-sektor selain sektor industri pengolahan masih belum mampu untuk mencukupi kebutuhan di Kabupaten Sorong sendiri. Kabupaten Sorong masih memerlukan impor barang dan jasa pada sektor-sektor yang nilai LQ-nya kurang dari 1. Khusus sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, nilai rata-rata *Location Quotient* (LQ) terlihat hampir mendekati 1 (0,91). Hal ini mengindikasikan bahwa antara kebutuhan masyarakat dengan persediaan barang dan jasanya relatif berimbang. Sehingga sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini mungkin bisa lebih dikembangkan lagi, dimana kedepannya sektor ini diharapkan dapat menjadi sektor unggulan dari Kabupaten Sorong.

Kabupaten Raja Ampat nilai rata-rata *Location Quotient* (LQ) nya masih lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Sorong. Hal ini terlihat dari tabel 7.6, yang menyatakan bahwa nilai rata-rata *Location Quotient* (LQ) yang lebih dari 1 terdapat pada tiga sektor. Dapat dikatakan bahwa ketiga sektor ini merupakan sektor unggulan dari Kabupaten Raja Ampat. Ketiga sektor unggulan tersebut adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

Secara rata-rata, nilai rata-rata *Location Quotient* (LQ) dari tahun 2014 – 2018 pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah sebesar 2,71 (Tabel 7.6). Hal ini

mengindikasikan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sudah mampu mencukupi kebutuhan masyarakatnya dan hasilnya dapat diekspor ke kabupaten/kota atau daerah lainnya. Karena potensi dari sektor sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini paling besar diantara dua sektor unggulan lainnya. Hal yang mungkin dapat lebih ditingkatkan lagi adalah subsektor tanaman pangan dan subsektor hortikultura.

Tabel 7.6. Hasil Penghitungan Location Quotient (LQ) Kabupaten Raja Ampat Menurut Sektor, Tahun 2014 – 2018

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata2 LQ 2014 - 2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,46147	2,62598	2,753545	2,889952	2,851277	2,716444765
B	Pertambangan dan Penggalian	2,084978	1,919897	1,677722	1,335328	1,436447	1,690874576
C	Industri Pengolahan	0,023816	0,026433	0,029893	0,033086	0,030607	0,028767095
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,235502	0,27682	0,279505	0,278449	0,28235	0,270525079
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,130327	0,138013	0,147067	0,158278	0,1616	0,14705691
F	Konstruksi	0,668834	0,727579	0,787488	0,960619	0,96809	0,822522094
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,62531	0,663449	0,685873	0,73222	0,715264	0,684423019
H	Transportasi dan Pergudangan	0,218825	0,224444	0,227716	0,25568	0,255399	0,236412657
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,894278	0,930939	0,965227	1,028171	1,02963	0,969649228

J	Informasi dan Komunikasi	0,137313	0,143617	0,140182	0,146961	0,149228	0,143460272
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,313377	0,323347	0,348854	0,359932	0,362369	0,341575968
L	Real Estate	0,474935	0,496819	0,50499	0,552438	0,565289	0,518894252
M,N	Jasa Perusahaan	0,196363	0,205791	0,210436	0,221642	0,222416	0,211329693
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,51369	1,560079	1,580433	1,763699	1,793328	1,642245865
P	Jasa Pendidikan	0,405063	0,415248	0,418457	0,425549	0,432503	0,41936419
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,326776	0,334475	0,326373	0,337537	0,32748	0,330528045
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,626965	0,679349	0,726565	0,830635	0,881232	0,748949114

Berbeda dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, maka sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor unggulan kedua di Kabupaten Raja Ampat.

Analisis Basis Sektor Perekonomian Kota Sorong

Sektor ini, di tahun 2014, nilai rata-rata *Location Quotient* (LQ) nya mencapai 2,08 dan tahun 2015 – 2017 terus mengalami penurunan, tetapi masih di angka lebih dari 1. Selanjutnya naik kembali pada tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor ini masih belum kuat untuk menjadi sektor unggulan. Perlunya strategi dalam meningkatkan sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor unggulan yang lebih kuat lagi.

Pada tabel 7.7, terlihat hampir semua sektor di Kota Sorong kecuali sektor kategori Perhatian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian dan sektor Industri Pengolahan, nilai rata-rata *Location Quotient* (LQ) nya lebih dari 1.

Tabel 7.7. Hasil Penghitungan Location Quotient (LQ) Kota Sorong Menurut Sektor, Tahun 2014-2018

Kate-gori	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata2 LQ 2014 - 2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.76915	0.730433	0.694847	0.679621	0.679303	0.7106708
B	Pertambangan dan Penggalian	0.063826	0.062494	0.059681	0.061699	0.06108	0.0617560
C	Industri Pengolahan	0.19219	0.188208	0.193683	0.187494	0.173122	0.1869392
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.643745	2.45038	2.329767	2.19959	2.142391	2.3531746
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.851052	2.520915	2.40863	2.317642	2.349202	2.4894882
F	Konstruksi	2.110028	2.075241	2.014392	1.941723	1.979602	2.024197
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.921025	2.671887	2.483556	2.421313	2.441293	2.5878147
H	Transportasi dan Pergudangan	2.832036	2.662317	2.546077	2.482393	2.490621	2.6026886
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.57139	2.380255	2.19809	2.089377	2.163786	2.2805796
J	Informasi dan Komunikasi	3.393354	3.230188	3.080581	2.917014	2.971209	3.1184691
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.083511	2.790973	2.684508	2.486332	2.551641	2.7193930
L	Real Estate	2.526062	2.308173	2.205571	2.135575	2.147824	2.2646407
M,N	Jasa Perusahaan	3.183719	2.901537	2.711047	2.552406	2.517043	2.7731503

0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.177915	1.117366	1.033323	1.023301	1.032735	1.0769280
P	Jasa Pendidikan	2.431617	2.321182	2.220139	2.144257	2.188097	2.2610584
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.579609	2.416297	2.266414	2.1643	2.172628	2.3198496
R,S,T,U	Jasa lainnya	3.431034	3.163527	2.975594	2.833429	2.875979	3.0559124

Hal ini menunjukkan bahwa Kota Sorong produktivitas di sektor tersebut berlebih dan mampu mencukupi kebutuhan masyarakatnya, sehingga mampu juga menjadi sektor unggulan yang diekspor ke daerah lain disekitarnya. Sektor-sektor yang nilainya diatas 1 adalah sektor pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan'; penyedia akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perumahan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya.

Sektor yang paling tinggi nilai rata-rata *Location Quotient* (LQ) nya dari Kota Sorong sepanjang tahun 2014 – 2018 adalah sektor informasi dan komunikasi, yakni sebesar 3,11. Tingginya nilai ini mengindikasikan bahwa sektor informasi dan komunikasi merupakan sektor unggulan di Kota Sorong, mengingat bahwa Kota Sorong merupakan kota bisnis di provinsi Papua Barat. Koneksi antar wilayah di Kota sorong pun juga sudah terjangkau ke seluruh kecamatan dengan adanya provider-provider telekomunikasi. Dan keuntungan Kota Sorong adalah ia merupakan pintu gerbang menuju kabupaten/kota di seluruh Provinsi Papua Barat, bahkan ke Provinsi Papua. Hal ini menjadi point penting yang harus menjadi perhatian utama.

Analisis Shift Share

Analisis *shift share* umumnya dipakai untuk menganalisis peranan suatu sektor ataupun pergeseran suatu sektor di daerah terhadap sektor yang sama dalam perekonomian nasional. Data yang sering dianalisis adalah data yang terkait kegiatan ekonomi ataupun ketenagakerjaan (Putra, 2011). Sedangkan Tarigan (2005), menyebutkan

bahwa kegunaan dari analisis *shift share* untuk membandingkan perbedaan laju pertumbuhan sektor (industri) di wilayah yang sempit disebut daerah dengan wilayah yang lebih luas disebut nasional.

Suatu daerah yang memiliki banyak sektor yang tingkat pertumbuhannya lamban maka sektor tersebut pertumbuhannya secara nasional juga akan lamban. Hal ini terjadi karena daerah-daerah lain tumbuh lebih cepat (Putra, 2011). Analisis *shift share* memiliki tiga komponen (Tarigan, 2005) dan (Putra, 2011) yaitu: (a). *National Share*; (b). *Proportional Shift*; (c). *Differential Shift*.

National share, digunakan untuk mengetahui pergeseran struktur perekonomian suatu daerah yang dipengaruhi oleh pergeseran perekonomian wilayah referensi. Menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi wilayah referensi terhadap perekonomian daerah. Nilai *national share* positif di daerah (kabupaten/kota) yang tumbuh lebih cepat dan negatif di daerah (kabupaten/kota) yang tumbuh lebih lambat atau merosot dibandingkan dengan pertumbuhan wilayah referensi.

Proportional shift digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nilai tambah bruto suatu sektor dibandingkan total sektor di wilayah referensi. Menunjukkan perubahan relatif kinerja suatu sektor di daerah tertentu terhadap sektor yang sama di wilayah referensi. Pergeseran proporsional (*proportional shift*) disebut juga pengaruh bauran industri (*industry mix*). Pengukuran ini memungkinkan untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan referensi. Komponen ini positif di daerah (kabupaten/kota) yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang pada wilayah referensi tumbuh lebih cepat dan negatif di daerah (kabupaten/kota) yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang pada wilayah referensi tumbuh dengan lambat atau merosot.

Differential shift atau *competitive position*, digunakan untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan perekonomian satu daerah dengan nilai tambah bruto sektor yang sama di wilayah referensi. Menunjukkan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah dengan perekonomian yang dijadikan referensi. Jika nilainya positif, maka industri tersebut relatif lebih tinggi daya saingnya dibandingkan industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan referensi. Jika nilai komponen ini positif, maka sektor tersebut merupakan sektor yang kompetitif karena mempunyai keuntungan lokasional seperti sumber daya yang melimpah, sedangkan daerah yang secara lokasional tidak menguntungkan akan mempunyai nilai negatif dan mengalami penurunan daya saing.

Menurut Tri Widodo (2006), bentuk umum persamaan dari analisis *shift share* dan komponen-komponennya adalah :

$$Dij = Nij + Mij + Cij$$

$$Nij = Eij \times Rn$$

$$Mij = Eij (Rin - Rn)$$

$$Cij = Eij (Rij - Rin)$$

Keterangan:

Dij = Dampak nyata pertumbuhan ekonomi daerah (kab/kota) dari pengaruh pertumbuhan wilayah referensi.

Nij = Pengaruh pertumbuhan ekonomi wilayah referensi terhadap perekonomian di suatu daerah (kab/kota).

Mij = Pergeseran proporsional atau pengaruh bauran industri.

Cij = Pengaruh keunggulan kompetitif suatu sektor tertentu (kab/kota) dibanding wilayah referensi.

Eij = PDRB (output) sektor i (kab/kota).

Rij = Tingkat pertumbuhan sektor i (kab/kota).

Rin = Tingkat pertumbuhan sektor i (wilayah referensi).

Rn = Tingkat pertumbuhan PDRB (wilayah referensi).

Sektor Pertanian

Tabel 7.8 memperlihatkan bahwa untuk Kabupaten Sorong, sektor pertaniannya memiliki nilai *Location Quotient* (LQ) nya kurang dari 1. Artinya sektor pertanian belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakatnya. Sehingga membutuhkan *share* dari daerah lain untuk mencukupi kebutuhan sektor pertaniannya. Nilai *Share Shift Proportional* (SSP) bernilai negatif, yang berarti bahwa sektor pertanian Provinsi Papua Barat sedang mengalami perlambatan. Sebaliknya, nilai *Shift Share Differential* (SSD) bernilai negatif, hal ini berarti bahwa sektor pertanian Kabupaten Sorong mengalami penurunan atau tumbuh melambat dibandingkan Provinsi Papua Barat.

Kabupaten Raja Ampat relatif lebih baik dibandingkan Kabupaten Sorong dalam hal pergeseran sektor pertanian. Berdasarkan Tabel 7.8 terlihat bahwa nilai *Location Quotient* (LQ) lebih dari 1, artinya terjadi surplus di sektor pertanian. Nilai SSP negatif, artinya sektor pertanian tumbuh melambat di Provinsi Papua Barat. Nilai SSD-nya positif, artinya sektor pertanian merupakan sektor yang kompetitif di Kabupaten Raja Ampat, karena mempunyai keuntungan lokasional seperti sumber daya yang melimpah, dan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat .

Tabel 7.8. Analisis LQ, Shift Share Proporsional, dan Shift Share Differential Sektor Pertanian di Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong Tahun 2014-2018

Kabupaten/Kota	LQ	SSP	SSD
Kabupaten Sorong	< 1	Negatif	Negatif
Kabupaten Raja Ampat	> 1	Negatif	Positif
Kota Sorong	< 1	Negatif	Positif

Kota Sorong, Tabel 7.8 memperlihatkan bahwa nilai *Location Quotient* (LQ) nya kurang dari 1, artinya sektor pertanian di Kota Sorong belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakatnya, dan membutuhkan impor barang dari sektor pertanian. Nilai *Share Shift Proportional* (SSP) nya negatif, artinya sektor pertaniannya tumbuh melambat di Provinsi Papua Barat. Nilai *Share Shift Differential* (SSD) positif, artinya sektor pertanian Kota Sorong mempunyai keuntungan lokasional seperti sumber daya yang melimpah, dan tumbuh cepat dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat.

Sektor Pertambangan dan Penggalian

Berdasarkan tabel 7.9, terlihat bahwa untuk Kabupaten Sorong, sektor pertambangan dan penggaliannya memiliki nilai *Location Quotient* (LQ) kurang dari 1, artinya sektor pertambangan dan penggaliannya masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Nilai *Share Shift Proportional* (SSP) ataupun nilai *Share Shift Differential* (SSD) nya negatif, artinya sektor pertambangan dan penggaliannya tumbuh melambat di Provinsi Papua Barat, dan mengalami penurunan daya saing, dan untuk Kabupaten Raja Ampat, sektor pertambangan dan penggaliannya memiliki nilai *Location Quotient* (LQ) lebih dari 1. Hal ini berarti bahwa sektor pertambangan dan penggaliannya mampu mencukupi kebutuhan masyarakatnya dan bahkan berlebih, sehingga bisa melakukan ekspor ke luar kabupaten/kota menuju kabupaten/kota lainnya. Tetapi untuk nilai *Share Shift Proportional* (SSP) dan nilai *Share Shift Differential* (SSD) nya, nasibnya sama dengan Kabupaten Sorong, yakni bernilai negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertambangan dan penggaliannya tumbuh melambat di Provinsi Papua Barat, dan terjadi penurunan daya saing.

Tabel 7.9. Analisis LQ, Shift Share Proporsional, dan Shift Share Differential Sektor Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong Tahun 2014-2018

Kabupaten/Kota	LQ	SSP	SSD
Kabupaten Sorong	< 1	Negatif	Negatif
Kabupaten Raja Ampat	> 1	Negatif	Negatif
Kota Sorong	< 1	Negatif	Positif

Kota Sorong, sektor pertambangan dan penggaliannya memiliki nilai *Location Quotient* (LQ) kurang dari 1, artinya sektor pertambangan dan penggaliannya juga kurang mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dan harus mengimpor sektor pertambangan dan penggalian dari daerah lain supaya kebutuhan masyarakatnya terpenuhi. Komponen nilai *Share Shift Proportional* (SSP) bertanda negatif, berarti bahwa sektor pertambangan dan penggaliannya tumbuh melambat di Provinsi Papua Barat. Sedangkan komponen nilai *Share Shift Differential* (SSD) nya bertanda positif, artinya sektor pertambangan dan penggalian Kota Sorong mengalami pertumbuhan yang cepat dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat.

Sektor Industri Pengolahan

Tabel 7.10 memperlihatkan bahwa untuk Kabupaten Sorong, sektor industri pengolahannya memiliki nilai *Location Quotient* (LQ) lebih dari 1, hal ini berarti bahwa sektor industri pengolahannya sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan mampu mengekspor sektor industri pengolahan ke wilayah lainnya. Sedangkan komponen dari nilai *Share Shift Proportional* (SSP) dan nilai *Share Shift Differential* (SSD) nya bertanda negatif, artinya bahwa sektor industri pengolahannya tumbuh melambat di Provinsi Papua Barat, dan mengalami penurunan daya saing.

Kabupaten Raja Ampat ataupun Kota Sorong, sektor industri pengolahannya memiliki nilai *Location Quotient* (LQ) kurang dari 1, artinya sektor industri pengolahan Kabupaten Raja Ampat ataupun Kota Sorong, keduanya kurang mampu menjadi sektor unggulan karena tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan masih bergantung dari wilayah lainnya. Sedangkan komponen dari nilai *Share Shift Proportional* (SSP) dan nilai *Share Shift Differential* (SSD) nya dari Kabupaten Raja

Ampat ataupun Kota Sorong juga bertanda negatif, artinya bahwa sektor industri pengolahan di kedua kabupaten ini tumbuh melambat di Provinsi Papua Barat dan mengalami penurunan daya saing.

Tabel 7.10. Analisis LQ, Shift Share Proporsional, dan Shift Share Differential Sektor Konstruksi di Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong Tahun 2014-2018

Kabupaten/Kota	LQ	SSP	SSD
Kabupaten Sorong	> 1	Negatif	Negatif
Kabupaten Raja Ampat	< 1	Negatif	Negatif
Kota Sorong	< 1	Negatif	Negatif

Sektor Konstruksi

Berdasarkan tabel 7.11, terlihat bahwa untuk Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, sektor konstruksinya memiliki nilai *Location Quotient* (LQ) **kurang dari 1, hal ini berarti bahwa sektor konstruksi di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat** belum mampu memenuhi secara penuh kebutuhan masyarakatnya. Tetapi yang menarik adalah bahwa komponen dari nilai *Share Shift Proportional* (SSP) ataupun nilai *Share Shift Differential* (SSD) dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat keduanya bertanda positif, artinya bahwa sektor konstruksinya tumbuh cepat di Provinsi Papua Barat, dan secara lokasional memiliki daya saing yang kompetitif.

Sedangkan untuk Kota Sorong, sektor konstruksinya memiliki nilai *Location Quotient* (LQ) lebih dari 1, artinya sektor konstruksi Kota Sorong, sudah cukup mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan mengeksport ke wilayah lainnya. Hal ini juga didukung oleh komponen dari nilai *Share Shift Proportional* (SSP) ataupun nilai *Share Shift Differential* (SSD) yang juga bertanda positif, yang berarti sektor konstruksinya tumbuh cepat di Provinsi Papua Barat, dan secara lokasional merupakan sektor unggulan yang memiliki daya saing yang kompetitif.

Tabel 7.11. Analisis LQ, Shift Share Proporsional, dan Shift Share Differential Sektor Perdagangan di Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong Tahun 2014-2018

Kabupaten/Kota	LQ	SSP	SSD
Kabupaten Sorong	<1	Positif	Positif
Kabupaten Raja Ampat	<1	Positif	Positif
Kota Sorong	>1	Positif	Positif

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

Berdasarkan tabel 7.12, terlihat bahwa untuk Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, sektor perdagangannya memiliki nilai *Location Quotient* (LQ) kurang dari 1, hal ini berarti bahwa sektor perdagangan di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat belum mampu memenuhi secara penuh kebutuhan masyarakatnya dan masih membutuhkan impor dari wilayah lain. Dan komponen dari nilai *Share Shift Proportional* (SSP) dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat keduanya bertanda positif, artinya bahwa sektor perdagangannya tumbuh cepat di Provinsi Papua Barat, sedangkan nilai *Share Shift Differential* (SSD) nya justru bertanda negatif, artinya secara lokasional ternyata sektor perdagangan di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat mengalami penurunan daya saing.

Tabel 7.12. Analisis LQ, Shift Share Proporsional, dan Shift Share Differential Sektor Perdagangan Besar dan Eceran di Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong Tahun 2014-2018

Kabupaten/Kota	LQ	SSP	SSD
Kabupaten Sorong	<1	Positif	Negatif
Kabupaten Raja Ampat	<1	Positif	Negatif
Kota Sorong	>1	Positif	Positif

Sedangkan untuk Kota Sorong, terlihat bahwa sektor perdagangan ini merupakan sektor unggulan. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Location Quotient* (LQ) yang lebih dari 1, artinya sektor perdagangan Kota Sorong, sudah cukup mampu memenuhi kebutuhan

masyarakatnya, dan mampu mengeksport ke wilayah lainnya. Hal ini juga didukung oleh komponen dari nilai *Share Shift Proportional* (SSP) ataupun nilai *Share Shift Differential* (SSD) yang juga bertanda positif, yang berarti sektor perdagangannya tumbuh cepat di Provinsi Papua Barat, dan secara lokasional merupakan sektor unggulan yang menguntungkan bagi Kota Sorong.

Sektor Transportasi dan Pergudangan

Berdasarkan tabel 7.13, terlihat bahwa untuk Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, sektor transportasinya memiliki nilai *Location Quotient* (LQ) kurang dari 1, hal ini berarti bahwa sektor transportasi di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat belum mampu memenuhi secara penuh kebutuhan masyarakatnya dan masih membutuhkan impor dari wilayah lain. Dan komponen dari nilai *Share Shift Proportional* (SSP) dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat keduanya bertanda positif, artinya bahwa sektor transportasinya tumbuh cepat di Provinsi Papua Barat, sedangkan nilai *Share Shift Differential* (SSD) nya justru bertanda negatif, artinya secara lokasional ternyata sektor transportasi di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat mengalami penurunan daya saing.

Tabel 7.13. Analisis LQ, Shift Share Proporsional, dan Shift Share Differential Sektor Transportasi dan Pergudangan di Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong Tahun 2014-2018

Kabupaten/Kota	LQ	SSP	SSD
Kabupaten Sorong	<1	Positif	Negatif
Kabupaten Raja Ampat	<1	Positif	Negatif
Kota Sorong	>1	Positif	Positif

Kota Sorong menunjukkan bahwa sektor transportasi ini juga merupakan sektor unggulan dari Kota Sorong. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Location Quotient* (LQ) yang lebih dari 1, artinya sektor transportasi Kota Sorong, sudah cukup mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan mampu mensupply ke wilayah lainnya. Hal ini juga didukung oleh komponen dari nilai *Share Shift Proportional* (SSP) ataupun nilai *Share Shift Differential* (SSD) yang juga bertanda positif, yang berarti sektor transportasinya

tumbuh cepat di Provinsi Papua Barat, dan secara lokasional merupakan sektor unggulan yang menguntungkan bagi Kota Sorong.

Sektor Akomodasi dan Makan Minum

Berdasarkan tabel 7.14, terlihat bahwa untuk Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, sektor akomodasinya memiliki nilai *Location Quotient* (LQ) kurang dari 1, hal ini berarti bahwa sektor akomodasi di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat belum mampu memenuhi secara penuh kebutuhan masyarakatnya dan masih membutuhkan supply dari wilayah lain. Sementara komponen dari nilai *Share Shift Proportional* (SSP) dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat keduanya bertanda positif, artinya bahwa sektor akomodasinya tumbuh cepat di Provinsi Papua Barat, sedangkan nilai *Share Shift Differential* (SSD) nya justru bertanda negatif, artinya secara lokasional ternyata sektor akomodasi dan penyediaan makan minum di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat mengalami penurunan daya saing.

Tabel 7.14. Analisis LQ, Shift Share Proporsional, dan Shift Share Differential Sektor Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong Tahun 2014-2018

Kabupaten/Kota	LQ	SSP	SSD
Kabupaten Sorong	<1	Positif	Negatif
Kabupaten Raja Ampat	<1	Positif	Negatif
Kota Sorong	>1	Positif	Negatif

Sedangkan untuk Kota Sorong, terlihat bahwa sektor akomodasi ini sudah mampu mencukupi kebutuhan dari masyarakat Kota Sorong dan bahkan mampu untuk mengekspor sektor tersebut ke wilayah lain yang terdekat. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Location Quotient* (LQ) yang lebih dari 1, artinya sektor akomodasi dan penyediaan makan minum Kota Sorong, sudah cukup mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan mampu mensupply ke wilayah lainnya. Hal ini juga didukung oleh komponen dari nilai *Share Shift Proportional* (SSP) yang juga bertanda positif, yang berarti sektor akomodasinya tumbuh cepat di Provinsi Papua Barat, namun untuk nilai *Share Shift Differential* (SSD) nya ternyata bertanda negatif, artinya secara lokasional belum bisa menjadi sektor unggulan bagi Kota Sorong.

Sektor Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan tabel 7.15, terlihat bahwa untuk Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, sektor informasi dan komunikasinya memiliki nilai *Location Quotient* (LQ) kurang dari 1, hal ini berarti bahwa sektor informasi dan komunikasi di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat belum mampu memenuhi secara penuh kebutuhan masyarakatnya dan masih membutuhkan *supply* dari wilayah lain. Sementara komponen dari nilai *Share Shift Proportional* (SSP) dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat keduanya bertanda positif, artinya bahwa sektor informasi dan komunikasinya tumbuh cepat di Provinsi Papua Barat, sedangkan nilai *Share Shift Differential* (SSD) nya bertanda negatif, artinya secara lokasional ternyata sektor informasi dan komunikasi di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat mengalami penurunan daya saing.

Tabel 7.15. Analisis LQ, Shift Share Proporsional, dan Shift Share Differential Sektor Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong Tahun 2014-2018

Kabupaten/Kota	LQ	SSP	SSD
Kabupaten Sorong	<1	Positif	Negatif
Kabupaten Raja Ampat	<1	Positif	Negatif
Kota Sorong	>1	Positif	Positif

Sedangkan untuk Kota Sorong, terlihat bahwa sektor informasi dan komunikasi ini juga merupakan sektor unggulan dari Kota Sorong. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Location Quotient* (LQ) yang lebih dari 1, artinya sektor informasi dan komunikasi Kota Sorong, sudah cukup mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan mampu memasok ke wilayah lainnya. Hal ini juga didukung oleh komponen dari nilai *Share Shift Proportional* (SSP) ataupun nilai *Share Shift Differential* (SSD) yang juga bertanda positif, yang berarti sektor informasi dan komunikasinya tumbuh cepat di Provinsi Papua Barat, dan secara lokasional merupakan sektor unggulan yang menguntungkan bagi Kota Sorong.

Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi

Berdasarkan tabel 7.16, terlihat bahwa untuk Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, sektor jasa keuangan dan Asuransinya memiliki nilai *Location Quotient*

(LQ) kurang dari 1, hal ini berarti bahwa sektor jasa keuangan dan Asuransinya di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat belum mampu memenuhi secara penuh kebutuhan masyarakatnya dan masih membutuhkan supply dari wilayah lain. Sementara komponen dari nilai *Share Shift Proportional* (SSP) dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat keduanya bertanda positif, artinya bahwa sektor jasa keuangan dan asuransinya tumbuh cepat di Provinsi Papua Barat, sedangkan nilai *Share Shift Differential* (SSD) nya bertanda negatif, artinya secara lokasional ternyata sektor jasa keuangan dan Asuransinya di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat mengalami penurunan daya saing.

Tabel 7.16. Analisis LQ, Shift Share Proporsional, dan Shift Share Differential Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi di Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong Tahun 2014-2018

Kabupaten/Kota	LQ	SSP	SSD
Kabupaten Sorong	<1	Positif	Negatif
Kabupaten Raja Ampat	<1	Positif	Negatif
Kota Sorong	>1	Positif	Positif

Sedangkan untuk Kota Sorong, terlihat bahwa sektor jasa keuangan dan asuransi ini rupanya juga merupakan sektor unggulan dari Kota Sorong. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Location Quotient* (LQ) yang lebih dari 1, artinya sektor jasa keuangan dan Asuransi Kota Sorong, sudah cukup mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan mampu mensupply ke wilayah lainnya. Hal ini juga didukung oleh komponen dari nilai *Share Shift Proportional* (SSP) ataupun nilai *Share Shift Differential* (SSD) yang juga bertanda positif, yang berarti sektor jasa keuangan dan asuransinya tumbuh cepat di Provinsi Papua Barat, dan secara lokasional merupakan sektor unggulan yang menguntungkan bagi Kota Sorong.

Sektor Jasa Lain

Berdasarkan tabel 7.17, terlihat bahwa untuk Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, sektor jasa lainnya memiliki nilai *Location Quotient* (LQ) kurang dari 1, hal ini berarti bahwa sektor jasa lainnya di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat belum mampu memenuhi secara penuh kebutuhan masyarakatnya dan masih membutuhkan supply dari wilayah lain. Sementara komponen dari nilai *Share Shift Proportional* (SSP) dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat keduanya

bertanda positif, artinya bahwa sektor jasa lainnya tumbuh cepat di Provinsi Papua Barat, sedangkan nilai *Share Shift Differential* (SSD) nya untuk Kabupaten Sorong bertanda negatif dan untuk Kabupaten Raja Ampat bertanda positif, artinya secara lokasional ternyata sektor jasa lainnya di Kabupaten Sorong mengalami penurunan daya saing, sedangkan di Kabupaten Raja Ampat bisa menjadi sektor unggulan yang cukup kompetitif.

Tabel 7.17. Analisis LQ, Shift Share Proporsional, dan Shift Share Differential Sektor Jasa Lainnya di Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong Tahun 2014-2018

Kabupaten/Kota	LQ	SSP	SSD
Kabupaten Sorong	< 1	Positif	Negatif
Kabupaten Raja Ampat	< 1	Positif	Positif
Kota Sorong	> 1	Positif	Positif

Sedangkan untuk Kota Sorong, terlihat bahwa sektor jasa lainnya ini rupanya juga merupakan sektor unggulan dari Kota Sorong. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Location Quotient* (LQ) yang lebih dari 1, artinya sektor jasa lainnya Kota Sorong, sudah cukup mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan mampu mensupply ke wilayah lainnya. Hal ini juga didukung oleh komponen dari nilai *Share Shift Proportional* (SSP) ataupun nilai *Share Shift Differential* (SSD) yang juga bertanda positif, yang berarti sektor jasa lainnya tumbuh cepat di Provinsi Papua Barat, dan secara lokasional merupakan sektor unggulan yang menguntungkan bagi Kota Sorong

Analisis Strategi Pembangunan Ekonomi

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan analisis Tipologi Klassen, **Kabupaten Sorong** termasuk wilayah yang berada pada kriteria “maju tetapi agak tertekan”. Hal ini yang membuat Kabupaten Sorong belum memiliki sektor unggulan. Karena jika dilihat dari kombinasi nilai *Location Quotient* (LQ), komponen nilai *Share Shift Proportional* (SSP) dan nilai *Share Shift Differential* (SSD) nya belum ada yang menunjukkan sektor unggulan. Tetapi tidak menutup kemungkinan beberapa sektor dapat dipersiapkan di masa yang akan datang menjadi sektor unggulan. Sehingga strategi dari pemerintah daerah Kabupaten Sorong adalah memperhatikan komponen nilai *Location Quotient* (LQ), nilai *Share Shift Proportional*

(SSP) dan nilai *Share Shift Differential* (SSD) untuk meningkatkan pembangunan daerah khususnya pada sektor-sektor yang berpotensi menjadi sektor unggulan.

Untuk nilai *Location Quotient* (LQ), hanya 1 sektor di Kabupaten Sorong yang nilainya lebih dari 1, yakni sektor industri pengolahan. Sektor dengan komponen nilai *Share Shift Proportional* (SSP) yang bertanda positif ada 12 dari 17 sektor yang ada, sektor ini merupakan sektor yang perlu ditingkatkan. Sektor-sektor inilah yang seyogyanya menjadi fokus pemerintah daerah Kabupaten Sorong agar dapat berpindah dan menuju tipologi wilayah dengan kriteria “pertumbuhan cepat dan maju”.

Berkebalikan dengan komponen nilai *Share Shift Proportional* (SSP), justru komponen nilai *Share Shift Differential* (SSD) Kabupaten Sorong lebih banyak yang bertanda negatif. Artinya pertumbuhannya di lokasional Kabupaten Sorong masih kurang kompetitif. Ada 14 dari 17 sektor yang komponen nilai *Share Shift Differential* (SSD) nya bertanda negatif sedangkan 3 sektor sisanya bertanda positif yakni sektor pengadaan listrik dan gas; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang;serta sektor konstruksi, selebihnya perlu membutuhkan tenaga ekstra dalam meningkatkan pertumbuhan pembangunannya di dalam Kabupaten Sorong sendiri. Pemerintah daerah Kabupaten Sorong disini perlu turun tangan dalam mengatur lewat berbagai kebijakan terkait dengan pembangunan di 14 sektor yang masih kurang bagus pertumbuhannya secara lokasional, dimana salah satu caranya adalah dengan cara membuka kesempatan investasi bagi investor luar daerah untuk bersinergi dalam bidang yang terkait di 14 sektor tersebut.

Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, Kabupaten Raja Ampat berpotensi masuk dalam wilayah dengan kriteria “tertinggal”. Hal ini diakibatkan karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Raja Ampat berada di bawah rata-rata provinsi dan termasuk pula dengan pengeluaran perkapitanya yang juga berada di bawah rata-rata provinsi. Dalam hal nilai *Location Quotient* (LQ), Kabupaten Raja Ampat memiliki 3 sektor yang nilai *Location Quotient* (LQ) nya lebih dari 1, lebih banyak dibandingkan Kabupaten Sorong yang hanya 1 sektor. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk ketiga sektor tersebut, yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sudah dapat dikatakan mampu memenuhi dan memasok kebutuhannya sendiri.

Di sisi lain, Kabupaten Raja Ampat ternyata masih memiliki 5 sektor dengan komponen nilai *Share Shift Proportional* (SSP) negatif, yang berarti lima sektor ini tumbuh lambat di Provinsi Papua Barat. Lima sektor ini adalah sektor pertanian (termasuk kehutanan, dan perikanan); sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan; sektor pengadaan listrik dan gas; serta sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Jika dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat, maka Lima sektor ini masih belum mengalami pertumbuhan yang nyata dalam pembangunannya. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat dapat lebih memfokuskan pembangunannya pada lima sektor tersebut. Khususnya pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan sektor pertambangan dan penggalian, karena kedua sektor ini memiliki nilai *Location Quotient* (LQ) lebih dari 1. Dengan strategi memberikan edukasi ke masyarakat nelayan dan petani darat untuk meningkatkan hasil pertaniannya dengan pengelolaan yang profesional, dan produk dikemas dengan bagus, sehingga nilai dari sektor pertanian tersebut dapat naik dan mampu bersaing dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Papua Barat.

Jika diperhatikan dari komponen nilai *Share Shift Differential* (SSD), terlihat ada 6 dari 17 sektor yang positif, dan 1 dari 6 sektor tersebut diantaranya memiliki nilai *Location Quotient* (LQ) lebih dari 1, yakni sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sehingga dengan memfokuskan pembangunannya terhadap satu sektor ini, maka dapat menjadi modal bagi Kabupaten Raja Ampat menjadi kabupaten yang pertumbuhan ekonominya tumbuh cepat dan maju dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Raja Ampat 2016-2021 yang menetapkan sektor perikanan sebagai salah satu sektor unggulan Kabupaten Raja Ampat.

Kota Sorong, berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen termasuk ke dalam wilayah dengan tipologi “berkembang pesat”. Meskipun dari sisi pertumbuhan ekonominya sudah melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat, namun Kota Sorong masih dihadapkan pada kendala berupa rendahnya pengeluaran perkapita yang berada di bawah rata-rata Provinsi Papua Barat. Jika dirunut dari 17 sektor pembangunan, tersapat 3 sektor yang nilai *Location Quotient* (LQ) nya kurang dari 1, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan. Pemerintah daerah Kota Sorong diharapkan lebih memfokuskan pada ketiga sektor tersebut, agar sektor tersebut dapat memenuhi kebutuhannya sendiri secara penuh. Karena sampai saat ini, ketiga sektor inilah yang masih tersendat-sendat dan belum mampu berswada.

Kemudian untuk komponen nilai *Share Shift Proportional* (SSP), rupanya Kota Sorong masih memiliki 5 sektor yang bertanda negatif, dan tiga dari kelima sektor ini memiliki nilai *Location Quotient* (LQ) yang bernilai kurang dari 1. Artinya keberadaan ketiga sektor ini tumbuh melambat di Provinsi Papua Barat. Ketiga sektor tersebut, diantaranya adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan.

Komponen nilai *Share Shift Differential* (SSD) Kota Sorong masih memiliki 5 sektor dengan nilai *Share Shift Differential* (SSD) yang bertanda negatif, yang berarti secara lokasional, kelima sektor ini belum dapat berkompetitif. Satu dari kelima sektor tersebut adalah sektor industri pengolahan, yang memiliki nilai *Share Shift Proportional* (SSP) negatif dan nilai *Location Quotient* (LQ) yang kurang dari 1. SJika dirunut dari nilai *Location Quotient* (LQ), nilai *Share Shift Proportional* (SSP), dan nilai *Share Shift Differential* (SSD), maka sektor industri pengolahan menjadi satu-satunya sektor dengan kinerja yang kurang bagus dengan seluruh komponen nilai adalah negatif. Dengan demikian, pemerintah daerah Kota Sorong diharapkan lebih fokus kepada sektor industri pengolahan, agar sektor ini dapat tumbuh dengan cepat, dan secara lokasional mampu tumbuh secara kompetitif.



08

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menerangkan tentang isu-isu strategis daerah yang mencakup tentang kemiskinan, daya saing dan inovasi kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.

TENTANG KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar yang bersifat mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, strategis, dan komprehensif. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran dengan metodologi yang valid dan dapat diperbandingkan antar waktu dan wilayah.

Metode penghitungan jumlah penduduk miskin yang digunakan oleh BPS dilakukan dengan pendekatan *benchmark* Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Garis Kemiskinan (GK) adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik itu kebutuhan dasar makanan maupun non makanan. Seseorang dikatakan miskin bila berada dibawah garis kemiskinan. Pendekatan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dihitung dengan pendekatan standar kebutuhan hidup minimum 2100 kilokalori yang didasarkan pada konsumsi makanan, sedangkan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) dihitung dengan pendekatan kebutuhan dasar non makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta aneka barang dan jasa.

PERUBAHAN GARIS KEMISKINAN

Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK), karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Selama periode Maret 2018 – September 2018, Garis Kemiskinan (GK) Papua Barat mengalami kenaikan, yakni dari Rp 516.362,- per kapita per bulan menjadi Rp 560.976,- per kapita per bulan atau naik sebesar 8,64 persen. Sementara selama periode September 2017 – September 2018 (yoy), Garis Kemiskinan (GK) Papua Barat naik sebesar 10,03 persen, yakni dari Rp. 509.861,- per kapita per bulan pada September 2017 menjadi Rp. 560.976,- per kapita per bulan pada September 2018 (Tabel 8.1).

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan Maret 2018, sumbangan GKM perkotaan terhadap GK sebesar 72,29 persen, hal yang sama terjadi pada bulan September 2018 peranannya juga relatif sama namun sedikit mengalami penurunan menjadi 72,23 persen. Sedangkan sumbangan GKM perdesaan terhadap GK sebesar 80,58 persen pada Maret 2018 naik menjadi 80,68 persen pada September 2018.

Tabel 8.1. Garis Kemiskinan Provinsi Papua Barat dan Perubahannya menurut Perkotaan dan Pedesaan, September 2017 – September 2018

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
September 2017	378.551	144.831	523.381
Maret 2018	383.367	146.928	530.295
September 2018	421.471	162.060	583.530
Perubahan Sept 2017-Sept 2018 (%)	11,34	11,89	11,49
Perubahan Mar 2018-Sept 2018 (%)	9,94	10,30	10,04
Perdesaan			
September 2017	404.857	94.229	499.086
Maret 2018	407.711	98.229	505.941
September 2018	439.399	105.223	544.623
Perubahan Sept 2017-Sept 2018 (%)	8,53	11,67	9,12
Perubahan Mar 2018-Sept 2018 (%)	7,77	7,12	7,65
Total			
September 2017	395.479	114.383	509.861
Maret 2018	395.435	117.927	513.362
September 2018	432.693	128.283	560.976
Perubahan Sept 2017-Sept 2018 (%)	9,41	12,15	10,03
Perubahan Mar 2018-Sept 2018 (%)	8,60	8,78	8,64

Sumber : Diolah dari data Susenas September 2017-September 2018

Pada bulan Maret 2018, sumbangan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) untuk daerah perkotaan sebesar 27,71 persen, sedangkan pada bulan September 2018 meningkat menjadi 27,77 persen. Hal berbeda terjadi untuk daerah pedesaan, dimana pada bulan Maret 2018 peranannya sebesar 19,42 persen turun menjadi 19,32 persen pada bulan September 2018 (Tabel 8.2).

Tabel 8.2. Daftar Komoditi Yang Memberikan Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan Menurut Perkotaan dan Pedesaan, September 2018

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan:		Makanan:	
Beras	17,68	Beras	19,84
Rokok kretek filter	11,97	Rokok kretek filter	14,69
Tongkol/Tuna/Cakalang	3,85	Gula Pasir	3,59
Kembung	3,33	Daging Sapi	3,39
Roti	3,15	Daging Ayam Ras	3,08
Telur Ayam Ras	3,05	Tongkol/Tuna/Cakalang	2,96
Teri	2,63	Daging Babi	2,68
Lainnya	26,57	Lainnya	30,45
Bukan Makanan:		Bukan Makanan	
Perumahan	10,78	Perumahan	8,23
Angkutan	3,46	Bensin	2,85
Listrik	2,83	Listrik	1,66
Pendidikan	1,78	Minyak Tanah	0,94
Minyak Tanah	1,26	Angkutan	0,83
Lainnya	7,66	Lainnya	4,81

Sumber : Diolah dari data Susenas September 2018

Komoditi makanan yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Pada bulan September 2018, sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebesar 17,68 persen di perkotaan dan 19,84 persen di perdesaan. Selain beras, barang-barang kebutuhan pokok lain yang berpengaruh cukup besar terhadap Garis Kemiskinan Makanan (GKM) di perkotaan diantaranya adalah rokok kretek filter (11,97 persen), tongkol/tuna/cakalang (3,85 persen), kembung (3,33 persen di perkotaan), roti (3,15 persen), telur ayam ras (3,05 persen), teri (2,63 persen) dan lainnya (gula pasir, bawang merah, tahu, tempe, dan sebagainya) 26,57 persen. Sementara untuk daerah perdesaan, barang-barang kebutuhan pokok lain yang berpengaruh terhadap Garis Kemiskinan Makanan (GKM) diantaranya adalah rokok kretek filter (14,69 persen), gula pasir (3,59 persen), daging sapi (3,39 persen), daging ayam ras (3,08 persen), tongkol/tuna/cakalang (2,96 persen), daging babi (2,68) dan lainnya (telur ayam ras, mie instan, bawang merah, dan sebagainya) 30,45 persen.

Komoditi bukan makanan yang paling penting bagi penduduk miskin adalah pengeluaran perumahan. Pada bulan September 2018, sumbangan pengeluaran perumahan terhadap Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) sebesar 10,78 persen di perkotaan dan 8,23 persen di perdesaan. Selain perumahan, barang-barang kebutuhan non makanan lain yang berpengaruh cukup besar terhadap Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) di perkotaan diantaranya adalah angkutan (3,46 persen), listrik (2,83 persen), pendidikan (1,78 persen), minyak tanah (1,26) dan lainnya (bensin, perlengkapan mandi, pakaian jadi, dan sebagainya) 7,66 persen. Sedangkan untuk daerah perdesaan, barang-barang kebutuhan non makanan lain yang berpengaruh terhadap Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) diantaranya adalah bensin (2,85 persen), listrik (1,66), minyak tanah (0,94 persen), angkutan (0,83 persen) dan lainnya (perlengkapan mandi, sabun cuci, kayu bakar, dan sebagainya) 4,81 persen.

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN

Secara nilai absolut, penduduk miskin Provinsi Papua Barat pada September 2018 berjumlah 213,67 ribu jiwa, menurun sebanyak 0,8 ribu jiwa jika dibandingkan kondisi Maret 2018 yang berjumlah 214,47 ribu jiwa. Sedangkan secara persentase, penduduk miskin Provinsi Papua Barat pada September 2018 mencapai 22,66 persen, turun sebesar 0,35 poin dibandingkan Maret 2018 yang mencapai 23,01 persen. Jika dibandingkan dengan kondisi pada Bulan September 2017, terjadi

peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,46 poin. Selama periode Maret 2018 – September 2018, penduduk miskin Provinsi Papua Barat di daerah perkotaan mengalami kenaikan 1,92 ribu jiwa, sedangkan di daerah pedesaan mengalami penurunan sebesar 2,72 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di perkotaan meningkat tipis sebesar 0,47 poin, sedangkan di pedesaan turun sebesar 1,02 poin (Tabel 8.3).

Tabel 8.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Papua Barat Menurut Perkotaan dan Pedesaan, Maret 2018 – September 2018

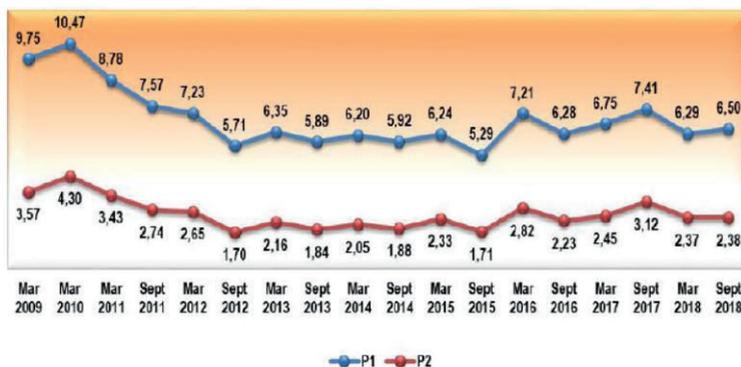
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin		
	Perkotaan	Pedesaan	Total	Perkotaan	Pedesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Maret 2018	19,33	195,14	214,47	5,10	35,31	23,01
September 2018	21,25	192,42	213,67	5,57	34,29	22,66

Sumber : Diolah dari Data Susenas Maret 2018 dan September 2018

KEDALAMAN KEMISKINAN DAN KEPARAHAN

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman (ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan) dan tingkat keparahan (ukuran ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin) dari kemiskinan.

Pada periode Maret 2018 – September 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan yang naik. Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami kenaikan 0,21 poin yaitu dari 6,29 persen pada Maret 2018 menjadi 6,50 persen pada September 2018. Sedangkan untuk Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami kenaikan sebesar 0,01 poin yaitu dari 2,37 persen pada Maret 2018 menjadi 2,38 persen pada September 2018 (Gambar 8.1). Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi garis kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin bertambah dibanding periode sebelumnya.



Gambar 8.1. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Papua Barat, Maret 2009 – September 2018

Sumber: diolah dari data susenas Maret 2009 - September 2018

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan jauh lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Pada bulan September 2018, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Papua Barat untuk perkotaan mencapai 0,89 persen sementara di daerah perdesaan mencapai 11,81 persen. Sementara nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Papua Barat untuk perkotaan mencapai 0,18 persen, sementara daerah perdesaan mencapai 3,88 persen (Tabel 8.4). Dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendapatan dan ketimpangan kemiskinan di daerah perkotaan jauh lebih baik daripada perdesaan.

Tabel 8.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Papua Barat Menurut Perkotaan dan Pedesaan, September 2017 – September 2018

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁)			
September 2017	0,83	11,81	7,41
Maret 2018	0,71	10,11	6,29
September 2018	0,89	10,32	6,50
Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂)			
September 2017	0,19	5,09	3,12
Maret 2018	0,16	3,90	2,37
September 2018	0,18	3,88	2,38

Sumber : Diolah dari data Susenas September 2017-September 2018

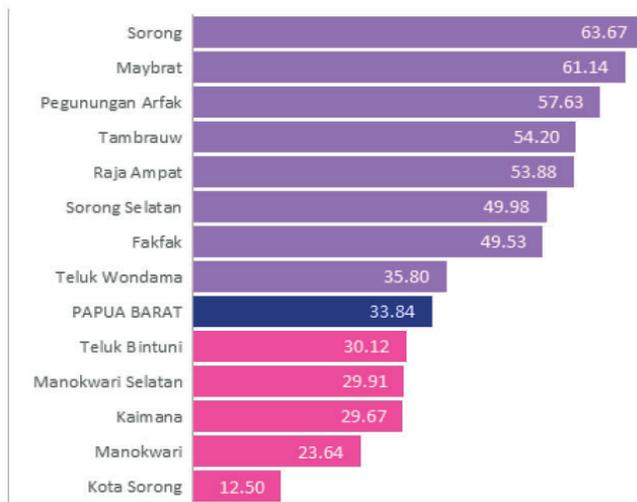
Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan mencakup dua sasaran. Pertama, mengurangi beban rumah tangga miskin untuk kebutuhan dasar dan meningkatkan pendapatannya. Pengurangan beban rumah tangga miskin antara lain melalui program raskin, asuransi kesehatan penerima bantuan iuran (PBI-BPJS), bantuan siswa miskin, program keluarga harapan. Pemberian kredit untuk usaha merupakan bagian dari upaya peningkatan pendapatan penduduk miskin.

Pembagian Beras Miskin

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016, beras miskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Secara nasional, sasaran program Raskin Tahun 2016 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 rumah tangga sasaran (RTS) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

Gambar 8.2 memperlihatkan persentase rumah tangga yang membeli/menerima beras murah/raskin selama 3 bulan terakhir menurut kabupaten/kota, di Provinsi Papua Barat Tahun 2018. Pada tahun 2018, persentase rumah tangga yang membeli/menerima beras murah/miskin selama 3 bulan terakhir sebesar 32,48 persen. Pembelian/penerimaan beras murah/miskin ini tergolong rendah dibanding target yang harus terpenuhi 100 persen. Kabupaten Sorong menjadi yang tertinggi untuk membeli/menerima beras murah/miskin ini dengan 73,70 persen. Di sisi yang lain, Kabupaten Teluk Bintuni menjadi yang terendah hanya dengan 11,36 persen. Rendahnya pembelian/penerimaan beras murah/miskin di wilayah Papua Barat dapat disebabkan oleh keterlambatan distribusi beras akibat kesulitan akses secara geografis.



Gambar 8.2. Persentase Rumah Tangga yang Membeli/Menerima Beras Murah/Miskin Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, Maret 2018

Sumber: *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS Provinsi Papua Barat*

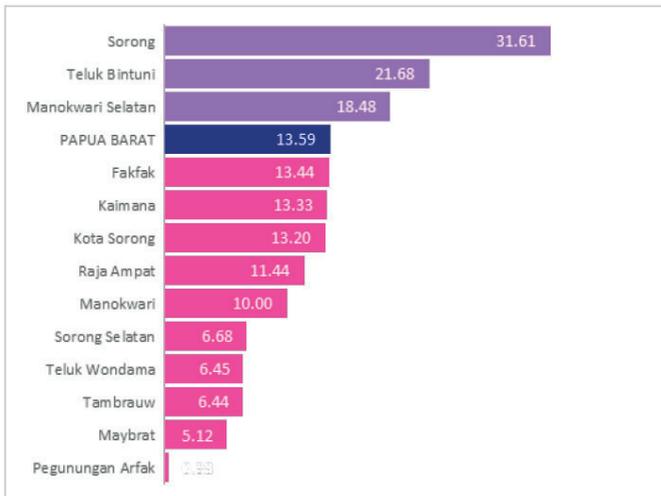
Masalah lain dari penyaluran beras miskin adalah terkait waktu penyalurannya. Hingga saat ini, penyaluran beras miskin masih bersifat “rapel” dalam arti jatah beras miskin beberapa bulan diterima sekaligus pada bulan tertentu. Ada rumah tangga yang membeli beras miskin kurang dari 15 kg untuk satu bulan, ada juga rumah tangga yang membeli beras miskin lebih dari 15 kg untuk satu bulan. Akibatnya, ada bulan-bulan tertentu yang tidak menerima beras miskin sama sekali. Selain itu, rumah tangga lain membeli beras miskin kurang dari 15 kg karena tidak mempunyai cukup uang dan ada juga yang membeli beras miskin seperlunya.

BANTUAN SISWA MISKIN

Selain program beras miskin, program bantuan sisa miskin atau BSM juga merupakan bagian dari penanggulangan kemiskinan melalui program perlindungan sosial. BSM mencakup 34 provinsi. BSM digulirkan mengingat angka *drop out* masyarakat miskin baik antar jenjang kelas maupun antar jenjang pendidikan sangat tinggi. Karena itu, sasaran penerima BSM adalah anak sekolah dari rumah tangga pada kelompok 25

% pengeluaran terendah. Cakupan tersebut meliputi 17.927.308 orang anak sekolah pada tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA. Besaran bantuan yang akan diberikan untuk tahun ajaran 2017/2018 bagi tingkat SD/MI sebesar Rp 450.000/semester, SMP/MTs Rp 750.000/semester dan SMA/SMK/MA Rp 1.000.000/semester.

Tujuan PIP adalah untuk membantu anak usia sekolah dari keluarga miskin melanjutkan sekolah sampai lulus dari jenjang pendidikan menengah, serta membantu anak-anak yang putus sekolah kembali bersekolah. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bersama Antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Nomor 07/D/BP/2016, serta Nomor 02/MPK.C/PM/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 2016.



Gambar 8.3. Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Indonesia Pintar (PIP) Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2018

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS Provinsi Papua Barat

Sepanjang periode Agustus 2016 hingga Maret 2018, persentase rumah tangga yang menerima PIP di Papua Barat sebesar 13,08 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Sorong sebesar 27,09 persen, sementara yang terendah di Kabupaten Tambrauw hanya sebesar 3,76 persen (Gambar 8.3). Rendahnya penerimaan PIP di kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat bisa saja terjadi karena keterlambatan distribusi penyaluran PIP maupun sistem “rapel” yang acapkali dilakukan.



09

PENUTUP

Indikator Pertumbuhan Ekonomi. Tidak terpenuhinya target daerah untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi dikarenakan belum ada upaya maksimal yang dilakukan oleh daerah untuk mendorong sektor industri pengolahan berbasis pertanian sesuai dengan konteks lokal, guna mendukung sektor industri pengolahan yang selama ini mendominasi distribusi PDRB Papua Barat. Sinergitas RPJMD wilayah KEK terhadap RPJMD Provinsi Papua Barat dan RPJMN belum nampak kecuali kabupaten Raja Ampat.

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Capaian TPT Papua Barat belum memenuhi target Daerah dikarenakan terjadi pergeseran struktur lapangan pekerjaan (dari Pertanian menuju Sektor Industri dan Jasa) di Papua Barat, namun tidak diikuti dengan ketrampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja. Sinergitas RPJMD wilayah KEK terhadap RPJMD Provinsi Papua Barat dan RPJMN belum nampak kecuali kabupaten Raja Ampat.

Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin. Masih tingginya angka persentase penduduk miskin di Papua Barat sehingga belum memenuhi target Daerah dan Nasional dikarenakan proses pemberdayaan masyarakat (kelompok miskin) yang dilakukan selama ini kurang memperhatikan penguatan peran masyarakat, dan memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mencari solusi dan mengatasi persoalan-persoalan mereka dengan caranya mereka. Sinergitas RPJMD wilayah KEK terhadap RPJMD Provinsi Papua Barat dan RPJMN belum nampak pada kabupaten Sorong.

Indikator Indeks Gini. Capaian indeks Gini Papua Barat belum memenuhi target Nasional dan Daerah dikarenakan rendahnya produktivitas tenaga kerja lokal, yang kemudian secara langsung akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar masyarakat di Papua Barat. Sinergitas RPJMD wilayah KEK terhadap RPJMD Provinsi Papua Barat dan RPJMN belum nampak.

Sampai dengan Tahun 2018, Indeks Pendidikan dalam IPM yang menggambarkan tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh Penduduk di Papua Barat terus mengalami peningkatan dari 0.57 (Tahun 2015) point menjadi 0.59 point di Tahun 2018. Selain itu, capaian indikator Rata-rata Angka Melek Huruf penduduk usia 15 tahun keatas di Papua Barat hanya memenuhi target Daerah, namun tidak memenuhi target Nasional. Keadaan ini dikarenakan tingginya persentase penduduk miskin utamanya rumah tangga-rumah tangga di wilayah per kampung dan wilayah terpencil di Papua Barat. Keadaan tersebut menyebabkan rumah tangga miskin memiliki akses yang sangat terbatas untuk menjangkau hasil pembangunan dalam dunia pendidikan. Sinergitas RPJMD wilayah KEK terhadap RPJMD Provinsi Papua Barat dan RPJMN belum nampak.

Semua indikator kesehatan, tingkat capaiannya belum memenuhi target Nasional (belum ada target Daerah dalam RPJMD dan RKPd Provinsi Papua Barat). Keadaan ini dikarenakan, (1) Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan bayi yang baru lahir. Keadaan tersebut menyebabkan tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan cukup tinggi di Papua Barat. Selain itu, kondisi kesehatan lingkungan sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat di Papua Barat, terutama pemahaman terhadap perilaku hidup bersih dan sehat; dan (2) Keterbatasan aksesibilitas dan kualitas kesehatan. Pelayanan kesehatan dasar di Papua Barat masih belum mencapai standar pelayanan minimal (SPM), prasarana pelayanan kesehatan dasar belum dapat diakses sepenuhnya oleh masyarakat terutama penduduk miskin, dan tenaga kesehatan belum merata terutama di perdesaan, utamanya tenaga kesehatan spesialis.

Terdapat tiga indikator dalam aspek Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata yang tingkat pencapaiannya memenuhi target Nasional, namun belum dapat memenuhi target Daerah. Kemudian kontribusi Sektro Hotel dan Restoran terhadap pembentukan PDRB Papua Barat masih sangat rendah, tingkat realisasi PMA belum mencapai target Nasional, realisasi PMDN selama empat tahun terakhir mengalami fluktuatif. Belum memenuhinya target capaian untuk beberapa indikator disebutkan diatas dikarenakan, (1) industri pariwisata belum tumbuh dan berkembang dengan baik di Papua Barat; dan (2) dominannya kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Papua Barat, menyebabkan ketergantungan terhadap lapangan usaha cukup tinggi.

Meskipun rasio elektrifikasi Papua Barat hingga Tahun 2018, capaiannya telah memenuhi target Nasional dalam RKP Nasional Tahun 2018, namun upaya ini masih belum cukup dan harus diperluas, karena masih terdapat 21.483 rumah tangga di daerah terpencil di Papua Barat yang belum memperoleh akses penerangan (listrik) yang tersebar pada 1.724 kampung di Papua Barat. Belum maksimalnya pelayanan melalui sumber penerangan utama (listrik) kepada rumah tangga di Papua Barat dikarenakan, (1) permasalahan alses, keterbatasan aksesibilitas untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan terisolasi di Papua Barat menjadi kendala pihak PLN wilayah Papua Barat untuk mendistribusikan penggunaan listrik secara merata di Papua Barat; dan (2) daya beli masyarakat yang relatif rendah, utamanya kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah sehingga tidak mampu membayar listrik, meskipun jaringan listrik sudah terpasang.

Isu strategis pembangunan wilayah yaitu digambarkan melalui tingkat kesenjangan ekonomi dalam wilayah dan antarkota/antarkabupaten di Provinsi Papua Barat yang ditunjukkan dengan nilai Gini Rasio dan Indeks Wiliamson dari tahun 2015 s.d 2018 cukup tinggi dan berada di atas rata-rata Nasional. Penyebab kesenjangan ekonomi dan sosial di Provinsi Papua Barat antara lain jarak kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi yang terbatas. Kesenjangan dalam perekonomian menimbulkan disparitas terutama melonjaknya harga barang kebutuhan pokok.

DAFTAR PUSTAKA

BI Perwakilan Papua Barat, 2019. "Laporan Perekonomian Provinsi Papua Barat Tahun 2019". Manokwari, Papua Barat.

Badan Pusat Statistik (BPS), 2018. "Statistik Transportasi Provinsi Papua Barat Tahun 2017". Manokwari, Papua Barat.

BPS, 2019. *BPS dalam Database PEPPD Bappenas RI Tahun 2019*. Bappenas, Jakarta.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat, 2019. "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat Tahun 2017 s.d 2022". Manokwari, Papua Barat.

Bappeda Provinsi Papua Barat, 2019. "Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019". Bappeda Papua Barat, Manokwari, Papua Barat.

Bappenas RI. 2015. "Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Papua Barat tahun 2015". Jakarta.

Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Papua Barat, 2013. "Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2017".

ILO, 2005. "Meningkatkan Kesetaraan Gender Dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak Serta Perdagangan Perempuan dan Anak", Jakarta.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2018. "Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2017". Dirjen Ketenagalistrikan. Jakarta.

Ombudsmen Papua Barat, 2018. "Ombudsmen Breafing Implementasi Penyediaan Perumahan di Provinsi Papua Barat". Manokwari, Papua Barat.

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) RI No. 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kab. /Kota.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018 tentang 2018 tentang Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya. Jakarta.

Supriadi, 2008. "Strategi Kebijakan Pembangunan Pertanian di Papua Barat, Analisis Kebijakan Pertanian, vol 6 (4), 352-377.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

PROFIL SINGKAT PENULIS:

Ir. Totok Mei Untarto, M.Sc.

Mantan peneliti senior yang saat ini bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat, pada jabatan Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan sejak tahun 2017 sampai sekarang.

Ir. Abdul Havidz Fatamasya, M.Si.

Staf pada Bidang Ekonomi Pembangunan, dan sejak bulan Januari 2021 telah dilantik dalam jabatan Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat.

Dr. Rully Wurarah, M.Si.

Bekerja sebagai Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua dengan Bidang keahlian Ekonomi Pembangunan. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Yeddy Aprian Syakh, S.ST.

Bekerja sebagai Staf pada Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat pada bagian data dan pengolahannya.

Mona Permatasari Mokodompit, SE., M.Ak.

Bekerja sebagai Staf Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua dengan bidang keahlian khusus Akuntansi.

Penerbitan buku ini bertujuan memberikan gambaran sejauh mana peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah di kawasan yang dipersiapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Hasil kajian evaluasi yang ditampilkan adalah berdasarkan data dan informasi selama lima tahun terakhir, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang jujur, demokratis, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel yang dapat mendorong peningkatan indikator ekonomi maupun pembangunan.



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT**

Gedung Kantor Gubernur Sayap 1 Lt. 2 dan 3
Jl. Brig. Jen. Mar. (Purn) Abraham O. Atururi Arfai Manokwari
Papua Barat 98312



<http://balitbangda.papuabaratprov.go.id>



@balitbangdaPap1



Balitbangda Papua Barat



balitbangda_papua_barat